Arum Ardianingsih, S.E., M.Acc., Ak.CA

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

BUMI AKSARA

Copyrighted material

AUDIT

LAPORAN KEUANGAN

Arum Ardianingsih,M.Acc., Ak.Ca.

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

Penerbit
BUMI AKSARA

BA 01.05.3344

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

Oleh : Arum Ardianingsih,M.Acc., Ak.Ca
Editor : Bunga Sari Fatmawati

Diterbitkan oleh PT. Bumi Aksara
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Januari 2018
Desain Cover: Risqiani Nur Badria
Layout: Fahri Nur Prasojo
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset
Sumber gambar:

ISBN 978-602-444-236-1

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Arum Ardianingsih
Audit Laporan Keungan/ Arum Ardianingsih; editor, Bunga Sari Fatmawati -- Jakarta: Bumi Aksara, 2018
xiv, 184 hlm.; 14,5 x 20,5 cm.

ISBN 978-602-444-236-1

1. Audit I. Judul. II. Arum Ardianingsih

Karya ini didedikasikan untuk;

Putri Kecilku Vina dan Rara,

Suamiku Budhi

Guru, Dosen dan para Mahasiswaku

PRAKATA

Alhamdulilah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan buku Audit Laporan Keuangan. Buku ini terdiri dari sebelas bab dengan pembahasan yang padat, lugas, komunikatif, serta contoh kasus sederhana namun cukup komprehensif sehingga memudahkan bagi mahasiswa akuntansi, akademisi, dan praktisi yang ingin mempelajari ilmu audit.

Buku ini merupakan jenis buku ajar. Pembahasan buku ini lebih menekankan pada penalaran, pemahaman, dan metode/teknik untuk melakukan audit laporan keuangan. Buku ini juga telah mempergunakan *International Standard Audit* (ISA) sebagai standard audit laporan keuangan. Penulis percaya bahwa pemahaman konsep fundamental dalam audit umumnya berkenaan dengan penentuan sifat dan jumlah bukti audit, yang harus dikumpulkan sebagai dasar memadai untuk memberikan audit yang berkualitas. Auditor juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi unik dari masing-masing penugasan audit.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan buku ini. Kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk membantu mahasiswa yang ingin berhasil mempelajari *auditing* di bangku perguruan tinggi. dan bagi mereka yang memerlukan referensi mengenai *auditing*. Amin.

Pekalongan, November 2017

Penulis

KATA PENGANTAR

Dosen memiliki tugas untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pembelajaran berkualitas tercapai manakala ada sinergi antara dosen, mahasiswa, dan media pembelajaran. Media buku ajar merupakan sarana yang memudahkan bagi dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tersedianya referensi buku ajar yang murah dan berkualitas akan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang baik dan bermutu. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi (FE) mengucapkan selamat kepada penulis atas tersusun dan terbitnya buku ketiga yang berjudul Audit Laporan Keuangan. Semoga buku ini bermanfaat untuk mahasiswa akuntansi khususnya dan semua pihak yang ingin mempelajari ilmu audit. Wassalamualaikum Wr Wb.

Dekan FE Unikal

Zahro, SE, M.Si

DAFTAR ISI

PRAKATA. ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

BAB I AUDIT DAN PROFESI AUDITOR **1**

A. *Auditing* 2
B. Jenis-Jenis Audit..... 4
C. Profesi Auditor 6
D. Standar Audit 7
E. Asersi 17
F. Kertas Kerja Audit……..... 18
G. Bukti Audit…….. 19
H. Prosedur Audit……..... 20
I. Kualitas Audit……..... 22

BAB II ETIKA PROFESI AUDITOR **30**

A. Etika Profesi 30
B. Profesi…..... 31
C. Kode Etik Auditor 32
D. Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) 36

BAB III PENGENDALIAN INTERN **39**

A. Pengendalian Intern..... 40
B. Jenis Pengendalian Intern 42
C. Komponen Struktur Pengendalian Intern 46
D. Menilai Pengendalian Intern 50
E. Pengendalian Intern yang Relevan untuk Audit..... 53

BAB IV RISIKO AUDIT DAN MATERIALITAS 57
A. Risiko Bisnis 58
B. Model Risiko Audit 64
C. Materialitas..... 68

BAB V KECURANGAN *(FRAUD)* 73
A. Definisi Kecurangan *(Fraud)* 74
B. Bentuk-Bentuk Kecurangan *(Fraud)* 75
C. Teori-Teori Kecurangan *(Fraud)*..... 79
D. Pencegahan Kecurangan *(Fraud)*..... 82

BAB VI STRATEGI AUDIT DAN PROGRAM AUDIT..... 91
A. Strategi Audit 92
B. Pengujian Audit 93
C. Program Audit 96

BAB VII AUDIT SIKLUS PENDAPATAN 103
A. Transaksi Siklus Pendapatan 104
B. Tujuan Audit Siklus Pendapatan 104
C. Memahami Pengendalian Intern atas Siklus Pendapatan 105
D. Pengujian Audit Siklus Pendapatan..... 107
E. Prosedur Audit dalam Siklus Pendapatan..... 108
F Bukti Audit atas Siklus Pendapatan 112

BAB VIII AUDIT SIKLUS PENGELUARAN..... 116
A. Transaksi Siklus Pengeluaran 117
B. Tujuan Audit Siklus Pengeluaran..... 118
C. Memahami Bisnis Klien dan Pengendalian Intern.. 118
D. Pengujian Audit Siklus Pengeluaran. 121
E. Prosedur Audit Siklus Pengeluaran. 121
F. Bukti Audit Siklus Pengeluaran. 124

BAB IX AUDIT SIKLUS PENDANAAN 128
A. Siklus Pendanaan..... 129
B. Tujuan Audit Siklus Pendanaan 130
C. Memahami Bisnis Klien dan Pengendalian Intern.. 132
D. Pengujian Audit atas Siklus Pendanaan 134
E. Prosedur Audit atas Siklus Pendanaan 135
F. Bukti Audit atas Siklus Pendanaan..... 139

BAB X AUDIT SIKLUS PERSONALIA 142
A. Siklus Personalia 143
B. Tujuan Audit Siklus Personalia 144
C. Memahami Bisnis Klien dan Pengendalian Intern.. 145
D. Pengujian Audit atas Siklus Personalia 146
E. Prosedur Audit atas Siklus Personalia..... 147
F. Bukti Audit atas Siklus Pendanaan..... 150

BAB XI MERUMUSKAN OPINI 154
A. Opini Audit 155
B. Representasi Tertulis Manajemen. 166
C. Peristiwa Kemudian *(Subsequent Events)*..... 167
D. Kelangsungan Usaha *(Going Concern)*..... 169

DAFTAR PUSTAKA 173

GLOSARIUM 176

INDEKS 181

PROFIL PENULIS 183

Bab 1
AUDIT DAN PROFESI AUDITOR

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa setelah selesai mempelajari bab ini, maka mampu menjelaskan tentang audit dan bagaimana cara kerja auditor.

Cerita Pembuka

Universitas Maju memiliki ketentuan untuk ujian semester akhir mahasiswa S1 jurusan Manajemen yang ditetapkan dalam prosedur kelulusan No.dok:MJ/UM/8.1, yang menyatakan bahwa mahasiswa baru boleh mengikuti ujian sidang jika telah memenuhi IPK minimum 2,80. Dalam audit ditemukan bahwa ada satu mahasiswa Satrio Bagus dengan NIM: 00111502 telah mengikuti sidang ujian akhir padahal IPKnya hanya 2,78. Dalam kasus ini muncul ketidaksesuaian, yakni proses ujian akhir untuk Satrio Bagus tidak sesuai dengan prosedur kelulusan No.dok;MJ/UM/8.1. Ketika melakukan wawancara dengan pihak pengelola universitas, hal ini diperbolehkan karena Satrio Bagus merupakan mahasiswa yang terancam *drop out* dan masa studi yang hampir habis.

Cerita di atas disarikan dari Gilang (2012:98). Kondisi tersebut mencerminkan bagaimana cara kerja profesi auditor. Pelaksanaan tugas audit mengharuskan auditor memahami dan menerapkan standar audit secara benar dan tepat.

A. *AUDITING*

Definisi *auditing* menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002:5) adalah "suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan". Sementara itu, menurut Sukrisno (2012:4) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tujuan pemeriksaan keuangan/audit yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan tujuan audit menurut Tuanakotta (2013:89) yaitu menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor (*to reduce this audit risk to an acceptably low level*). Adapun tujuan pemeriksaan akuntan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah untuk menyatakan pendapat kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Audit sangat penting dilakukan karena adanya risiko informasi, yaitu kemungkinan informasi yang digunakan untuk menilai risiko bisnis tidak dibuat secara tepat karena berikut ini.

1. Informasi diterima dari pihak lain.
2. Bias dan motivasi pembuat informasi.
3. Volume data.
4. Kerumitan transaksi.

Audit juga memiliki beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Akses ke pasar modal.
2. Biaya modal menjadi lebih rendah.
3. Pencegah terjadinya ketidakefisienan dan kecurangan.
4. Perbaikan dalam pengendalian dan operasional.

Audit adalah salah satu contoh penugasan asurans. Jasa asurans adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi pemangku kepentingan, atas hasil pengukuran informasi keuangan dan informasi nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria. Audit memiliki lima unsur penugasan sebagai berikut.

1. Hubungan Tripartit

Dalam perikatan audit maka ada tiga pihak yang memiliki hubungan utama yaitu a) auditor sebagai praktisi, b) penangung jawab adalah manajemen perusahaan dari perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, dan c) pengguna yang dituju sesuai dengan tujuan penugasan audit seperti bank, investor, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sebagainya.

2. Informasi Pokok Tugas Audit

Pokok tugas audit dan informasi pokok tugas audit dilakukan auditor dengan mengevaluasi kinerja atau kondisi keuangan (laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas), sistem dan proses seperti pengendalian intern perusahaan atau sistem teknologi informasi, serta perilaku manajemen perusahaan seperti adanya tata kelola perusahaan.

3. Kriteria

Audit menggunakan kriteria sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi pokok tugas, serta tolok ukur untuk penyajian dan pengungkapan.

Dalam audit maka kriteria yang digunakan adalah standar yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan seperti SAK, SAP, SPKN dan sebagainya.

4. Bukti Audit

Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit sangat tergantung pada bukti yang berhasil ditemukan oleh auditor. Bukti audit harus cukup dan tepat. Kecukupan bukti adalah ukuran kuantitas dari suatu audit. Ketepatan bukti adalah mengukur kualitas dari suatu bukti yang mensyaratkan adanya relevan dan andal.

5. Laporan Asurans

Dalam setiap penugasan audit maka auditor akan menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan, yang menegaskan asurans yang diperolehnya tentang informasi pokok tugas.

B. JENIS-JENIS AUDIT

Audit adalah salah satu jasa asurans yang diberikan oleh auditor. Audit secara umum diklasifikasikan ke dalam ketiga kategori berikut.

1. Audit Laporan Keuangan

Audit ini dilakukan untuk menilai dan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan oleh manajemen perusahaan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas), serta menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria/ketentuan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material yang berpengaruh terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Contoh audit tahunan atas laporan

keuangan PT. Maju Sejahtera, dengan menggunakan kriteria Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

2. Audit Operasional/Kinerja

Audit ini biasanya melakukan pengujian secara sistematis, terorganisasi, dan objektif atas suatu perusahaan untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif, dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja perusahaan. Dalam melaksanakan audit kinerja maka auditor harus memiliki pengetahuan memadai tentang perencanaan stratejik, perencanaan kinerja tahunan, anggaran berbasis kinerja, sistem pengindikator kinerja, analisis, dan pelaporan capaian kinerja. Tujuan audit kinerja adalah mendapatkan keyakinan memadai tentang laporan kinerja yang diaudit, dengan melakukan pengujian informasi kinerja yang dilaporkan dan meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. Tahapan audit kinerja adalah a) mengetahui informasi kinerja, b) perencanaan audit kinerja, c) survei pendahuluan, dan d) pelaporan. Contoh evaluasi proses penggajian pegawai apakah sudah berjalan efektif dan efisien ataukah belum. Kriteria yang digunakan adalah standar yang ditetapkan perusahaan mengenai efisiensi dan efektivitas bagian penggajian.

3. Audit Kepatuhan

Audit ini merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi, dan seluruh atau sebagian aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien, apakah tujuan kegiatan/program telah direncanakan dan dicapai secara efektif dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, audit perusahaan atas kewajiban perpajakannya untuk menentukan apakah perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan atau tidak.

C. PROFESI AUDITOR

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai. Profesi auditor biasanya diklasifikasikan dalam tiga kategori berdasarkan siapa yang mempekerjakan mereka, yaitu auditor eksternal, auditor internal, dan auditor pemerintah.

1. Auditor Eksternal

Auditor eksternal merupakan pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan, berkedudukan independen, dan tidak memihak baik terhadap *auditee*-nya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan *auditee*-nya (pengguna laporan keuangan). Auditor eksternal dapat melakukan semua jenis audit. Auditor eksternal adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik. Auditor eksternal memperoleh imbalan (*fee*) berdasarkan kontrak dengan pihak perusahaan yang diaudit/*auditee*. Auditor eksternal menyatakan opini atas laporan keuangan perusahaan *auditee* yang terdapat dalam laporan auditor independen. Auditor eksternal biasanya melakukan kegiatan audit mendekati tanggal neraca dan dalam jangka waktu tiga sampai empat bulan, atau sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk satu kali penugasan audit.

2. Auditor Internal

Auditor internal adalah pegawai dari perusahaan yang diaudit dan mendapatkan gaji dari perusahaan. Auditor internal melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen dalam lingkungan perusahaan sebagai suatu bentuk jasa bagi perusahaaan. Auditor internal biasanya melakukan audit kepatuhan dan audit operasional. Auditor internal memberikan rekomendasi untuk perbaikan bagi perusahaan. Pihak luar biasanya tidak dapat mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal karena kedudukannya yang kurang independen.

Auditor internal biasanya melaksanakan kegiatan audit setahun 2 (dua) kali atau sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan.

3. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di bawah instansi pemerintah. Ia bertugas untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Auditor pemerintah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan digaji oleh negara. Dalam melakukan kegiatan audit maka auditor berpedoman pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Auditor pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Auditor pemerintah ekternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dapat melakukan berbagai jenis audit. Hasil akhirnya berupa opini yang terdapat dalam laporan auditor independen. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.
b. Auditor pemerintah internal adalah BPKP, KPK, Inspektorat, Irjen. Biasanya lebih banyak melakukan jenis audit kepatuhan/kesesuaian dan audit kinerja/operasional. Hasil akhir yang diberikan adalah berupa rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan.

D. STANDAR AUDIT

Standar adalah kriteria atau ukuran mutu kinerja yang harus dicapai. Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit, serta syarat minimum yang harus dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Standar audit diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan auditor. Berikut beberapa standar audit.

1. *International Standards on Auditing* (ISA)

International Standards on Auditing (ISA) dikeluarkan oleh *International Auditing Practices Committee* (IAPC) dari *International Federation of Accountants* (IFAC) yang merupakan organisasi profesi akuntan di dunia. Standar audit mengalami perubahan dengan mengadopsi *International Standards on Auditing* (ISA) sejak tahun 2013 dan mulai berlaku untuk perusahaan emiten per 1 januari 2013 dan perusahaan nonemiten per 1 januari 2014. Menurut SA-ISA maka standar audit menjadi sebagai berikut.

a. Prinsip Umum dan Tanggung Jawab

SA 200 Overall Objectives of the independent Auditor and the conduct of an Audit in Accordance with international Standards on Auditing.
SA 210 Agreeing the terms of Audit Engagements
SA 220 Quality Control for An Audit of Financial Statements
SA 230 Audit Documentations
SA 240 The Auditor`s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements.
SA 250 Consideration of Laws and Regulations in an audit of Financial Statements
SA 260 Communication with Those Charged with Governance
SA 265 Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management.

b. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Dinilai

SA 300 Planning an Audit of Financial Statements
SA 315 Identifying and Assesing the Risk of Material Misstatement through Understanding the Entity and its Environment
SA 320 Materiality in Planning and Performing an Audit
SA 330 The Auditor`s Responses to Assessed Risk
SA 402 Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service

Organization
SA 450 Evaluation of Misstatements identified during the Audit

c. *Bukti Audit*

SA 500 Audit Evidence
SA 501 Audit Evidence --- Specific Considerations for Selected items
SA 505 External Confirmation
SA 510 Initial Audit Engagements---Opening Balances
SA 520 Analytical Prosedures
SA 530 Audit Sampling
SA 540 Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates and Related Disclosures
SA 550 Related Parties
SA 560 Subsequent Event
SA 570 Going Concern
SA 580 Written Representations

d. *Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain*

SA 600 Special Considerations---Audits of Group Financial Statements including the Work of component Auditor
SA 610 Using the Work of Internal Auditors
SA 620 Using the Work of an Auditor`s Expert

e. *Kesimpulan Audit dan Pelaporan*

SA 700 Forming an Opinion an Reporting on Financial Statements
SA 705 Modifications to the Opinion in the Independent Auditor`s Report
SA 706 Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor`s Report
SA 710 Comparative Information---Corresponding Figures and Comparative Financial Statements
SA 720 The Auditor`s Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements

f. Area Khusus

SA 800 Specialized Areas.

Standar ini berbasis pada prinsip yang mengutamakan hal-hal sebagai berikut dalam melaksanakan audit.

1) Auditor harus mengetahui tujuan audit yang akan dicapai.
2) Auditor wajib mengenali bisnis klien, karakteristik manajemen perusahaan klien, serta industri bisnis dan lingkungannya.
3) Auditor harus mengetahui apa yang harus dilakukan agar audit sesuai dengan standar dan berkualitas.
4) Auditor harus senantiasa mengedepankan kearifan profesional dan skeptisme profesionalnya di sepanjang pelaksanaan audit.

2. Standar Audit APFP

Standar ini merupakan prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan APFP, serta akuntan publik yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi suatu APFP. Standar ini terdiri dari 24 butir standar yang terbagi dalam 5 kategori berikut (Ulum, 2009;109-110).

a. Standar Umum

1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi harus dipertahankan oleh APFP dan para auditornya.
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya maka auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
4) Dalam segala hal yang berkaitan dengan penugasan, APFP dan para auditornya harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

b. Standar Koordinasi dan Kendali Mutu

1) Rencana induk pengawasan harus disusun oleh setiap APFP dengan memerhatikan GBHN dan kebijakan pengawasan nasional.

2) Koordinasi pengawasan antar APFP harus dilakukan secara terus menerus.
3) Sistem kendali mutu yang memadai harus dimiliki oleh setiap APFP.

c. *Standar Pelaksanaan*

1) Pekerjaan audit harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Auditor harus mempelajari dan menilai keandalan struktur pengendalian intern, untuk menentukan luas dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan.
3) Bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup harus diperoleh sebagai dasar memadai untuk mendukung pendapat, simpulan, dan rekomendasi.
4) Auditor harus melaksanakan pengujian atas ketaatan auditan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengujian atas kemungkinan adanya kekeliruan, ketidakwajaran, dan tindakan melawan hukum.
5) Auditor harus mendokumentasikan hal-hal penting yang menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit APFP.

d. *Standar Pelaporan*

1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2) Laporan audit harus menunjukkan keadaan, jika ada, prinsip akuntansi yang tidak secara konsisten diterapkan dalam laporan keuangan periode yang diaudit dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3) Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan audit harus memuat penjelasan mengenai sifat pekerjaan auditor dan tingkat tanggung jawab yang diperlukan.

5) Laporan audit operasional harus mencakup beberapa hal berikut.
   a) Memuat tujuan audit, lingkup audit, dan metodologi audit.
   b) Memuat temuan dan simpulan audit secara objektif, serta rekomendasi yang konstruktif.
   c) Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan daripada kritik.
   d) Mengungkapkan hal-hal yang merupakan masalah, jika ada, yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya audit.
   e) Mengemukan pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan, terutama jika perbaikan itu dapat diterapkan di entitas lain.
   f) Mengemukakan penjelasan pejabat auditan mengenai hasil audit.
   g) Menyatakan informasi penting, jika ada, yang tidak dimuat karena dianggap rahasia atau harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Laporan audit harus menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit APFP.
7) Laporan audit harus dibuat secara tertulis segera setelah berakhirnya pelaksanaan audit.
8) Laporan audit harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Standar Tindak Lanjut

1) APFP harus mengomunikasikan kepada manajemen auditan bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi berada pada pihak auditan.

2) APFP harus memantau tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi.
3) APFP harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.
4) APFP harus membantu aparat hukum terkait dengan temuan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum.

3. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan. Standar pemeriksaan keuangan negara ditujukan sebagai pedoman bagi para pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, agar auditor senantiasa memelihara kompetensi, integritas, objektivitas dan independensi pada semua tahapan pekerjaan audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) meliputi berikut ini.

a. Standar Umum

1) Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional memadai dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
2) Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat memengaruhi independensinya.
3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan maka pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama.
4) Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan, harus memiliki sistem pengendalian mutu memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus ditinjau oleh pihak lain yang kompeten.

b. *Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan*

1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan pemeriksaan dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3) Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. *Standar Pekerjaan Lapangan*

1) Pemeriksa harus mengomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa atau pihak yang meminta pemeriksaan.
2) Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.
3) Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji material, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa dan memberikan bukti berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh material, tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan maka pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan terjadi.

4) Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi yang merupakan indikasi kecurangan atau ketidakpatutan, dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan maka pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
5) Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan.
6) Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan.

f. Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan

1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
2) Laporan auditor independen harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan, dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

g. Standar Pelaporan

1) Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan.
2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian kepatuhan, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.
3) Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai "kondisi yang dapat dilaporkan".
4) Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan tersebut mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.
5) Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6) Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. ASERSI

Auditing mempergunakan asersi manajemen sebagai objek pemeriksaan. Seorang auditor harus memahami secara benar bahwa asersi meliputi lima hal, yaitu keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan. Jika manajemen memberikan asersi yang benar maka dampak kesalahan keuangannya tidak ada. Jika manajemen memberikan asersi yang salah maka dampak kesalahan keuangannya bisa berupa angka-angka yang dinyatakan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kesalahan manajemen dalam asersi laporan keuangan mempunyai dampak kuantitatif dan kualitatif. Mengacu pada **ISA 315** mendefinisikan asersi sebagai berikut.

> *"Asersi adalah representasi oleh manajemen baik secara eksplisit (dalam bentuk pernyataan) maupun implisit (tersirat) yang terkandung dalam laporan keuangan. Representasi ini digunakan oleh auditor untuk memerhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan yang mungkin terjadi".*

Tabel 1.1 Asersi-Asersi Manajemen

Kategori Asersi	Makna Asersi
Keberadaan atau keterjadian	Aset dan kewajiban suatu entitas ada per tanggal tertentu, transaksi pendapatan, dan biaya terjadi pada periode tertentu.
Kelengkapan	Semua transaksi dan rekening yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, telah dicantumkan di dalamnya secara lengkap per tanggal neraca.
Hak dan kewajiban	Aset dan pendapatan adalah milik entitas dan kewajiban entitas pada tanggal tertentu.

Penilaian dan pengalokasian	Elemen-elemen aset, kewajiban, pendapatan dan biaya telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat.
Penyajian dan pengungkapan	Elemen-elemen dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, diuraikan, dan diungkapkan secara tepat per tanggal tertentu.

F. KERTAS KERJA AUDIT

Kertas kerja dapat dianggap sebagai dokumentasi audit. Dalam hal ini maka dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur audit yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Dokumentasi audit harus mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk mendukung laporan audit. Kertas kerja adalah milik auditor. Kertas kerja audit adalah catatan mengenai pekerjaan audit. Kertas kerja audit harus memuat informasi yang cukup untuk memungkinkan auditor yang berpengalaman, untuk memastikan bahwa bukti audit yang mendukung kesimpulan dan penilaian audit yang signifikan telah diperoleh.

Hak dan kepemilikan kertas kerja tunduk pada pembatasan yang diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik, berkaitan dengan hubungan yang bersifat rahasia dengan klien. Auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja, dan menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktik audit dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen.

Kertas kerja merupakan catatan yang disimpan oleh auditor independen mengenai prosedur-prosedur yang diikuti, pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil. Kertas kerja biasanya digolongkan menjadi dua, yaitu berikut ini.

1. *Permanent File*

Berisi data yang diharapkan akan bermanfaat dalam penugasan-penugasan di masa yang akan datang, contohnya berikut ini.

a. Salinan notulen rapat dewan komisaris.
b. Salinan kode rekening.
c. Salinan struktur organisasi perusahaan.
d. Akta pendirian perusahaan.

2. *Current File*

Berisi data yang berhubungan dengan pelaksanaan audit pada tahun yang bersangkutan, contohnya berikut ini.

a. Jawaban konfirmasi piutang.
b. Rekonsiliasi bank.
c. Memo observasi perhitungan fisik persediaan.
d. Neraca saldo.

G. BUKTI AUDIT

Bukti audit *(evidence audit)* adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sementara proses audit adalah proses menghimpun bukti sehingga auditor dapat memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan yang diaudit sebagai dasar untuk merumuskan opini. Tujuan pengumpulan bukti audit adalah memperoleh bukti audit yang mampu mendukung temuan audit. Kesimpulan audit dan rekomendasi audit sangat tergantung pada bukti-bukti audit yang didapat. Bukti audit terdiri dari: 1) informasi yang terdapat dalam cacatan akuntansi (yang mendasari laporan keuangan) seperti catatan transaksi, buku jurnal, buku besar dan sebagainya; 2) informasi lain seperti notulen rapat. Bukti tersebut harus memenuhi sifat, kualitas, dan jumlah yang memadai agar kesimpulan yang dibuat

berdasarkan bukti-bukti tersebut valid. Syarat-syarat bukti audit adalah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Cukup

Bukti audit dikatakan cukup apabila jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan auditor. Cukup atau tidak bukti audit dipengaruhi oleh *judgement* auditor sesuai dengan situasi dan kondisi audit.

2. Relevan

Bukti audit dikatakan relevan apabila mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti dengan kriteria audit yang ditetapkan.

3. Kompeten

Bukti audit dikatakan kompeten apabila bukti yang diperoleh berasal dari sumber yang independen dan dapat dipercaya serta terjamin keakuratannya.

Ada empat keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak, yakni sebagai berikut.

a. Prosedur audit yang akan digunakan.
b. Berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut.
c. *Item* mana yang akan dipilih dari populasi.
d. Kapan melaksanakan prosedur tersebut.

H. PROSEDUR AUDIT

Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit selama proses audit. Bukti audit dapat diperoleh auditor dengan melakukan serangkaian prosedur audit yang terdiri dari berikut ini.

1. Inspeksi

Inspeksi adalah salah satu prosedur yang dapat digunakan oleh auditor

untuk menilai risiko. ISA 500 menggunakan istilah inspeksi dalam dua makna, yaitu sebagai berikut.

a. Pemeriksaan catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya.
b. Pemeriksaan fisik atas suatu aset.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi meliputi kegiatan mengamati pelaksanaan sejumlah proses atau prosedur yang dilakukan oleh karyawan klien. Prosedur observasi menyediakan informasi tambahan mengenai perusahaan dan lingkungannya. Prosedur ini juga sebagai prosedur pendukung dari prosedur bertanya.

3. Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal adalah bukti audit berupa tanggapan tertulis secara langsung yang diperoleh auditor atas permintaannya dari pihak ketiga dalam bentuk kertas, elektronik atau media lainnya. Prosedur audit mengenai konfirmasi eksternal diatur dalam ISA 505.

4. Perhitungan Kembali

Perhitungan kembali adalah mengecek akurasi atau ketelitian matematis (tambah, kurang, kali, bagi) dalam catatan atau dokumen. Perhitungan kembali dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik.

5. Lakukan Kembali

Auditor melakukan kembali secara independen prosedur atau pengendalian yang telah atau seharusnya sudah dikerjakan, sebagai bagian dari sistem pengendalian intern di perusahaan klien.

6. Prosedur Analitikal

Merupakan kegiatan mempelajari dan membandingkan data-data keuangan maupun data nonkeuangan yang saling berhubungan (melakukan

perbandingan-perbandingan laporan keuangan). Prosedur analitikal merupakan salah satu prosedur penilaian risiko yang membantu mengindentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Contohnya, angka-angka yang terlalu tinggi, rasio-rasio yang melenceng, dan tren yang ganjil.

7. Bertanya

Bertanya adalah mencari informasi dari orang yang mengetahui masalah keuangan dan nonkeuangan, baik orang di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Bertanya digunakan secara ekstensif sepanjang audit. Prosedur ini merupakan salah satu dari prosedur untuk melakukan penilaian risiko.

8. Teknik Audit Berbasis Komputer *(Computer Assisted Audit Techniques/CAATs)*

Penggunaan *software* audit untuk melakukan berbagai prosedur audit apabila catatan akuntansi klien dipelihara dalam media elektronik.

I. KUALITAS AUDIT

Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas audit diukur. Kualitas memang tidak akan sama di setiap kantor akuntan, terlebih antarkantor dengan ukuran yang berbeda secara signifikan. Kualitas audit yang bisa diberikan oleh kantor berukuran besar yang berskala internasional dengan kantor yang hanya berskala lokal atau regional pasti akan berbeda. Kualitas auditor yang berpengalaman mengaudit di suatu industri memang akan berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman mengaudit di industri tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kualitas audit atau kualitas auditor bisa diukur dengan ukuran kantor akuntan atau spesialisasi kantor akuntan. Ada beberapa definisi kualitas audit yaitu sebagai berikut.

1. Definisi yang diungkapkan oleh peneliti DeAngelo (1981) bahwa kualitas audit adalah sebagai probabilitas penilaian pasar jika laporan keuangan memiliki unsur penyimpangan yang material dan auditor dapat menemukan kemudian melaporkan penyimpangan tersebut. DeAngelo lebih menekankan kualitas audit secara kontekstual.
2. Definisi yang diungkapkan oleh peneliti Lee, Liu, dan Wang (1999), kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Perubahan suplai auditor karena adanya pengaruh peraturan terhadap suplai auditor. Mereka menduga pemberlakuan peraturan itu akan berdampak terhadap suplai auditor dan kualitas audit. Permintaan audit didefinisi sebagai jumlah perusahaan yang akan menggunakan jasa akuntan eksternal untuk menjual saham mereka untuk pertama kali ke pasar, sedangkan suplai audit adalah jumlah auditor yang memilih untuk masuk ke dalam pasar. Mereka mengilustrasikan bahwa ketika peraturan tentang pendidikan auditor yang diekspektasi akan meningkatkan kualitas auditor diberlakukan, maka permintaan atas jasa audit tidak akan berubah. Sisi yang terpengaruh adalah sisi suplai, terutama suplai auditor yang dikenai peraturan. Sebaliknya, bagian auditor yang tidak dikenai aturan tidak akan terpengaruh. Berasumsi bahwa kualitas bersifat endogenus. Artinya, kualitas audit dipengaruhi oleh level pendidikan selain daripada upaya audit yang bisa diamati.
3. Definisi yang diungkapkan oleh peneliti Titman dan B. Trueman (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993) bahwa kualitas auditor diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Informasi yang akurat adalah informasi yang bisa dengan tepat menunjukkan nilai perusahaan. *Paper* mereka sendiri masih mengambil pendirian bahwa auditor yang

berkualitas tersebut berhubungan dengan ukuran kantor akuntan. Jadi, walaupun kualitas auditor didefinisikan berbeda, Titman dan Trueman (1986) masih menggunakan proksi kualitas yang sama dengan DeAngelo (1981).

4. Definisi yang diungkapkan oleh peneliti Wallace (1980) dalam Watkins *et al* (2004) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan dari kemampuan dalam mengaudit untuk mengurangi risiko dan penyimpangan dan meningkatkan kewajaran dalam data akuntansi.

Dari uraian definisi kualitas auditor di atas dapat disimpulkan dua dimensi terkait kualitas auditor, yaitu auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran, sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jika seorang auditor bersikap independen maka ia akan memberi penilaian sesuai kenyataan terhadap laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apa pun terhadap pihak manapun. Oleh karena itu, penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Di sini juga dapat disampaikan bahwa isu tentang definisi kualitas audit ini belum bisa dikatakan selesai. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, apakah memang tepat untuk menekankan pada isu independensi untuk mendapatkan audit yang berkualitas mengingat bahwa independensi adalah sikap mental yang tidak bisa diobservasi dengan mudah (Kinney, 1999).

Watkins *et al* (2004:155) menjelaskan bagaimana seharusnya kualitas audit diukur. Mereka memisahkan antara reputasi auditor dan kekuatan pemonitoran auditor. Reputasi auditor diukur dengan kompetensi serapan (*perceived*) dan independensi serapan. Reputasi akan menghasilkan informasi yang kredibel. Kredibilitas informasi

sendiri diukur dengan derajat keyakinan pengguna atas suatu informasi. Karena berhubungan dengan keyakinan pengguna maka reputasi auditor bisa berubah sesuai dengan penilaian pengguna informasi terhadap reputasi auditor tersebut. Di sisi lain, kekuatan pemonitoran auditor diukur dengan kompetensi auditor dan independensi auditor. Kekuatan pemonitoran akan menghasilkan informasi berkualitas yang diukur dari seberapa baik informasi dalam mencerminkan kondisi ekonomi sesungguhnya. Kualitas informasi ini bisa bervariasi antarpenugasan dan antarwaktu. Akan tetapi, ukuran ini lebih tepat sebagai ukuran kualitas audit karena lebih berhubungan dengan kondisi aktual. Dalam hal ini, auditor sebagai "mata" pemegang saham harus bisa memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh auditor lepas dari salah saji material. Kualitas audit lebih ditentukan dari penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh kantor akuntan untuk tujuan pengauditan.

Kualitas audit memiliki dimensi berikut ini.

1. Independensi

Independensi adalah salah satu hal yang esensial untuk dipenuhi oleh seorang auditor, untuk menjamin kewajaran atas kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Jika akuntan tidak bersikap independen maka opini yang diberikannya tidak akan memberi tambahan nilai apa pun. Independensi mencakup sisi tampilan dan kenyataan (*in appearance and in fact)*.

Mautz dan Sharaf (1961: 206-207) mengusulkan tiga dimensi independensi auditor. *Pertama* adalah independensi dari kontrol atau pengaruh yang tidak diinginkan dalam pemilihan teknik, prosedur audit dan luas penerapannya. *Kedua* adalah independensi dari kontrol atau pengaruh yang tidak diinginkan dalam pemilihan area, aktivitas, hubungan personal, dan kebijakan manajerial yang ingin diuji. *Ketiga*

adalah independensi dari kontrol atau pengaruh yang tidak diharapkan dalam penyampaian fakta yang ditemukan dari pengujian atau dalam penyampaian rekomendasi maupun opini sebagai hasil dari sebuah pengujian.

Pendapat lain tentang independensi yang cukup menarik disampaikan oleh Kinney (1999). Ia justru mengajukan pertanyaan tentang apakah auditor harus independen terhadap klien atau terhadap informasi yang disampaikan oleh klien. Independensi auditor terhadap klien adalah hal yang sukar untuk diobservasi oleh pihak lain. Tidak ada pihak lain selain auditor dan klien yang bisa memastikan seberapa independen auditor di dalam sebuah penugasan. Sementara itu, auditor sendiri berkepentingan terhadap kelanjutan hubungan bisnisnya dengan klien. Oleh karena itu, menurutnya auditor memang tidak bisa tidak memiliki kepentingan pada klien mereka. Sementara itu, *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mengusulkan definisi yang mengatakan bahwa auditor harus bersikap independen terhadap informasi bukannya independen terhadap klien yang menyusun informasi. Artinya, auditor tidak akan bisa independen terhadap klien yang menyewa dan memberi penghasilan kepada mereka, termasuk jika penghasilan itu selain dari jasa nonaudit. Sebaliknya, auditor justru bisa independen terhadap informasi yang disampaikan. Misalnya, auditor tidak boleh menetapkan atau mau menetapkan *fee* audit berdasarkan persentase tertentu dari laba perusahaan.

2. Kompetensi

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya. Lee (1993: 66) berpendapat bahwa auditor saat ini diharapkan untuk memiliki kompetensi profesional yang substansial di berbagai area,

yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap tugas auditnya. Tugas pengauditan adalah tugas untuk memverifikasi dan mengatestasi kualitas informasi akuntansi yang kompleks dan teknis yang terdapat di dalam informasi keuangan yang dilaporkan kepada pemegang saham (Lee, 1993: 82). Oleh karena itu, hal yang relevan jika diasumsikan bahwa auditor harus memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai dan pantas untuk mencapai tujuan dari fungsi audit.

Latihan Soal

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Jelaskan jenis-jenis audit yang saudara ketahui!
2. Jelaskan jenis-jenis auditor yang saudara ketahui!
3. Jelaskan kode etik auditor IAPI!
4. Jelaskan lima unsur penugasan audit!
5. Jelaskan syarat-syarat dari bukti audit!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dokumentasi audit dan bagaimana penggolongan dari kertas kerja!
7. Jelaskan isi dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)!
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur audit dan jenis-jenis dari prosedur audit!
9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *auditing*!
10. Mengapa audit dibutuhkan dalam kegiatan bisnis!

B. Bacalah kasus sederhana berikut dengan cermat dan saksama

Kasus 1

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai auditor maka sering kali melaksanakan audit atau me-*review* atas hal-hal berikut.

1. Operasi komputer pada sebuah perusahaan untuk mengevaluasi apakah pusat komputer itu telah dioperasikan seefisien mungkin.
2. SPT pajak penghasilan perusahaan untuk menentukan apakah peraturan perpajakan telah dipatuhi.

3. Operasi komputer pada sebuah perusahaan besar untuk meng-evaluasi apakah pengendalian intern dapat mencegah salah saji dalam data akuntansi dan operasi.
4. Perjanjian obligasi untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang tertulis dalam kontrak.
5. Pengeluaran instansi pemerintah untuk proyek riset khusus, untuk menentukan apakah pengeluaran tersebut konsisten dengan tagihan pihak legislatif yang mengotorisasi proyek tersebut.

Diminta:

1. Dari lima kondisi di atas maka nyatakan jenis auditor apa yang paling tepat untuk melaksanakan masing-masing audit!
2. Dalam setiap kondisi di atas nyatakanlah jenis audit yang sesuai untuk dilakukan!

Kasus 2

Setiap calon auditor dari sebuah KAP harus telah mengikuti suatu pendidikan dasar *auditing* dan telah diwawancarai dan disetujui oleh seorang partner audit dari KAP yang bersangkutan sebelum dapat diterima sebagai staf audit. Elemen pengendalian mutu yang mana tercermin dalam kondisi ini dan apa tujuan dari persyaratan tersebut?

Kasus 3

Rara adalah staf bagian kredit Bank Hore. Rara bertanggung jawab atas penagihan piutang yang dimiliki Bank Hore. Bank Hore memiliki piutang sebesar Rp200.000.000,- kepada PT Abdi Karya yang bergerak dibidang jasa angkutan. PT Abdi Karya melayani angkutan untuk perusahaan menengah dan kecil. PT Abdi Karya menjaminkan 8 truk kepada Bank Hore dengan harga masing-masing sebesar Rp50.000.000,. Rara meminta Girisha seorang akuntan publik untuk melakukan

penghitungan atas truk-truk yang dijaminkan dengan berpedoman pada dokumen dari PT Abdi Karya. Rara meminta kepada Girisha untuk membuat laporan mengenai berikut ini.

1. Kondisi masing-masing truk dikategorikan dalam kondisi prima, baik atau buruk.
2. Harga pasaran dari masing-masing truk tersebut dengan kondisi pasar saat ini.
3. Kebenaran bahwa truk-truk tersebut merupakan milik dari PT Abdi Karya.

Diminta:

Tunjukkan kesulitan apa yang kemungkinan dihadapi oleh Girisha dalam melaksanakan tugas auditnya!

Bab 2
ETIKA PROFESI AUDITOR

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa setelah mempelajari bab ini mampu melakukan audit laporan keuangan secara beretika.

Cerita Pembuka

Almi adalah senior auditor pada KAP Hari dan Rekan. Almi memiliki pengalaman sekitar 10 tahun sebagai senior auditor. Saat ini, KAP Hari dan Rekan sedang melakukan audit pada PT Samudera Biru. Almi memiliki sekitar 5% saham di PT Samudera Biru, namun bukan merupakan pemilik saham mayoritas. Almi juga tidak ikut dalam tim auditor yang melaksanakan penugasan pada PT Samudera Biru tersebut.

Kondisi dan situasi di atas sering dihadapi oleh auditor dan merupakan salah satu dilema etika untuk memutuskan menerima penugasan audit ataukah tidak. Bab ini berusaha memberikan pemahaman mengenai etika yang harus dipegang teguh bagi auditor dalam melaksanakan penugasan auditnya.

A. ETIKA PROFESI

Etika adalah refleksi kritis dan logis atas nilai dan norma-norma untuk pengendalian diri. Etika profesi dibuat dan diterapkan dari dan

untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Profesi itu beranggotakan para profesional yang merupakan kumpulan orang-orang berkeahlian dan berkemahiran. Seorang profesional terbentuk dari proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Dalam memberikan jasa profesionalnya secara berkualitas maka para profesi dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat dan sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat *"built-in mechanism"* berupa kode etik profesi. Dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian.

B. PROFESI

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Akan tetapi, keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi. Penguasaan teori sistematis juga diperlukan untuk mendasari praktik pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik.

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Profesional memiliki tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Auditor sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Kepercayaan masyarakat atas kualitas jasa profesional akan semakin besar bila profesi mendorong standar kinerja dan perilaku beretika.

C. KODE ETIK AUDITOR

Profesi akuntan publik atau auditor sangat memerhatikan kualitas jasa yang dihasilkan, untuk memastikan bahwa profesi auditor telah memenuhi kewajibannya kepada pemakai jasa audit. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit yaitu ketaatan auditor pada kode etik profesinya. Tujuan kode etik adalah mengatur perilaku anggota profesi dan melindungi masyarakat pengguna jasa audit. Dalam melakukan audit maka auditor akan selalu berpedoman pada kode etik sehingga kualitas audit dapat selalu terjaga dengan baik. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dikeluarkan pertama kali pada tahun 1973 dan mengalami beberapa kali penyempurnaan. Kode etik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2010 memiliki komposisi sebagai berikut.

1. Prinsip etika yaitu standar perilaku etis ideal yang dinyatakan dalam istilah filosofis. Prinsip etika menjadi kerangka konseptual yang harus diterapkan auditor ketika: a) mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip etika, mengevaluasi seberapa signifikannya ancaman yang diidentifikasi, dan melakukan pengamanan untuk mengeliminasi atau menekan ancaman ke tingkat yang diterima. Ancaman yang dimaksud meliputi (a) ancaman terhadap kepentingan pribadi berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi akal sehat dan perilaku auditor, (b) ancaman akibat me-*review* pekerjaan sendiri, (c) ancaman karena kedekatan dengan klien dan (d) ancaman karena intimidasi. Sementara pengaman adalah penangkal terhadap ancaman yang diuraikan di atas. Contoh pengaman adalah adanya persyaratan mengenai jenjang pendidikan, jenis dan jumlah pelatihan, serta jenis dan lamanya pengalaman ketika akan memasuki profesi, persyaratan mengenai pengembangan

profesional berkelanjutan (PPL) di Indonesia. Prinsip etika terdiri dari lima prinsip berikut.

a. Integritas artinya lurus, lugas, dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
b. Objektivitas artinya tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau tekanan pihak lain dalam kaitan menghilangkan kearifan dan akal sehat profesional dan bisnis.
c. Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional artinya memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional, untuk memastikan bahwa klien atau karyawan mendapatkan jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terakhir dalam praktik, ketentuan perundangan dan teknik, serta bertindak sesuai dengan standar teknis dan standar profesional.
d. Kerahasiaan artinya menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis. Oleh karena itu, tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga yang tanpa hak/wewenang tepat dan spesifik, kecuali ada hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya.
e. Perilaku profesional artinya memenuhi ketentuan undang-undang dan aturan perundangan lainnya dan menghindari perbuatan yang merendahkan martabat profesi.

2. Aturan etika yaitu standar minimum dari perilaku etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik/khusus (suatu keharusan). Aturan etika IAPI terdiri dari berikut ini.
   a. Ancaman dan pencegahan.
   b. Penunjukkan praktisi, KAP, atau jaringan KAP.
   c. Benturan kepentingan.
   d. Pendapat kedua .
   e. Imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya.

f. Pemasaran jasa profesional.
g. Penerimaan hadiah atau bentuk keramahtamahan lainnya.
h. Penyimpanan aset oleh klien.
i. Objektivitas semua jasa profesional.
j. Independensi dalam perikatan *assurance.*

3. Interpretasi etika yaitu interpretasi atas peraturan perilaku sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

1. Kode Etik Auditor Internal

Auditor internal melaksanakan tugas audit secara beretika. Sesuai dengan SNI 19-19011-2005 yang menyatakan bahwa kode etik auditor sebagai berikut.

a. Etis, yaitu secara benar dan sesuai dengan hasil pengamatan selama pelaksanaan audit, harus jujur dengan apa yang disampaikan tulus dalam melaksanakan audit, dan tidak ada beban pada waktu audit. Bijaksana dalam mengambil kesimpulan audit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam sistem mutu atau prosedur sistem mutunya. Disiplin dalam hal tepat waktu dalam pelaksanaan audit sesuai jadwal yang ditetapkan.
b. Terbuka, yaitu tidak ada yang disembunyikan dalam menyampaikan temuan selama audit baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian.
c. Diplomatis yaitu bijaksana dalam menghadapi *auditee*. Jika bertanya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh *auditee* serta tidak menimbulkan perasaan tidak enak hati kepada *auditee*.
d. Suka memerhatikan lingkungan yaitu aktif dalam melakukan pengamatan sekeliling selama audit berlangsung, baik kegiatan dengan aktivitas penggunaan mesin ataupun satu area tertentu.
e. Cepat mengerti dengan kondisi sekelilingnya selama audit.
f. Luwes dalam menghadapi kondisi yang mendadak, misal *auditee* mendadak harus meninggalkan ruangan karena hal yang lebih

penting sehingga auditor dapat menyesuaikan jadwal audit yang ditetapkan kemudian.

g. Tangguh dalam mencapai tujuan audit dan berpegang teguh terhadap kesimpulan auditnya karena berdasarkan ketentuan-ketentuan audit.
h. Tegas dalam mengambil keputusan serta tidak ragu-ragu untuk menentukan hasil audit.
i. Percaya diri sesuai dengan penugasan yang bertindak secara independen ketika berkomunikasi selama audit baik dengan *auditee* maupun dengan tim audit.

2. Kode Etik Auditor Internal Pemerintah/Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP)

Aturan perilaku pemeriksa BPKP bagi pemeriksa APFP 1992 dalam Ulum (94-103:2009) memuat tiga hal berikut.

a. Perilaku pemeriksa sesuai dengan tuntutan organisasi yang meliputi berikut ini.
   1) Pemeriksa wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
   2) Pemeriksa harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.
   3) Pemeriksa harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya.
   4) Pemeriksa harus memiliki integritas yang tinggi.
   5) Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mempertahankan objektivitasnya.
b. Perilaku pemeriksa dalam berinteraksi dengan sesama pemeriksa meliputi berikut ini.
   1) Pemeriksa wajib untuk menggalang kerja sama yang sehat dengan sesama pemeriksa.

2) Pemeriksa harus saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama pemeriksa.
3) Pemeriksa harus memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pemeriksa.

c. Perilaku pemeriksa dalam berinteraksi dengan pihak yang diperiksa meliputi berikut ini.
   a. Pemeriksa senantiasa harus menjaga penampilannya sesuai dengan tugas pemeriksa.
   b. Pemeriksa harus mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diperiksa.
   c. Pemeriksa harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak yang diperiksa.
   d. Pemeriksa wajib menggalang kerja sama yang sehat dengan pihak yang diperiksa.

D. PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah cara atau metode yang diimplementasikan pada sebuah kantor akuntan publik, untuk memastikan bahwa standar *auditing* secara konsisten ditaati dalam setiap kontrak kerja yang mengikat KAP. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tidak menetapkan pengendalian mutu tertentu untuk KAP. Pelaksanaan dan penerapan pengendalian mutu KAP dapat disesuaikan dengan ukuran KAP, jumlah kantor, dan jumlah akuntan publik yang ada di KAP. Pedoman IAI hanya menetapkan sembilan elemen pengendalian mutu untuk menjadi bahan pertimbangan KAP dalam menentukan kebijakan dan prosedur masing-masing KAP yang terdiri dari berikut ini (Arens dan Loebecke, 2003:23-24).

1. Independensi yaitu cara pandang auditor yang tidak memihak dalam memberikan jasa profesionalnya. Semua anggota tim audit yang melaksanakan penugasan audit harus memenuhi persyaratan

ini. Independensi terbagi menjadi dua yaitu independensi dalam fakta *(in fact)* dan independensi dalam penampilan *(in appearance)*.

2. Penugasan auditor yaitu auditor harus memiliki kemampuan dan pelatihan teknis yang memadai.
3. Konsultasi yaitu ketika tim auditor dan partner mengalamai permasalahan teknis tertentu maka harus ada prosedur untuk mendapat petunjuk dari para ahli.
4. Supervisi yaitu kebijakan untuk menjamin terlaksananya pekerjaan audit secara memadai dalam semua tingkatan pekerjaan.
5. Pengangkatan auditor yaitu seluruh auditor yang baru harus memiliki kemampuan, keterampilan teknis, dan pengetahuan memadai dalam pelaksanaan audit.
6. Pengembangan profesional yaitu setiap auditor harus memperoleh pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dan memadai, dalam mendukung pelaksanaan kerja secara kompeten.
7. Promosi yaitu kebijakan promosi jabatan sesuai kualifikasi dan tanggung jawab untuk semua auditor.
8. Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien yaitu seluruh klien dan calon klien harus dievaluasi untuk meminimalkan terjadinya keterbatasan integritas manajemen.
9. Inspeksi yaitu kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menjamin terpenuhinya kedelapan elemen pengendalian mutu di atas secara konsisten dan berkelanjutan.

Standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh IAASB tercantum dalam *International Standar on Quality Control (ISQC 1)*. Dalam hal ini, ISQC 1 mewajibkan auditor/KAP menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu yang terdiri atas kebijakan dan prosedur mengenai unsur-unsur berikut.

1. Tanggung jawab pimpinan KAP atas mutu di dalam KAP-nya.
2. Ketentuan etika yang relevan.
3. Hubungan dengan klien.

4. Sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan penugasan.
6. Pemantauan.

Implementasi pengendalian mutu KAP dapat tercapai dengan baik apabila semua pekerjaan audit ada *peer review* baik antarrekan sejawat maupun antarpartner. Selain itu, pengendalian mutu KAP juga mensyaratkan adanya rotasi auditor dan rotasi KAP yang membatasi pemberian jasa audit dalam rentang waktu tertentu.

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika profesi?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan profesi dan profesional?
3. Jelaskan komposisi kode etik profesi auditor?
4. Jelaskan komponen dari prinsip etika IAPI?
5. Jelaskan kode etik untuk auditor intern?
6. Jelaskan kode etik untuk auditor intern pemerintah?
7. Jelaskan elemen pengendalian mutu KAP?
8. Apa tujuan ditetapkannya kode etik auditor?

Kasus

Bentuklah kelompok dan diskusikan kasus di bawah ini!.

Irish seorang partner pada KAP Irish dan rekan memasang iklan di surat kabar bahwa kantornya telah mengaudit lima belas koperasi simpan pinjam dari dua puluh lima koperasi simpan pinjam yang ada di kota itu. Iklan tersebut juga menyatakan *fee* auditnya yang lebih rendah dari *fee* audit KAP lainnya dan mampu menyelesaikan audit dalam jangka waktu tiga puluh hari.

Diminta: pelanggaran etika apa yang dilanggar pada kondisi di atas!

Bab 3
PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa setelah mempelajari bab ini memahami pengendalian intern dan mampu menilai pengendalian intern selama proses audit secara benar dan tepat.

Cerita Pembuka

PT Maju Jaya adalah perusahaan tertutup yang cukup berhasil dan bergerak di bidang manufaktur mobil. Penjualan dan laba telah tumbuh dengan cepat selama beberapa tahun terakhir dan prospek perusahaan di masa yang akan datang sangatlah baik. Keberhasilan PT Maju Jaya karena didukung oleh tenaga penjual yang sangat ramping tetapi berorientasi pada pencapaian target kinerja. Untuk efisiensi perusahaan hanya mempekerjakan satu manajer keuangan. Tugas manajer keuangan adalah mengeluarkan uang, menerima, serta mengotorisasi pengeluaran uang. Tugas dan wewenang diuraikan secara jelas dalam struktur organisasi. Budaya kerja tercipta dengan slogan kerja cerdas. Manajemen perusahaan sedang mempertimbangkan untuk melakukan *go public* untuk memperoleh tambahan modal.

KAP Budhi telah mengaudit perusahaan ini selama tiga tahun. Ketika auditor mulai memahami pengendalian internal klien maka auditor

secara teratur mewawancarai karyawan tentang bagaimana penerapan sistem pengendalian intern di klien. Pada akhirnya terlihat bahwa klien memiliki pengendalian intern yang efektif dan kooperatif. Manajemen perusahaan selalu komunikatif dengan auditor. Ternyata diketahui pada tahun 2014, manajer keuangan telah menyelewengkan dana operasional sebesar Rp100.000.000,- dalam kurun waktu dua tahun. KAP berusaha membantu mengimplementasikan pengendalian baru untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Cerita di atas menunjukkan bagaimana defisiensi pengendalian intern bisa menimbulkan salah saji material dalam laporan keuangan.

A. PENGENDALIAN INTERN

Pengertian pengendalian intern menurut Laporan Coso dalam Buku Boynton, Johnson, dan Kell (2002:373) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengertian pengendalian intern menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011:319) dalam Sukrisno (2012:100) adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian intern menurut Tuanakotta (2013:127) secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok berikut.

1. Strategis, sasaran-sasaran utama (*high level goals*) yang mendukung misi entitas.

2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
3. Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan pengendalian intern diharapkan bahwa pengendalian intern dapat memberikan keyakinan mengenai keandalan laporan keuangan kepada segala pihak yang menggunakannya. Selain itu, juga pengendalian intern diharapkan dapat meyakinkan dan menjamin seluruh pihak atas terlaksananya kegiatan perusahaan yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan akan semakin kecil dan aktivitas perusahaan berjalan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selain itu, tujuan pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. *International Standards on Auditing* (ISA) 315

Auditor wajib memahami lingkungan pengendalian. Sebagai bagian dari upaya pemahaman ini, ia wajib mengevaluasi berikut ini.

a. Manajemen yang diawasi *Those Charge with Governance* (TCWG), menciptakan dan mempertahankan budaya jujur dan perilaku etis.
b. Komponen-komponen lingkungan pengendalian secara kolektif memberikan landasan yang kuat bagi komponen pengendalian intern lainnya dan apakah komponen pengendalian intern tidak diperlemah oleh kekurangan/defisiensi dalam lingkungan pengendalian.

2. *International Standards on Auditing* (ISA) 315.12

Auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern yang relevan bagi auditnya. Meskipun kebanyakan pengendalian yang relevan dengan audit sangat berhubungan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah relevan dengan audit. Dengan kearifan profesionalnya, auditor menilai apakah suatu pengendalian secara individu atau dalam

kombinasi dengan pengendalian lainnya adalah relevan dengan auditnya.

ISA menjadikan pengendalian intern sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan wajib menetapkan, membangun, memelihara, dan mengimplementasikan lingkungan pengendalian dan pengendalian intern. Jika lingkungan pengendalian dan pengendalian intern tidak ada atau sangat tidak memadai maka risiko audit menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, auditor wajib menolak penugasan audit ini. ISA juga mewajibkan auditor menilai, menggunakan hasil penilaiannya, dan mengomunikasikan kelemahan dari pengendalian internal dari perusahaan yang diauditnya.

Auditor harus memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern dalam semua penugasan audit. Hal ini juga berlaku untuk semua ukuran perusahaan sekalipun auditor memutuskan untuk sepenuhnya menggunakan pendekatan pengujian subtantif dalam pekerjaan auditnya. Pemahaman yang cukup mengenai pengendalian intern adalah pemahaman mengenai hal-hal yang relevan, untuk melaksanakan audit yang meliputi pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Penilaian ini untuk mengidentifikasi pengendalian yang secara langsung atau tidak langsung menanggulangi salah saji material.

B. JENIS PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan jenisnya maka pengendalian intern dikelompokkan ke dalam lima bagian berikut.

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan sebagai upaya antisipasi manajemen sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan. Contohnya, pemisahan fungsi, penyeliaan, *editing*, pengecekan keandalan, kelengkapan, dan ketepatan perhitungan.

2. Pengendalian Detektif

Pengendalian yang menekankan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin terjadi. Contohnya, rekonsiliasi bank dan observasi kegiatan operasional.

3. Pengendalian Korektif

Upaya melakukan koreksi terhadap penyebab terjadinya masalah yang diidentifikasi melalui pengendalian detektif, sebagai antisipasi agar kesalahan yang sama tidak berulang di masa yang akan datang.

4. Pengendalian Langsung

Pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Contohnya, supervisi oleh atasan kepada bawahan dan pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerja.

5. Pengendalian Kompensatif

Upaya perbuatan pengendalian karena diabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya, pengetatan pengawasan langsung oleh pemilik terhadap pegawai pada usaha kecil seperti warung. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi karena tidak adanya atau ketidakjelasan pemisahan fungsi karena pegawainya sedikit.

Pengendalian intern biasanya terkait dengan aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan klien. Salah satu organ perusahaan klien yang melaksanakan fungsi pengendalian intern adalah komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan *(oversight)* atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Ketentuan mengenai komite audit BUMN diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2013 ps 70 menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif, serta berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan pengawas. Ketua komite audit adalah anggota komisaris independen yang diangkat oleh komisaris.

Berdasarkan surat edaran dari direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 menyebutkan sebagai berikut.

1. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang termasuk ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
3. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan tercatat. Sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif oleh *Komite Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002 antara lain disebutkan berikut ini.

1. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit.
2. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit.
3. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.
4. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri dari berikut ini.
   a. Paling sedikit tiga anggota.
   b. Mayoritas harus independen.

Tujuan dibentuknya komite audit adalah berikut ini.

1. Pelaporan keuangan. Dalam hal ini direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern. Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
2. Manajemen risiko dan kontrol. Dalam hal ini, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses manajemen risiko dan kontrol.
3. Tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, komite audit memberi pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi berikut ini.

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota yang noneksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.

4. Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan tempat pokok-pokok persoalan penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memperhatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol intern yang lebih baik.

Kenyataannya, komite audit terkadang hanya sekadar melakukan tugas-tugas rutin seperti penelaahan laporan dan seleksi auditor eksternal. Mereka tidak mempertanyakan secara kritis maupun menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggung jawab oleh manajemen. Karena banyak anggota komite audit yang tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, serta kurang memahami peran utamanya. Komite audit dapat melakukan sinergi dengan auditor internal untuk lebih meningkatkan pengendalian intern perusahaan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan atau kecurangan di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus (*fraud audit*). Komite audit dapat meminta bantuan pihak eksternal untuk melakukan audit investigasi atau audit forensik, untuk mengungkapkan terjadinya praktik kecurangan signifikan diperusahaan.

C. KOMPONEN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

Implementasi pengendalian intern dalam sebuah perusahaan biasanya dibangun dengan sebuah struktur pengendalian intern yang efektif

dan efisien. Struktur pengendalian Intern terdiri dari lima komponen berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Menurut Arens dan Loebbecke (1997: 261-262) lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha tersebut. Lingkungan pengendalian bisa dipahami dengan melakukan penilaian atas hal-hal berikut.

a. Integritas dan Nilai-Nilai Etika

Integritas dan nilai-nilai etika biasanya meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum, atau tidak etis.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan.

c. Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi

Manajemen melalui aktivitasnya memberikan tanda yang jelas kepada pegawai mengenai pentingnya pengendalian. Contoh, manajemen yang lebih menyukai risiko dan menghindari risiko. Pemahaman tentang falsafah manajemen dan gaya operasi membuat auditor dapat merasakan sikap mereka terhadap pengendalian.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Dengan memahami struktur organisasi klien

maka auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional usaha, serta menaksir bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dilaksanakan.

e. Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan komisaris sebaiknya adalah orang-orang independen yang menilai aktivitas manajemen. Sementara komite audit biasanya memiliki tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern dan ketaatan kepada undang-undang dan peraturan. Agar efektif maka komite audit seyogianya memelihara komunikasi dengan auditor intern dan auditor eksternal.

f. Kebijakan dan Prosedur Kepegawaian

Pegawai adalah sumber daya manusia yang penting diperhatikan untuk menjamin pengendalian intern efektif. Orang yang jujur dan efisien akan dapat bekerja pada tingkat yang tinggi, bahkan dengan sedikit pengendalian yang mendukung mereka. Akan tetapi, pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya, mereka juga memiliki risiko bawaan yang melekat. Misalnya, pegawai menjadi bosan atau tidak puas karena masalah pribadi dapat merusak kinerja atau tujuan mereka mungkin berubah. Karena pentingnya pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang efektif, metode bagaimana mereka direkrut, dievaluasi, dan digaji merupakan bagian yang penting dari struktur pengendalian intern.

2. Penetapan Risiko oleh Manajemen

Manajemen menetapkan risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian struktur pengendalian intern untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan. Auditor menetapkan risiko untuk memutuskan bahan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Jika manajemen secara efektif menilai dan bereaksi terhadap risiko maka auditor biasanya mengumpulkan lebih sedikit bahan bukti, dibandingkan jika manajemen

tidak dapat mengidentifikasi atau bereaksi terhadap risiko yang signifikan.

3. Sistem Akuntansi

Kegunaan sistem akuntansi untuk satuan usaha adalah untuk mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisis, mencatat, melaporkan transaksi, serta mengelola akuntabilitas atas kekayaan yang dimiliki perusahaan/klien. Misalnya, sistem akuntansi yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh pengiriman barang oleh perusahaan dicatat dengan benar, sebagai penjualan dan tercermin dalam laporan keuangan pada periode yang sesuai.

Untuk memahami rancangan sistem akuntansi maka auditor biasanya menentukan tentang hal-hal berikut.

a. Jenis-jenis transaksi utama suatu yang ada di perusahaan.
b. Bagaimana transaksi tersebut timbul.
c. Catatan akuntansi apa yang ada dan bagaimana sifatnya.
d. Bagaimana transaksi diproses sejak timbulnya transaksi sampai selesai mencakup luas dan sifat penggunaan komputer.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur selain dari empat komponen lainnya yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan. Aktivitas pengendalian digolongkan ke dalam kategori berikut.

a. Pemisahan tugas yang cukup.
b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.
c. Pengendalian fisik atas aset dan catatan. Perlindungan untuk mengamankan aset dan catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Contohnya, penggunaan gudang persediaan untuk menyimpan persediaan agar terhindar dari pencurian. Penggunaan sandi atau *password* sehingga

data penting perusahaan dapat tersimpan secara aman dan meminimalkan pencurian.

5. Pemantauan

Pemantauan atau *monitoring* adalah kegiatan pengawasan dan evaluasi atas kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai/manajemen perusahaan. Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen, untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian intern yang ada, laporan auditor intern, umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan atas tagihan yang datang.

D. MENILAI PENGENDALIAN INTERN

Perusahaan harus mengembangkan pengendalian intern yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dalam hal ini, manajemen perusahaan harus mengevaluasi rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Hasil pengujian manajemen harus didokumentasikan, sebagai dasar bagi asersi manajemen pada akhir tahun akuntansi mengenai efektivitas pelaksanaan pengendalian.

Auditor harus memiliki pemahaman yang cukup tentang entitas dan lingkungannya. Termasuk pengendalian intern untuk menilai apakah terdapat risiko salah saji material dalam laporan keuangan, yang disebabkan kekeliruan atau kecurangan, serta merancang sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Dalam kaitannya dengan audit laporan keuangan maka auditor harus lebih memerhatikan

pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan dan pengendalian intern atas kelompok transaksi dan saldo akun.

Sekadar bertanya kepada manajemen tidak cukup untuk mengevaluasi rancangan prosedur pengendalian intern dan apakah prosedur pengendalian intern itu sudah diimplementasikan ataukah belum. Auditor perlu mengamati pengendalian intern yang sedang berjalan dengan alasan berikut.

1. Proses pengendalian intern dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini kemungkinan karena ada produk atau jasa baru, efisiensi dalam operasi, pergantian pegawai dan sebagainya.
2. Pegawai perusahaan mungkin menjelaskan bagaimana suatu sistem seharusnya berfungsi dan bukan bagaimana sistem itu dalam kenyataannya berfungsi.

Menilai pengendalian intern artinya auditor juga menilai kelemahan pengendalian intern yang mungkin ada. Kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu kelemahan atau gabungan dari beberapa kelemahan dalam pengendalian intern yang menurut auditor penting untuk mendapatkan perhatian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan auditor dalam menilai betapa parahnya kelemahan pengendalian intern adalah berikut ini.

1. Dampak kelemahan pengendalian intern pada kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan.
2. Kerentanan aset terhadap kerugian atau kecurangan.
3. Objektivitas dan kompleksitas dalam menentukan angka estimasi seperti nilai wajar atas aset.
4. Volume kegiatan yang sudah atau akan terjadi dalam saldo akun, atau jenis transaksi yang terekspos oleh kelemahan pengendalian intern.
5. Pentingnya pengendalian intern dalam proses pelaporan keuangan.

Ketika auditor menemukan bahwa perusahaan klien memiliki kelemahan atas pengendalian intern maka auditor harus

mengomunikasikan hal ini dengan pihak manajemen. Komunikasi secara tertulis harus dibuat antara auditor dengan manajemen perusahaan mengenai kelemahan pengendalian intern. Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap komunikasi auditor mengenai kelemahan pengendalian intern, rekomendasi, dan tindakan perbaikan. Tanggapan manajemen perusahaan klien biasanya meliputi berikut ini.

1. Pelaksanaan tindakan perbaikan mengenai kelemahan pengendalian intern yang ditemukan auditor.
2. Keputusan mengenai manajemen tidak melaksanakan tindakan perbaikan yang direkomendasikan oleh auditor. Manajemen sudah mengetahui kelemahan pengendalian intern itu, dan memutuskan untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan karena alasan biaya.
3. Tidak bertindak sama sekali alias masa bodoh.

Jika kelemahan pengendalian intern sudah dilaporkan di masa lalu dan masih terjadi maka komunikasi yang dilakukan untuk tahun berjalan dapat mengulangi penjelasan dalam laporan masa lalu atau cukup mengacu pada laporan masa lalu tersebut. Jika kelemahan pengendalian intern tidak signifikan maka tidak perlu mengungkapkan temuan itu secara tertulis atau mengulanginya di tahun berjalan. Akan tetapi, jika ada perubahan dalam manajemen maka sangatlah tepat bagi auditor untuk mengomunikasikan kembali kelemahan pengendalian intern tersebut. Komunikasi mengenai kelemahan pengendalian intern yang signifikan biasanya meliputi: 1) penjelasan mengenai setiap kelemahan yang signifikan dan dampak yang mungkin terjadi, 2) usulan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern tersebut, dan 3) tanggapan manajemen mengenai yang sebenarnya atau yang akan dilakukan.

Prosedur penilaian risiko yang harus dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit mengenai implementasi pengendalian intern meliputi berikut ini.

1. Pengalaman auditor dari audit tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan apabila perusahaan klien adalah sama dengan tahun sebelumnya.
2. Bertanya *(inquiry)* kepada pegawai perusahaan klien.
3. Mengamati *(observing)* atau mengulangi *(re-performing)* aplikasi dari pengendalian tertentu.
4. Menginspeksi dokumen dan laporan.
5. Menelusuri satu atau beberapa transaksi melalui sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan.

E. PENGENDALIAN INTERN YANG RELEVAN UNTUK AUDIT

Perusahaan klien membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem pengendalian intern agar laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Dalam hal ini, pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh manajemen dan karyawan untuk memberikan keyakinan memadai tentang tercapainya tujuan perusahaan mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasional perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengendalian dirancang untuk langsung dan sesegera mungkin mencegah terjadinya salah saji yang material, dan jika salah saji itu terjadi maka kegiatan pengendalian intern mampu dengan cepat menemukan dan memperbaikinya. Pengendalian intern yang dilakukan manajemen perusahaan tidak semua relevan untuk tujuan audit laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor hanya perlu memperoleh pemahaman mengenai pengendalian yang mampu meminimalkan risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan atau kesalahan. Pengendalian intern yang digunakan auditor adalah pengendalian yang mampu mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan, pengendalian berupa pengamanan aset yang penting dalam pelaporan keuangan, serta pengendalian terhadap lengkapnya dan akuratnya informasi yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pengukuran kinerja manajemen.

1. Bentuk Dokumentasi dan Representasi Tertulis Mengenai Pengendalian Intern

Bentuk dokumentasi mengenai pengendalian intern yang umum dibuat oleh auditor adalah berikut ini.

a. Penjelasan naratif atau memo, yaitu deskripsi tertulis yang berisi komentar tentang pertimbangan atau penilaian auditor mengenai pengendalian intern perusahaan klien. Penjelasan naratif lebih banyak digunakan oleh auditor untuk dokumentasi atas pengendalian intern klien, karena penjelasan naratif lebih mudah dan sederhana.
b. Bagan alir *(flow charts)*, yaitu representasi berupa simbol dan diagram yang menjelaskan dokumen-dokumen klien dan alur dokumen tersebut dalam perusahaan klien.
c. Kombinasi antara *flow charts* dan penjelasan naratif merupakan bentuk dokumentasi yang terbaik dalam memahami pengendalian intern perusahaan klien.
d. Kuesioner dan daftar uji biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi kebijakan dan operasional pengendalian intern perusahaan klien. Kuesioner disusun untuk setiap audit siklus transaksi dan banyak dipakai oleh auditor untuk mendokumentasikan pengendalian intern perusahaan klien.

Representasi atau pernyataan tertulis tentang pengendalian intern harus diminta dari manajemen yang mengakui bertanggung jawab untuk mengadakan dan memelihara pengendalian intern, yang menurutnya diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan.

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, padat, dan jelas!

1. Mengapa auditor perlu memahami pengendalian intern atas perusahaan klien?
2. Apa tujuan manajemen perusahaan menetapkan adanya pengendalian intern?
3. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan auditor dalam menilai kelemahan dari pengendalian intern perusahaan klien?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian intern?
5. Jelaskan jenis-jenis pengendalian intern?
6. Prosedur audit apa yang digunakan auditor dalam memahami pengendalian intern dari perusahaan klien?
7. Apa bentuk dokumentasi auditor atas pengendalian intern dari perusahaan klien?
8. Tanggapan apa yang diberikan oleh manajemen perusahaan ketika auditor membangun komunikasi atas penerapan pengendalian internnya?
9. Mengapa auditor perlu mengamati pengendalian intern yang sedang berjalan di perusahaan klien?
10. Jelaskan unsur/komponen dari struktur pengendalian intern!

Kasus

Bacalah secara cermat dan saksama!

Berikut adalah kondisi yang ada dalam PT Maju Sejahtera yang bergerak sebagai pedagang besar eceran dan grosir.

1. Harga yang salah digunakan dalam faktur penjualan untuk menagih ke pelanggan karena harga yang salah sudah dimasukan ke dalam komputer.
2. Pegawai penerimaan barang menyisihkan sebagian daging sapi untuk pemakaian pribadi. Ketika pengiriman daging diterima maka bagian penerimaan barang membuat laporan penerimaan barang

dan mengirimkan laporan tersebut kepada bagian akuntansi. Pada saat itu, sebagian dari daging itu dimuat ke dalam mobil *pick up* milik salah seorang pegawai dan bukan ke dalam gudang pendingin.

3. Selama perhitungan fisik persediaan bahan-bahan makanan, seorang penghitung menuliskan deskripsi yang salah mengenai beberapa produk dan keliru menghitung jumlahnya.
4. Diperlukan persetujuan kepala bagian atau mandor atas kartu absen sebelum disiapkan pembayaran upah.

Diminta:

Untuk masing-masing kondisi di atas tunjukkan satu atau lebih jenis pengendalian intern yang tidak ada!

Bab 4
RISIKO AUDIT DAN MATERIALITAS

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami risiko audit dan materialitas dalam penugasan audit.

Cerita Pembuka

PT Baja Makmur bergerak pada bidang produksi baja dan sudah diaudit oleh KAP Marseila dan rekan selama tiga tahun. Manajemen perusahaan memiliki budaya kerja yang baik dibuktikan dengan adanya kerja sama, kejujuran, dan sikap positif terhadap audit serta pelaporan keuangan. Tidak ditemukan salah saji material dalam audit tahun sebelumnya. Pada saat penugasan audit ini diterima maka KAP telah mengamati integritas manajemen. Sebagai catatan bahwa Sujono yang menjabat direktur PT Baja Makmur terkenal sebagai seorang yang super nekat dan pernah mengalami kebangkrutan pada masa awal kariernya. Sujono suka mengatur dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain, tetapi tidak selalu bersedia mendelegasikan kewenangan secara penuh.

Pengendalian intern PT Baja Makmur dievaluasi dan dianggap cukup efektif untuk diperlakukan pada semua divisi dan departemen termasuk semua siklus transaksi. Sujono mendukung ide untuk memperbaiki pengendalian intern yang masih kurang, namun selalu menolak rekomendasi KAP Marseila untuk mengembangkan fungsi

audit internal. Sujono membuat perjanjian dengan para karyawan bahwa jika tahun ini laba sebelum pajak melebihi Rp7,9 M maka akan disetorkan sebagai kontribusi tambahan ke dana pensiun sebesar 5 persen dari kelebihan itu.

Kondisi di atas menjadikan KAP Marseila harus melakukan perencanaan audit tahun 2015 dan mempertimbangkan jumlah yang tepat untuk merencanakan materialitas dan berapa salah saji yang dapat ditoleransi serta besarnya risiko bawaan. Bab ini memberikan bekal yang cukup komprehensif bagi auditor mengenai penetapan risiko audit dan besarnya salah saji material.

A. RISIKO BISNIS

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah risiko. Dalam dunia bisnis maka ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan harus diperhatikan secara cermat apabila mengharapkan kesuksesan dalam berbisnis. Risiko yang sering dihadapi perusahaan antara lain: kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, dan kecurangan yang berakibat pada kerugian perusahaan.

Risiko bisnis klien adalah kegagalan dari perusahaan klien mencapai tujuan perusahaan untuk menyediakan pelaporan keuangan secara akuntabel dan reliabel, menjalankan operasional perusahaan secara efektif dan efisien, serta menanggulangi faktor eksternal seperti dampak inflasi terhadap industri. Risiko bisnis meliputi peristiwa yang timbul akibat perubahan, kompleksitas, atau gagal melihat kebutuhan untuk berubah. Contohnya, pengembangan produk baru yang gagal dan pangsa pasar yang tidak cukup besar. Risiko selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diduga/tidak diinginkan sehingga terdapat unsur ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu. Risiko memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
2. Ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Bentuk dari risiko bisa bermacam-macam, yakni sebagai berikut.

1. Berupa kerugian atas harta milik/kekayaan akibat kebakaran, pencurian, dan sebagainya.
2. Penderitaan seseorang misal sakit karena kecelakaan kerja.
3. Tanggung jawab hukum. Misalnya, risiko perbuatan atau peristiwa yang merugikan perusahaan karena kecurangan.
4. Kerugian akibat perubahan keadaan eksternal perusahaan seperti perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan nilai tukar dan sebagainya.

Risiko dalam bisnis selalu ada dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan manajemen risiko. Peranan manajemen risiko bagi perusahaan sangat penting dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan perubahan bisnis yang sangat cepat. Pada saat terjadi krisis finansial global tahun 2009-2010 yang lalu, bagi perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten dapat keluar dan terhindar dari dampak krisis. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menerapkan manajemen risiko mengalami dampak yang cukup berat bahkan masih berlanjut pascakrisis.

Hasil penelitian *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) terkait krisis finansial tahun 2009-2010 yang lalu dalam buku *Risk Management and Corporate Governance* (2014: 13) menyatakan bahwa:

> *As the 2009/2010 review noted, the financial crisis uncovered extremely deficient risk oversight and management practices even at highly sophisticated corporations. In many cases, risk was not managed on an enterprise wide basis and not adjusted to corporate strategy, as risk managers were often kept separate from management and not regarded as an essential part of implementing*

the company`s strategy. Moreover, boards were in a significant number of cases ignorant of the risk facing the company.

Since the beginning of the financial crisis, various survey have revealed that corporations developing their risk management and oversight practices still face challenges, such as linking risks to strategy; better defining risks, developing corporate responses to risks that manage to addres all five key dimensions (strategy, people, detail, task and drivers); effectively considering stakeholders and gatekeepers concerns; and addressing all these issues from a whole-enterprise perspective. These challenges are faced by both financial and non-financial companies.

Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/ perusahaan. Fungsi tersebut mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin/mengoordinasikan. dan meng-awasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. Program manajemen risiko meliputi tugas-tugas seperti mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur. atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko yang selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko, mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan risiko, serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Pengelolaan risiko meliputi langkah-langkah berikut.

1. Berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko.
2. Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur risiko, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat.
3. Berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi di antara peristiwa sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya.

4. Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah (metode) untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi).

Menurut sumber atau penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan dalam dua (2) hal berikut ini.

1. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kerusakan aset karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja dan sebagainya.
2. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya.

Penerapan manajemen risiko oleh manajemen perusahaan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati, dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan pengaruh terjadinya kerugian terutama kerugian secara finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Konsep manajemen risiko yang dibuat secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan OJK No 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan antara lain diatur sebagai berikut.

1. Konglomerasi keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan atau pengendalian, dan entitas utama adalah LJK induk dari konglomerasi keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan.
2. Manajemen risiko terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan secara terintegrasi.
3. Konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Entitas utama wajib mengintegrasikan penerapan manajemen risiko pada konglomerasi keuangan.

Peraturan OJK No.1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2013 mengenai penerapan manajemen risiko pada lembaga jasa keuangan nonbank antara lain diatur sebagai berikut.

1. Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LKJNB) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
2. Pasal 2, LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup:
   a. pengawasan aktif pada direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LJKNB,
   b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko,
   c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko,
   d. sistem informasi manajemen risiko, dan;
   e. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

1. Menilai Risiko Bisnis Klien

Auditor mempergunakan pemahaman atas bisnis dan industri untuk menilai risiko bisnis klien. Penilaian auditor atas risiko bisnis klien lebih banyak mempertimbangkan industri yang digeluti klien, strategi bisnis klien, dan pengendalian manajemen yang dapat mengurangi serta meminimalkan risiko seperti manajemen risiko yang efektif, pengendalian intern, dan tata kelola perusahaan.

Dalam melaksanakan penilaian risiko bisnis maka auditor lebih banyak menggunakan prosedur analitis. Prosedur analitis dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan dari perusahaan klien, dengan industri atau pesaing untuk mengindikasikan kinerja perusahaan. Prosedur analitis dapat dilakukan dengan mengidentifikasi penjelasan yang masuk akal, menyangkut fluktuasi yang tidak diharapkan dari pengetahuan tentang klien dan industri sebelum mengajukan pertanyaan kepada manajemen perusahaan klien, serta mengevaluasi penjelasan manajemen secara cermat termasuk mempertimbangkan bagaimana setiap penjelasan itu mempengaruhi semua saldo akun yang meragukan.

2. Menilai Risiko Audit yang Dapat Diterima

Menurut Arens dkk (2006:298) menyatakan bahwa risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran kesediaan auditor menerima pelaporan keuangan perusahaan klien, kemungkinan mengandung salah saji material setelah laporan auditor independen diterbitkan dengan opini wajar. Auditor sebaiknya memutuskan risiko audit yang dapat diterima secara tepat pada tahap perencanaan audit. Risiko audit dapat diterima berkaitan dengan risiko penugasan. Risiko ini merupakan risiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai walaupun audit sudah dilakukan secara benar dan berkualitas. Contohnya, jika klien mengumumkan pailit setelah audit maka kemungkinan diajukan gugatan hukum terhadap kantor akuntan

publik juga sangat besar.

Dalam situasi dimana auditor yakin bahwa peluang terjadinya kegagalan atau kerugian keuangan cukup tinggi atas perusahaan klien maka akan meningkatkan risiko penugasan. Jika timbul gugatan hukum di kemudian hari maka auditor lebih baik membela hasil auditnya berdasarkan bukti-bukti audit. Faktor-faktor yang memengaruhi penilaian risiko audit dapat diterima adalah (a) kemungkinan kegagalan keuangan perusahaan klien, (b) integritas manajemen dan (c) salah saji yang timbul akibat pelaporan keuangan terindikasi curang.

B. MODEL RISIKO AUDIT

Risiko audit adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh auditor ketika melaksanakan penugasan audit. Dengan kata lain, risiko audit adalah risiko yang terjadi apabila auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit biasanya dirumuskan sebagai berikut.

$$AR = IR + CR + DR$$

AR = *Audit Risk* atau Risiko Audit
IR = *Inheren Risk* atau Risiko Bawaan
CR = *Control Risk* atau Risiko Pengendalian
DR = *Detection Risk* atau Risiko Deteksi

Model risiko audit membantu auditor memutuskan seberapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan selama penugasan audit.

ISA 200.13 menjelaskan bahwa risiko salah saji material adalah risiko dimana laporan keuangan disalahsajikan secara material sebelum audit dilakukan. Risiko ini terdiri atas dua komponen berikut.

1. Risiko bawaan adalah kerentanan asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap salah saji yang dapat

bersifat material secara terpisah atau secara tergabung dengan salah saji lainnya sebelum memperhitungkan pengendalian terkait (atau pengendalian yang dimaksud untuk mengatasi atau memitigasi risiko bawaan).

2. Risiko pengendalian adalah risiko dimana salah saji dapat terjadi dalam asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan dan bisa bersifat material secara terpisah atau secara tergabung dengan salah saji lainnya, yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi pada waktunya oleh pengendalian intern entitas.

1. Menilai Risiko Inheren (Risiko Bawaan)

Risiko inheren atau bawaan adalah mengukur penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang disebabkan kekeliruan atau ketidakberesan yang material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian intern. Dalam hal ini, pengendalian intern diabaikan auditor untuk penetapan risiko inheren karena pengendalian intern diperhitungkan sebagai salah satu penetapan risiko pengendalian. Untuk menilai risiko inheren maka auditor biasanya menugaskan staf auditor yang berpengalaman di bidang industri klien dan melakukan *review* secara menyeluruh atas hasil pengujian audit. Penilaian atas risiko inheren atau bawaan dilakukan auditor selama tahap perencanaan, dan memperbarui penilaian risiko tersebut selama penugasan audit berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama audit. Auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan risiko inheren dan memodifikasi bukti audit dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut.

a. Sifat bisnis klien.
b. Hasil audit sebelumnya.
c. Penugasan awal versus penugasan berulang.
d. Pihak-pihak berelasi.

e. Kerangka pelaporan keuangan yang terindikasi curang.

f. Kerentanan pengelapan aset tetap perusahaan.

2. Menilai Risiko Pengendalian

Menilai risiko pengendalian adalah aktivitas yang dilakukan auditor mengenai apakah salah saji melebihi jumlah yang dapat ditoleransi akan dicegah, atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan. Penilaian risiko pengendalian dipengaruhi oleh pengendalian intern yang ada pada perusahaan klien, serta pengujian pengendalian yang dilakukan auditor atas pengendalian intern tersebut.

ISA 315.12 menyatakan bahwa auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern yang relevan dengan audit. Meski kebanyakan pengendalian intern yang relevan dengan audit biasanya berhubungan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah relevan dengan audit. Dengan kearifan profesional seorang auditor harus menilai apakah pengendalian intern relevan dengan auditnya. Faktor-faktor yang memengaruhi dan harus dipertimbangkan auditor dalam melakukan penilaian risiko pengendalian adalah (a) efektivitas pengendalian intern klien dan (b) rencana pengendalian intern klien.

3. Menilai Risiko Deteksi

Risiko deteksi biasanya berkaitan dengan kegagalan auditor mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat ditoleransi. Auditor dapat mengurangi risiko deteksi dengan cara mengumpulkan bukti audit dengan menggunakan prosedur analitis, dan melakukan pengujian substantif atas siklus transaksi dan detil saldo akun secara lebih mendalam. Contohnya, asumsikan bahwa auditor telah mengonfirmasi piutang usaha PT ABC dan berdasarkan salah saji yang ditemukan, menyimpulkan bahwa penilaian awal risiko pengendalian yang rendah

tidak tepat. Auditor harus merevisi estimasi risiko pengendalian ini dan berhati-hati mempertimbangkan dampak revisi ini, terhadap bukti tambahan yang diperlukan dalam siklus pendapatan. Hal ini harus dilakukan tanpa menghitung kembali risiko deteksi.

Risiko deteksi berhubungan langsung dengan risiko audit yang dapat diterima, serta banyaknya jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor. Salah satu cara yang biasanya ditempuh oleh auditor untuk meminimalkan risiko deteksi adalah menyusun sebuah program audit yang tepat dan sesuai dengan tujuan audit.

4. Menanggapi Risiko

Auditor menanggapi risiko dengan mengubah luas pengujian dan pemilihan prosedur audit serta memodifikasi bukti audit. Dalam menanggapi risiko, auditor juga dapat memilih anggota tim audit yang berpengalaman dan memiliki kualifikasi memadai dalam melakukan pekerjaan audit. Selain itu, menanggapi risiko dilakukan auditor dengan cara me-*review* hasil pekerjaan audit secara cermat dan saksama.

Auditor harus menilai risiko atau ketidakpastian yang ada pada perusahaan klien. Risiko yang ada pada klien biasanya sangat tergantung pada adanya efektivitas dari pengendalian intern perusahaan klien. **ISA 315.6** menyatakan bahwa prosedur penilaian risiko meliputi berikut ini.

a. Bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang menurut auditor mungkin mempunyai informasi, yang dapat membantu mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan.
b. Prosedur analitikal.
c. Pengamatan dan inspeksi .

5. Hubungan Risiko Audit dan Bukti Audit

Berikut hubungan risiko audit dengan bukti audit.

1. Semakin rendah tingkat risiko audit yang ingin dicapai maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan (berhubungan terbalik).
2. Semakin rendah tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian maka semakin sedikit jumlah bukti yang diperlukan (berhubungan langsung).

C. MATERIALITAS

Materialitas adalah besar salah saji yang sengaja dihilangkan dan salah saji itu mengandung informasi bagi pengguna laporan keuangan serta kemungkinan informasi tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomis dari pengguna laporan keuangan.

ISA 315.3 menyatakan:
"Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi, melalui pemahaman tentang entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internnya yang akan memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan tanggapan terhadap risiko salah saji material yang dinilai"

ISA 320 menyatakan:
"Tujuan auditor adalah menerapkan secara tepat konsep materialitas dalam merencanakan dan melaksanakan audit."

Penentuan besar materialitas sangatlah sulit karena jumlah salah saji tertentu mungkin material pada perusahaan tertentu, namun belum tentu jumlah tersebut dianggap material untuk perusahaan yang lain. Contohnya, salah saji sebesar Rp35 juta mungkin dianggap material untuk PT Besar Bersama yang hanya memiliki total aset sebesar Rp350 juta dan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp180 juta, namun salah saji

sebesar Rp35 juta tidak material untuk PT Maju Bersama yang memiliki total aset sebesar Rp950 juta dengan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp360 juta.

Standar akuntansi dan *auditing* tidak menyediakan pedoman khusus mengenai materialitas sehingga auditor harus mempergunakan kehati-hatian profesionalnya. Materialitas bersifat relatif bukan absolut. Auditor dalam menentukan besarnya materialitas pada perusahaan berorientasi laba biasanya mempergunakan laba bersih sebelum pajak, karena informasi ini sangat penting bagi pemakai atau pengguna laporan keuangan. Dasar lain yang dipergunakan oleh auditor dalam menentukan besarnya materialitas adalah total aset dan total penjualan serta ada tidaknya kecurangan (faktor kualitatif).

Menurut Arens dkk (2006:319) menyatakan bahwa materialitas dapat diterapkan dengan mempergunakan lima langkah berikut.

1. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas.
2. Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen (salah saji yang dapat ditoleransi).
3. Melakukan estimasi total salah saji segmen.
4. Mengestimasi salah saji gabungan.
5. Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas.

Dua langkah di atas merupakan tahap untuk merencanakan pengujian audit yang akan dilakukan, sementara tiga langkah terakhir adalah tahap melakukan evaluasi hasil audit yang berasal dari pelaksanaan pengujian audit. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas merupakan jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan mengandung salah saji, namun besarnya salah saji tersebut tidak memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Penetapan materialitas membutuhkan kearifan profesional dari auditor.

Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke salah saji yang dapat ditoleransi dilakukan dalam rangka pengumpulan bukti

per akun, bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Contohnya, saldo piutang sebesar Rp2.000.000 maka auditor harus mengumpulkan banyak bukti jika salah saji sebesar Rp100.000,- dianggap material ketimbang jika Rp200.000,- yang dianggap material.

Pada saat auditor mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan maka ada dua jenis salah saji yang dapat ditemukan dalam suatu akun yaitu: 1) salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Contohnya, ketika mengaudit kendaraan perusahaan dan auditor mungkin mengidentifikasi sebagai *capital lease* padahal seharusnya dibebankan sebagai *lease* operasi, (2) salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji yang berasal dari perbedaan pandangan antara auditor dengan manajemen atas estimasi saldo akun. Contohnya, perbedaan estimasi penyisihan untuk piutang tak tertagih. Salah saji yang mungkin juga berasal dari estimasi pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi saldo akun-akun pada laporan keuangan. Contohnya, auditor menemukan delapan salah saji yang dilakukan oleh klien dalam sampel yang terdiri dari 300 *item* sediaan atas akun sediaan. Auditor kemudian mempergunakan salah saji tersebut untuk mengestimasi total salah saji yang mungkin terdapat dalam sediaan.

Hubungan materalitas dan bukti audit adalah berikut ini

1. Semakin rendah tingkat materialitas maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan (berhubungan terbalik).
2. Semakin besar suatu saldo rekening maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan (berhubungan langsung).

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko?
2. Jelaskan berbagai macam risiko yang saudara ketahui?
3. Salah saji apa yang akan auditor temukan dalam suatu akun?
4. Faktor apa yang dipertimbangkan auditor untuk menilai risiko inheren dan risiko pengendalian?
5. Langkah-langkah apa yang akan auditor lakukan untuk menentukan besarnya materialitas?
6. Sebutkan prosedur audit untuk melakukan penilaian risiko?
7. Berikan contoh alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke salah saji yang dapat ditoleransi?
8. Bagaimana langkah-langkah melakukan pengelolaan risiko!
9. Jelaskan tentang konsep materialitas!
10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko deteksi!

Kasus

Bacalah setiap kondisi dibawah ini dengan cermat dan saksama!.

1. Perusahaan klien tidak memiliki cukup modal kerja untuk melanjutkan operasi perusahaan!
2. Auditor sudah melakukan beberapa identifikasi salah saji yang material pada penugasan audit tahun sebelumnya!
3. Berdasarkan skala usaha dan pangsa pasar maka produk yang dihasilkan perusahaan klien menguasai separuh dari industri yang ada!
4. Penyisihan piutang tak tertagih didasarkan pada asumsi yang dibuat oleh manajemen!
5. Rencana audit telah menghapuskan beberapa prosedur audit yang diperlukan dalam penugasan audit!

6. Klien tidak merekonsiliasi rekening bank dengan saldo kas yang tercatat!
7. Klien gagal mendeteksi pencurian sediaan dari gudang oleh karyawan karena akses memasuki gudang tidak dibatasi, dan klien tidak melakukan *stock opname* atas sediaan yang ada digudang.

Berdasarkan masing-masing kondisi di atas maka identifikasilah risiko-risiko yang kemungkinan ada!

Bab 5
KECURANGAN *(FRAUD)*

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu menjelaskan kecurangan (*fraud)* dalam audit dan mendeteksi *fraud*.

Cerita Pembuka

Dua orang laki-laki memasuki sebuah bank. Salah satunya mengenakan pakaian bisnis dan berpenampilan rapi. Satunya lagi memiliki rambut yang acak-acakan, memiliki tato di sepanjang lengan, memakai celana jeans yang sobek-sobek, dan menenteng helm. Didasarkan pada pengategorian yang barang kali tidak memiliki dasar dari kedua orang ini dalam masyarakat kita maka siapa yang memiliki potensi terbaik untuk menipu kasir bank?

Mayoritas masyarakat barangkali sepakat bahwa orang yang berpakaian seperti seorang pebisnis adalah orang yang berada posisi terbaik untuk melakukan kecurangan/pengelapan terhadap bank. Dia sekilas lebih bisa dipercaya meski pandangan yang klise. Kebanyakan orang setuju bahwa laki-laki dengan pakaian acak-acak menandakan orang tersebut tidak sukses sehingga tidak bisa dipercaya. Siapa yang berada pada posisi terbaik untuk "menipu" Anda saat ini? Ingat, selalu orang yang paling Anda "sangat percaya" yang berada pada posisi terbaik untuk menipu atau melakukan kecurangan terhadap Anda.

A. DEFINISI KECURANGAN (*FRAUD*)

Menurut W.Steve Albrecht dan Chad D.Albrect dalam buku mereka, *Fraud Examination*, 2002 makna *fraud* didefinisikan sebagai berikut.

> *"A generic term, embracing all multi various means which human ingenuity can device and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false representation no divinize and invariable rule can be laid down as general proposition in defining fraud, as it included surprise trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. Theory boundaries defining is those which limit human knavery"*.

Secara umum *fraud* mencakup beragam cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan *fraud* yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik, dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian di atas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.

Unsur-unsur *fraud* adalah sebagai berikut.

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi.
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Langsung dan atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Definisi kecurangan juga diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2001) yang menjelaskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 316, kecurangan akuntansi sebagai berikut.

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja, jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

***International Standards on Auditing* (ISA) 240.17** menyatakan bahwa auditor wajib menanyakan kepada manajemen mengenai berikut ini.

1. Penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan, termasuk tentang sifat, luas, dan berapa seringnya penilaian tersebut dilakukan.
2. Proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu, termasuk risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh manajemen atau yang dilaporkan kepada manajemen atau risiko kecurangan mungkin terjadi dalam jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan.
3. Komunikasi manajemen dengan *those charged with governance (TCWG)* mengenai proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu.
4. Komunikasi manajemen dengan karyawan jika ada tentang pandangan manajemen mengenai praktik-praktik bisnis dan perilaku etis.

B. BENTUK-BENTUK KECURANGAN *(FRAUD)*

Menurut *Examination Manual* 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiner* biasanya *fraud* dikelompokkan menjadi empat hal berikut.

1. Kecurangan laporan yang terdiri dari kecurangan laporan keuangan dan kecurangan laporan lainnya. Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari

sebenarnya dan lebih buruk dari sebenarnya. Laporan keuangan *over stated* dilakukan dengan melaporkan aset dan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan berikut.

a. Meninggikan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham karena nilainya naik.
b. Mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lainnya.
c. Menggambarkan rentabilitas atau memperoleh laba yang lebih baik.
d. Menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang atau kas.
e. Menghilangkan persepsi negatif pasar.

Cara-cara untuk mewujudkan jenis kecurangan di atas adalah dengan memasukkan dalam laporan keuangan berikut ini.

a. Penghasilan/pendapatan fiktif.
b. Penilaian akhir atas aset yang tidak tepat.
c. Menyembunyikan kewajiban.
d. Mencatat aset dan pasiva, serta pendapatan dan biaya pada periode akuntansi yang tidak tepat.
e. Menyembunyikan biaya dengan mengkapitalisasi biaya.
f. Pengungkapan laporan keuangan yang tidak tepat seperti tidak diungkapkannya kewajiban bersyarat atau kejadian-kejadian penting, yang berpengaruh negatif terhadap pos-pos laporan keuangan.

2. Penyalahgunaan aset yang terdiri dari kecurangan kas, serta kecurangan persediaan dan aset lainnya.
3. Korupsi yang terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuapan, hadiah tidak sah, dan pemerasan ekonomi.
4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer.

Pelaku tindak kecurangan adalah berikut ini.

1. Mempunyai kewenangan sebagai pengambil keputusan, yaitu orang yang memiliki akses ke informasi dan dapat akses ke aset.
2. Dapat dilakukan oleh manajer, karyawan, vendor, penanam modal, dan pelanggar.
3. Pelaku individu didorong oleh moral, motivasi tekanan, kesempatan, dan potensi.

Pendorong seseorang melakukan *fraud* adalah sebagai berikut.

1. Tekanan; berkaitan dengan tekanan keuangan maupun kebiasaan buruk lingkungan kerja.
2. Kesempatan; lemahnya pengendalian intern, lemahnya sanksi, dan kurangnya jejak audit.
3. Pembenaran; pelaku menganggap perbuatan tersebut adalah hal biasa dan pelaku merasa berjasa besar pada organisasinya.
4. Keserakahan; berkaitan dengan sifat yang melekat ada dalam diri seseorang yaitu sifat serakah.
5. Kebutuhan; berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya.
6. Akuntabilitas; berkaitan dengan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan diorganisasi.
7. Niat; berkaitan dengan kemauan seseorang untuk berbuat.
8. Monopoli; berkaitan dengan kekuasaan yang dipegang oleh seseorang.

Kecurangan berbeda dengan kesalahan yang tidak disengaja. Contohnya, seseorang tanpa sengaja memasukkan angka-angka yang salah pada laporan keuangan, apakah ini kecurangan? Jawabannya tidak. Hal ini bukan kecurangan karena kesalahan tersebut tidak dilakukan secara sengaja atau dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melebihi pihak lain melalui dalih yang salah. Akan tetapi, jika dalam situasi yang sama seseorang dengan sengaja memasukkan angka yang

salah pada laporan keuangan untuk mengelabui investor dan pemangku kepentingan lainnya maka ini kecurangan.

Secara umum kecurangan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaian tertentu. Tujuan dari tindakan ini adalah mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dalam mendefinisikan kecurangan yang meliputi tipu muslihat ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar. Kecurangan adalah penipuan yang menyertakan elemen-elemen berikut ini.

1. Sebuah representasi.
2. Mengenai sesuatu yang bersifat material.
3. Sesuatu yang tidak benar.
4. Secara sengaja atau serampangan dilakukan.
5. Dipercaya.
6. Ditindaklanjuti oleh korban.
7. Korban menanggung kerugian.

Jenis kecurangan dari sudut pandang pelaku kecurangan dalam perusahaan adalah berikut ini.

1. Kecurangan pegawai, yaitu pegawai yang menggunakan posisinya untuk mengambil atau mengalihkan aset yang dimiliki perusahaan. Jenis kecurangan yang sangat umum dilakukan.
2. Kecurangan pemasok, yaitu pemasok memberikan tagihan yang berlebihan atau menyediakan barang dengan kualitas rendah atau jumlah barang lebih sedikit dari yang disepakati.
3. Kecurangan pelanggan, yaitu pelanggan tidak membayar, membayar terlalu kecil, atau ingin mendapatkan lebih banyak dengan cara menipu.
4. Kecurangan manajemen, yaitu manajemen memanipulasi laporan keuangan untuk membuat perusahaan terlihat lebih baik daripada yang seharusnya. Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mahal.

5. Kecurangan lainnya, yaitu setiap kali ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kepercayaan orang lain, untuk menipu atau melakukan kecurangan terhadap orang tersebut.

C. TEORI-TEORI KECURANGAN *(FRAUD)*

Berikut beberapa teori mengenai kecurangan (*fraud*).

1. Teori C = N + K

Teori C = N + K ini sangat dikenal dalam kepolisian. Simbol C menyatakan *Criminal* (C) sama dengan Niat (K) dan Kesempatan (K). Teori ini sederhana dan gamblang karena meski ada niat melakukan *fraud*, namun jika tidak ada kesempatan maka fraud tidak akan terjadi.

2. Teori Segitiga *Fraud (Fraud Triangle Theory)*

Teori yang dikembangkan oleh Dr.Donald Cressy, salah satu pendiri *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dalam karyono (2013:8-10). Dalam teori segitiga *fraud* ini maka perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Unsur-unsur *fraud* diterangkan sebagai berikut.

a. Tekanan *(pressure)* adalah dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang (*fraud*) yang terjadi pada karyawan dan manajer. Penyebab dorongan ini antara lain disebabkan oleh berikut ini.
   1) Tekanan keuangan berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, keserakahan, dan kebutuhan tidak terduga.
   2) Kebiasaan buruk antara lain kecanduan narkoba, judi, dan *alcoholic.*
   3) Tekanan lingkungan kerja seperti kurang dihargai prestasi/ kinerja, gaji rendah, dan tidak puas dengan pekerjaan.
   4) Tekanan lain seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

b. Kesempatan yang timbul karena lemahnya sanksi, lemahnya pengendalian intern untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, serta ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Menurut Steve Albrecht (2002) ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan melakukan *fraud* antara lain berikut ini.
   1) Terbatasnya akses terhadap informasi.
   2) Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai.
   3) Kurangnya jejak audit.
c. Pembenaran adalah tindakan mencari alasan bahwa apa yang dilakukan benar dan biasa terjadi/lazim di masyarakat, yaitu sebagai berikut.
   1) Pelaku merasa berjasa besar terhadap perusahaan dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
   2) Pelaku menganggap bahwa tujuannya baik yaitu ingin mengatasi masalah, dan nanti akan dikembalikan.

3. Teori GONE *(GONE Theory)*

Teori ini dikemukan oleh Balogna (1995) dengan menggunakan unsur-unsur *fraud* sebagai berikut.

a. *Greed* atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam dirinya.
b. *Opportunity* atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
c. *Needs* atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar.
d. *Exposure* atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. *Greed* dan *need*

merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (faktor individu). *Opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi korban kecurangan (faktor generik). Dalam hal ini maka risiko terjadinya kecurangan bergantung pada kedudukan pelaku dengan objek kecurangan. Secara umum, manajemen perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan *fraud* daripada karyawan.

4. Teori *Fraud Diamond*

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1953). Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa :

> *"Many frauds, especially some of the multibillion-dollar ones, would not have occurred without the right person with the right capabilities in place. Opportunity opens the doorway to fraud, and incentive and rationalization can draw the person toward it. But the person must have the capability to recognize the open doorway as an opportunity and to take advantage of it by walking through, not just once, but time and time again. Accordingly, the critical question is; Who could turn an opportunity for fraud into reality?". Artinya adalah banyak fraud yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. Opportunity membuka peluang atau pintu masuk bagi fraud, pressure, dan rationalization yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Namun menurut Wolfe dan Hermanson (2004), orang yang melakukan fraud tersebut harus memiliki kapabilitas untuk menyadari pintu yang terbuka sebagai peluang emas dan untuk memanfaatkanya bukan hanya sekali namun berkali-kali.*

1. Mengenali Kondisi Berpotensi *Fraud*

Auditor harus dapat mengenali beberapa kondisi yang memiliki potensi timbulnya fraud. Ada dua hal yang perlu diperhatikan auditor terkait bukti audit yang berpotensi masalah, yaitu sebagai berikut.

a. Catatan Akuntansi yang Bermasalah

1) Transaksi tidak dicatat lengkap, akurat, dan tepat waktu.
2) Pencatatan tanpa bukti pendukung atau bukti yang tepat.
3) Penyesuaian dan koreksi yang banyak pada akhir penyusunan laporan keuangan.
4) Akses karyawan terhadap sistem yang tidak konsisten dengan tingkat aktivitas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan.

b. Bukti Pendukung Bermasalah

1) Bukti dokumen, berkas, dan file yang hilang.
2) Bukti yang sudah diubah dan yang ada hanya fotokopi.
3) Tanggapan yang berbeda-beda antara manajemen dengan karyawan atas pertanyaan yang diajukan auditor.

D. PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)

Kecurangan yang teridentifikasi dan terdeteksi ada dalam sebuah perusahaan dapat dicegah dengan berbagai cara sebagai berikut.

1. Mencegah Kecurangan dengan Menerapkan Manajemen Risiko

Seorang auditor dalam mendeteksi *fraud* seyogianya harus mengenali apa yang menyebabkan terjadinya *fraud*, dan bagaimana tindakan manajemen dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya risiko *fraud* atau kecurangan.

a. *System risk* yaitu kegagalan dari dukungan sistem.

b. *Human resources risk* adalah pegawai yang tidak kompeten atau tidak jujur.
c. *Processes risk* yaitu risiko karena proses yang terdiri dari (1) *operational control risk,* yaitu karena pelanggaran pengendalian intern mulai awal sampai dengan akhir, (2) *transaction risk* yaitu kesalahan dalam memproses transaksi, dan (3) *relationship risk* yaitu risiko tidak langsung akibat dari hubungan dengan risiko lainnya.

Setiap aktivitas organisasi akan selalu ada ketidakpastian yang identik dengan risiko sehingga manajemen harus bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan organisasi maka manajemen harus yakin bahwa proses pengelola risiko telah berjalan dengan baik. Proses pengelolaan manajemen risiko meliputi berikut ini.

a. Menetapkan konteks yang mencakup konteks strategis, konteks organisasi, konteks manajemen risiko, mengembangkan kriteria risiko, dan menetapkan struktur risiko.
b. Identifikasi risiko adalah tahapan untuk menggali dan menemukan risiko untuk dianalisis lebih lanjut tentang apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana terjadinya.
c. Menganalisis risiko ialah proses menentukan kemungkinan terjadinya dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul, kemudian mengukur tingkat signifikansi atau level risiko.
d. Mengevaluasi risiko yaitu proses pembandingan antara level risiko yang dihasilkan selama proses analisis, dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
e. Penilaian risiko adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka menangani risiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konsekuensi dari risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2. Mendeteksi *Fraud* dengan Mengidentifikasi Gejala *Fraud*

Menurut W.Steve Albrect (2002) menyebutkan bahwa ada enam jenis tanda-tanda *fraud*, yaitu sebagai berikut.

a. Keganjilan Akuntansi

Keganjilan akuntansi adalah tindakan rekayasa yang sengaja dilakukan oleh pelaku *fraud* sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya. Keganjilan akuntansi biasanya dilakukan melalui (1) ketidakberesan dokumen pendukung akuntansi seperti menghilangkan, merusak, serta mengubah dokumen pendukung aktivitas atau transaksi dimana pelaku melakukan kecurangan; (2) kesalahan penjurnalan antara lain berupa jurnal tanpa dokumen pendukung jurnal koreksi tanpa otoritas dan jurnal-jurnal yang banyak dibuat pada akhir periode akuntansi.

b. Kelemahan Pengendalian Intern

Pengendalian intern bertujuan sebagai alat yang dirancang untuk dapat mengamankan harta milik perusahaan. Kelemahan pengendalian intern berupa tidak diterapkannya kunci pengendalian seperti pemisahan fungsi, persetujuan transaksi yang layak, dokumentasi dan pencatatan yang layak, pengendalian fisik terhadap aset dan pencatatan, serta pengecekan independen dalam pelaksanaan tugas.

c. Penyimpangan Analisis

Tanda-tanda *fraud* dapat dilakukan dengan melakukan berbagai analisis berupa analisis vertikal, analisis horizontal, analisis rasio dan analisis remenden, serta teknik analisis lainnya. Contohnya, kenaikan penjualan 50% sementara harga pokok mengalami peningkatan sebesar 125%, namun tidak ada kenaikan harga yang

signifikan dari komponen pendukung harga pokok. Kondisi seperti ini ada kemungkinan terjadi penggelapan atau terjadi pembelian fiktif.

a. Analisis vertikal adalah analisis hubungan antar-*item* dalam laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas) tahun lalu dengan tahun sekarang yang digambarkan dalam persentase.
b. Analisis horizontal adalah analisis persentase perubahan *item* laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
c. Analisis rasio adalah perbandingan antar-*item* dalam laporan keuangan seperti rasio kas dan rasio lancar.
d. Analisis remenden adalah perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan baku.

d. Gaya Hidup Berlebihan

Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan *fraud*. Gaya hidup pelaku *fraud* akan mengalami perubahan seperti hidup konsumtif dan boros. Gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya *fraud* yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti.

e. Kelakukan Tidak Biasa

Kelakuan tidak biasa sebagai akibat rasa bersalah dan adanya rasa takut dapat terlihat antara lain gelisah atau tidak dapat santai karena selalu dihantui rasa bersalah dan takut, bila diajak bicara mengenai *fraud* biasanya defensif atau berargumen untuk mencari pembenaran atau alasan.

f. Pengaduan

Pengaduan adalah keluhan atas kegiatan atau pelayanan organisasi atau pegawai. Pengaduan belum tentu merupakan justifikasi bahwa *fraud* telah terjadi. Gejala *fraud* melalui pengaduan harus segera ditelaah lebih lanjut, diuji, dan dianalisis.

3. Mendeteksi *Fraud* dengan Identifikasi Bendera Merah *(Red Flags)*

Deteksi kecurangan *(fraud)* dapat juga dilakukan dengan melakukan identifikasi karakteristik tertentu yang merupakan peringatan dini *(red flags)*. Pelaku kecurangan biasanya dilakukan oleh manajemen dan tingkatan yang lebih rendah.

a. Fraud Dilakukan Manajemen Puncak

Tanda-tanda kecurangan oleh manajemen puncak antara lain adalah (1) manajemen cenderung untuk meraih keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Keberhasilan mereka berarti sukses finansial bukan karena profesional. (2) Cenderung memperlakukan orang sebagai objek bukan pribadi bahkan sering kali sebagai objek eksploitasi. (3) Sangat egois dan lebih banyak membual tentang prestasi dan keunggulan yang mereka raih secara licik daripada kegagalan mereka. (4) Tampak sembrono atau tidak hati-hati terhadap fakta-fakta dan sering membesar-besarkan. (5) Membeli hadiah-hadiah mahal untuk keluarganya, biasanya sebagai kompensasi karena jarang menyempatkan waktu untuk mereka. (6) Memusuhi orang-orang yang pendapatnya berlawanan. (7) Sering melakukan pergantian bawahan dan mengadu domba mereka. (8) Menuntut loyalitas mutlak dari bawahannya, tetapi mereka sendiri hanya loyal pada kepentingan pribadinya.

b. Fraud Dilakukan di Tingkat yang Lebih Rendah

Tanda-tanda *fraud* yang dilakukan oleh karyawan antara lain sebagai berikut.

1) Bonus-bonus bergantung pada tingkat kinerja jangka pendek dan tidak mempertimbangkan kenyataan keadaan ekonomi maupun persaingan yang terjadi. Akibatnya memicu rasa tidak puas yang memicu tindakan *fraud*.

2) Pengendalian intern tidak ada atau tidak dilaksanakan sehingga membuka peluang bagi karyawan untuk melakukan *fraud*.
3) Banyak sekali ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab di antara bawahan.
4) Karyawan yakin tingkat tanggung jawab yang ada melampaui uraian tugas yang sebenarnya.

c. Menilai dan Menanggapi Risiko Kecurangan

Sikap skeptisisme digunakan auditor ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang ada, untuk mempertimbangkan adanya risiko kecurangan dan menilai risiko kecurangan menyangkut hal-hal berikut.

1) Bagaimana dan di mana menurut keyakinan auditor atas laporan keuangan perusahaan klien kemungkinan mengandung salah saji material akibat kecurangan.
2) Bagimana manajemen dapat melakukan dan sekaligus menutupi pelaporan keuangan yang curang.
3) Bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aset perusahaan klien.

Apabila risiko salah saji yang material akibat kecurangan sudah terindentifikasi maka beberapa langkah yang auditor lakukan adalah sebagai berikut.

1) Auditor membahas temuan tersebut dengan manajemen dan meminta pandangan manajemen mengenai potensi kecurangan, serta pengendalian yang ada untuk mencegah dan mendeteksi salah saji.
2) Mengevaluasi rencana manajemen untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan, serta pengendalian yang dirancang untuk mengurangi risiko kecurangan.
3) Menyimpulkan apakah rencana dan pengendalian tersebut dapat mengurangi risiko salah saji akibat kecurangan.

Tanggapan auditor terhadap risiko salah saji akibat kecurangan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan.
2) Merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menanggapi risiko kecurangan. Contohnya, me-*review* jurnal penjualan untuk mencari aktivitas yang tidak biasa menjelang akhir periode dan me-*review* syarat-syarat penjualan.
3) Merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen perusahaan klien. Contohnya, melakukan *review* atas perubahan metode akuntansi yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mengetahui adanya bias pelaporan keuangan.

d. Tanggung Jawab Auditor Independen untuk Mendeteksi Fraud

Setiap auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi terjadinya *fraud*. Tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi *fraud* diatur dalam standar profesional akuntan publiknya. Dalam standar tersebut menyatakan bahwa tidak ada jaminan penuh bahwa hasil auditor independen akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan dan pelanggaran hukum, serta *fraud*. Standar tersebut hanya mengatur keharusan bagi auditor untuk menentukan risiko bahwa kekeliruan, ketidakberesan dan pelanggaran hukum yang mungkin menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material. Auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksian kekeliruan, ketidakberesan dan pelanggaran hukum telah dilakukan. Untuk memenuhi tanggung jawab pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan maka auditor harus menerapkan pola kesaksamaan dalam perencanaan dan penilaian hasil prosedur auditnya. Auditor harus menerapkan derajat skeptisme profesionalnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kekeliruan dan

ketidakberesan akan terdeteksi. Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan sikap waspada di sepanjang penugasan audit terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* maka auditor biasanya akan merumuskan W5H2 *(who, what, why, when, where, how, how much).*

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi pelanggaran hukum pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan. Jika ada indikasi unsur pelanggaran hukum yang mungkin menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan maka auditor berkewajiban melaksanakan prosedur audit yang dirancang secara khusus, untuk menyakinkan adanya pelanggaran hukum tersebut. Sehubungan dengan mendeteksi *fraud* maka auditor harus memiliki kemampuan untuk mengenali indikasi teknik penyimpangan dan memiliki pemahaman atas perkembangan metode dalam teknik pendeteksian *fraud.* Di samping itu, auditor yang dalam pelaksanaan auditnya terjadi *fraud* harus memandang masalah bukti dan pembuktian dari segi hukum. Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mendeteksi kemungkinan terjadi kekeliruan, ketidakwajaran, dan tindakan melawan hukum.

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kecurangan dan kecurangan akuntansi?
2. Jelaskan empat teori terkait *fraud*!
3. Jelaskan bentuk-bentuk dari *fraud*!
4. Jelaskan bagaimana mendeteksi *fraud* dengan menggunakan *red flags*!

5. Jelaskan bagaimana mencegah tindakan *fraud*!
6. Jelaskan bagaimana mendeteksi *fraud* dengan mengidentifikasi gejala *fraud*!
7. Sebutkan tanda-tanda *fraud* yang dilakukan oleh karyawan!
8. Sebutkan kondisi yang berpotensi terjadinya *fraud*!
9. Sebutkan elemen-elemen yang ada dalam sebuah *fraud*!
10. Jelaskan bagaimana tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan atau *fraud*!

Kasus

Saudara diminta untuk melakukan diskusi dengan kelompok belajar saudara mengenai kasus berikut ini.

Anda adalah peserta magang musim panas yang bekerja pada perusahaan besar. Setiap istirahat siang Anda makan siang bersama dengan teman magang kerja yang bernama Bobby. Suatu hari teman wanita dari Bobby ikut makan siang bersama. Ketika tagihan pembayaran diterima maka Bobby menggunakan kartu kredit perusahaan dan menuliskan makan siang tersebut sebagai beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Bobby dan teman wanitanya terus melakukan hal tersebut selama beberapa hari. Padahal memo terbaru dari perusahaan menyatakan bahwa makan siang rutin tidak termasuk beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ketika Anda menanyakan mengenai tagihan-tagihan makan siang tersebut maka Bobby menjawab ”*Hei, kita ini pekerja magang, memo tersebut tidak berlaku untuk kita. Jadi santai karena kita dapat membebankan apa pun yang kita mau*”. Dalam kasus tersebut apakah telah terjadi kecurangan terhadap perusahaan? Apa bentuk kecurangannya? Berilah argumennya!

Bab 6

STRATEGI AUDIT DAN PROGRAM AUDIT

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu melakukan perencanaan audit dan menyusun program audit secara benar.

Cerita Pembuka

Illiya seorang auditor yang sedang melakukan audit atas koperasi simpan pinjam. Koperasi ini melaksanakan pengendalian atas pemberian pinjaman, penagihan, dan ada tindak lanjut yang mendalam atas semua pinjaman yang beredar setiap minggunya. Illiya sudah merekomendasikan sistem komputer yang baru sejak dua tahun lalu, namun manajemen beranggapan biayanya terlalu mahal sementara tingkat profitabilitas perusahaan rendah. Penagihan terus mengalami masalah karena banyak pelanggan menghadapi permasalahan keuangan yang parah akibat kondisi ekonomi yang kurang baik. Piutang pinjaman sudah sangat membengkak dan penagihan lebih kecil dari normal. Melihat kondisi ini apa yang akan dilakukan Illiya untuk melaksanakan penugasan audit atas koperasi tersebut? Ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu menyusun rencana audit dan program audit sehingga mendukung pelaksanaan auditnya. Bab ini memberikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai perencanaan audit atau strategi audit menyeluruh atas audit laporan keuangan.

A. STRATEGI AUDIT

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit maka auditor berupaya untuk dapat menurunkan risiko audit pada tingkat rendah sehingga mampu mendukung opini audit atas kewajaran laporan keuangan. Strategi audit yang dipilih auditor akan menentukan banyaknya bukti audit dan materialitas yang ada dalam laporan keuangan. Ada dua strategi audit yang biasanya digunakan oleh auditor, yakni sebagai berikut.

1. *Primarily Substantif Approach*

Strategi audit ini lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit yang pertama kali daripada audit atas klien yang sama pada tahun sebelumnya. Ada beberapa langkah yang dilakukan auditor dalam pendekatan ini.

a. Memperoleh pemahaman pengendalian intern dan mendokumentasikan pengendalian intern yang ada pada perusahaan klien.
b. Menetapkan risiko pengendalian berdasarkan pengujian pengendalian yang dilakukan atas pengendalian intern perusahaan klien.
c. Melakukan penilaian terhadap risiko pengendalian yang telah ditetapkan untuk mendukung pengujian substantif yang direncanakan auditor.
d. Merancang pengujian substantif.

2. *Lower Assessed Level of Control Risk Approach*

Strategi audit ini lebih banyak digunakan untuk audit atas klien yang lama daripada audit pertama kali atas klien baru. Auditor lebih banyak melakukan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Dalam strategi audit ini auditor tetap melakukan pengujian substantif namun tidak mendalam. Ada beberapa langkah yang dilakukan auditor dalam pendekatan ini.

a. Memperoleh pemahaman industri dan usaha klien, serta pengendalian intern yang ada pada perusahaan klien.
b. Merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian dan dokumentasi pengendalian intern perusahaan klien
c. Menetapkan risiko pengendalian berdasarkan pengujian pengendalian.
d. Melakukan penilaian terhadap risiko pengendalian yang telah ditetapkan untuk mendukung pengujian substantif yang direncanakan auditor.
e. Merancang pengujian substantif. Pengujian pengendalian dapat dilakukan pada dua periode waktu berikut.
    1) Selama pelaksanaan pekerjaan *interim* setelah memperoleh pemahaman mengenai berbagai kebijakan dan struktur pengendalian intern perusahaan klien.
    2) Bersamaan dengan pelaksanaan prosedur audit untuk memperoleh pemahaman mengenai berbagai kebijakan dan struktur pengendalian intern yang relevan.

B. PENGUJIAN AUDIT

Dalam mengembangkan rencana audit maka auditor biasanya menggunakan dua jenis pengujian, untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material berdasarkan kerangka pelaporan keuangan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Pengujian audit itu meliputi berikut ini.

1. Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai efektivitas dari pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan klien. Pengujian pengendalian dilakukan untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian. Contohnya, pengujian pengendalian atas

efektivitas pelaksanaan proses persetujuan kredit. Prosedur audit yang biasa digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat pada pengujian pengendalian ini adalah sebagai berikut.

a. Meminta keterangan dari manajemen perusahaan pada karyawan yang tepat.
b. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan pendukung.
c. Mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian.

Jumlah bukti tambahan yang diperlukan dalam pengujian pengendalian tergantung pada dua hal berikut.

a. Luas bukti audit yang diperoleh dalam memahami pengendalian intern.
b. Pengurangan risiko pengendalian yang direncanakan.

2. Pengujian Substantif

Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung memengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Ada tiga jenis pengujian substantif, yakni sebagai berikut.

a. Pengujian substantif atas transaksi yaitu pengujian substantif yang digunakan untuk menentukan apakah tujuan audit atas asersi yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi. Misalnya, membukti apakah penjualan benar-benar terjadi dan ada per tanggal neraca (asersi keterjadian dan keberadaan), dan membuktikan apakah semua transaksi penjualan telah dicatat secara benar pada periode neraca (asersi kelengkapan).
b. Pengujian rincian saldo adalah pengujian substantif yang berfokus pada saldo akhir buku besar, baik akun laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Pengujian ini lebih ditekankan pada rincian saldo akun yang ada pada laporan posisi keuangan. Contohnya, konfirmasi saldo pelanggan menyangkut piutang usaha dan melaksanakan inspeksi berupa *stock opname* pada

sediaan. Auditor biasanya meminimalkan penggunaan pengujian rincian saldo karena membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya.

c. Prosedur analitis substantif adalah prosedur yang memperlihatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Standar *auditing* menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan jenis pengujian substantif apabila dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Prosedur ini relatif murah sehingga banyak auditor melaksanakan prosedur analitis pada semua audit. Kegunaan prosedur ini adalah (1) menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya, (2) mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan yang berdampak material pada laporan keuangan perusahaan klien, (3) menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan pengujian rincian saldo.

Pengujian pengendalian dapat dilakukan secara terpisah dengan pengujian substantif. Akan tetapi, pengujian pengendalian juga dapat dilakukan secara bersama dengan pengujian substantif untuk menghemat waktu dan biaya. Berikut disajikan perbedaan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif.

Tabel 6.1 Perbedaan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif

Keterangan	**Pengujian Pengendalian**	**Pengujian Substantif**
Kegunaan	Menentukan efektivitas rancangan, operasi, dan kebijakan dari pengendalian intern perusahaan klien.	Menentukan kewajaran asersi laporan keuangan yang signifikan.
Sifat pengukuran	Frekuensi penyimpangan dari kebijakan pengendalian intern perusahaan klien.	Kesalahan moneter dalam transaksi dan saldo.

Keterangan	Pengujian Pengendalian	Pengujian Substantif
Prosedur audit yang digunakan	Bertanya (*inquiry*), pengamatan (observasi) dan inspeksi.	Bertanya *(inquiry),* pengamatan (observasi), inspeksi, menghitung, konfirmasi, analisis, kalkulasi dan rekonsiliasi, serta penelusuran (*tracing)* dan pengusutan (*vouching).*
Saat atau waktu	Lebih banyak dilakukan selama pekerjaan *interim.*	Lebih sering dilakukan pada saat mendekati atau saat tanggal neraca.
Komponen risiko audit	Risiko pengendalian.	Risiko deteksi.
Strategi audit	*Lower assessed level of control risk approach.*	*Primarily substantif approach.*

C. PROGRAM AUDIT

Program audit biasanya disusun dalam tahap perencanaan audit dan direvisi sepanjang pekerjaan lapangan dilakukan. Program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif biasanya berisi bagian deskriptif dokumentasi pemahaman atas pengendalian intern yang diperoleh selama pelaksanaan penilaian risiko. Program audit juga biasanya menyertakan tujuan audit dan prosedur audit yang digunakan dalam pelaksanaan penugasan audit. Auditor dalam menyusun dan memodifikasi program audit biasanya mempertimbangkan aspek materialitas, risiko inheren atau risiko bawaan, risiko pengendalian, bukti audit dan risiko kecurangan, serta kebutuhan audit dari perusahaan. Berikut disajikan contoh program audit untuk persediaan.

Tabel 6.2 Program Audit

KAP ALMIRA DAN REKAN

Nama Akun Persediaan: ..... Tahun Buku .....
Nama Klien: ..... Jenis Audit: .....

No	Uraian	Pelaksanaan Audit	
		Tgl & Jam	Catatan
	Program Audit (Prosedur Audit) Tujuan Pemeriksaan Untuk menentukan: 1. Semua persediaan baik yang ada di dalam gudang perusahaan maupun yang ada dalam perjalanan, ataupun yang ada di tempat pihak ketiga sebagai barang konsinyasi (*consignment out*) benar-benar ada secara fisik pada tanggal neraca dan dimiliki oleh perusahaan. 2. Pencatatan persediaan telah dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan/ SAK (perpetual/*physical* dan *cut off*). 3. Penilaian atas persediaan telah dilakukan dengan benar dan tepat (LIFO, FIFO, *Average*). Catatan: LIFO tidak diperkenankan oleh pajak. 4. Persediaan barang yang dihapus-kan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima, terutama oleh pihak pajak. 5. Persediaan yang menjadi jaminan hutang diungkapkan secara jelas da-lam Catatan atas Laporan Keuangan.		

No	Uraian	Pelaksanaan Audit	
		Tgl & Jam	Catatan
	Program Pemeriksaan (Prosedur) Observasi Atas Perhitungan Fisik		
1.	Meminta keterangan dari perusahaan tentang lokasi penyimpanan persediaan.		
2.	Baca pedoman penghitungan fisik persediaan barang yang dibuat oleh perusahaan.		
3.	Yakinkan dari petunjuk tersebut dan dalam kunjungan ke lokasi bahwa: a. Persediaan telah disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan perhitungan. b. Barang yang bukan milik perusahaan telah dipisahkan. c. Pengawasan atas pengguanan "*inventory tag*" berada di bawah tanggung jawab bagian gudang dan akuntansi (apabila perusahaan menggunakan *inventory tag*). d. Pergerakan persediaan selama perhitungan masih dapat dikendalikan (dikontrol).		
4.	Minta daftar persediaan barang dan tentukan jenis barang yang akan dihitung.		
5.	Sebelum penghitungan dilakukan, kunjungi bagian penerimaan dan pengeluaran barang. Dapatkan data pisah batas (*cut-off*) secara terperinci untuk dibandingkan dengan catatan yang terdapat pada bagian gudang dan akuntansi. Pemeriksaan ini meliputi:		

No	Uraian	Pelaksanaan Audit	
		Tgl & Jam	Catatan
	a. Tanggal *cut-off* dilakukan. b. Nomor terakhir dari seluruh dokumen penerimaan dan pengeluaran barang, misalnya: 1) Bukti penerimaan barang. 2) Surat jalan/surat pengeluaran barang. 3) Bukti pengambilan barang dan sebagainya.		
6.	Lakukan observasi perhitungan fisik dan yakinkan bahwa "pedoman penghitungan barang" telah dilaksanakan perusahaan dengan baik.		
7.	Pilih beberapa jenis persediaan barang utama dan lakukan penghitungan (opname) secara independen. Perhitungan secara independen harus dilakukan sebanyak ….% dari observasi penghitungan fisik persediaan sehingga prosedur ini dapat dilakukan bersamaan dengan prosedur pada butir 6. Buat berita acara opname persediaan.		
8.	Dalam menghitung *(opname)* persediaan: a. Semua persediaan telah dihitung. b. Tidak ada barang yang dihitung lebih dari satu kali (hal ini dapat diperiksa dari *inventory tag* atau daftar yang telah ditandai/ditulis).		

No	Uraian	Pelaksanaan Audit	
		Tgl & Jam	Catatan
	c. Semua persediaan barang yang ada di gudang perusahaan, tapi merupakan milik pihak ketiga telah dimintakan konfirmasi dari pemiliknya dan telah dipisahkan dari persediaan milik perusahaan.		
9.	Hasil penghitungan persediaan harus dibandingkan dengan pencatatan persediaan di gudang dan dibagikan akuntansi segera setelah penghitungan persediaan selesai dilakukan. Prosedur ini dilakukan minimal …% dari keseluruhan jumlah persediaan, sesuai dengan hasil evaluasi pengendalian intern.		
10.	Buat memo mengenai efektivitas prosedur penghitungan barang. Memo ini meliputi: a. Apakah instruksi atau pedoman penghitungan telah dijalankan. b. Ketepatan dan kebenaran penghitungan oleh pegawai perusahaan. c. Keadaan fisik dari lokasi persediaan, misalnya mengenai pengaturan barangnya, rapi/tidaknya pengaturan tersebut, dan sebagainya. d. Efektif atau tidaknya prosedur pisah batas (*cut-off*). e. Usulan untuk pengamatan penghitungan fisik persediaan di tahun yang akan datang.		

No	Uraian		Pelaksanaan Audit	
			Tgl & Jam	Catatan
Dibuat oleh :		Di-*review* oleh:	Auditor:	Indeks:
Nama & Paraf:		Nama & Paraf :		
Tanggal :		Tanggal :		

Nama Klien: ..... Jenis Audit: .....

Latihan Soal

Jawab pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi audit!
2. Jelaskan jenis pengujian audit!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan program audit!
4. Sebutkan perbedaan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif!
5. Jelaskan jenis-jenis pengujian substantif!
6. Jelaskan dua strategi audit yang dapat dipilih oleh auditor dalam penugasan auditnya!
7. Bagaimana langkah untuk melakukan observasi perhitungan fisik atas sediaan!
8. Sebutkan kegunaan prosedur analitis pada pengujian substantif!
9. Berikan contoh pengujian rincian saldo!
10. Apa yang menentukan jumlah bukti tambahan pada pengujian pengendalian!

Kasus

Bacalah dengan cermat dan jawablah sesuai dengan instruksi!

Yossy seorang auditor dari KAP Giri telah mengidentifikasi dua pengendalian intern dalam siklus penjualan dan penagihan. Dalam pengendalian yang pertama, komputer telah memverifikasi penjualan

yang dilakukan secara kredit dan tidak diperkenankan melebihi batas kredit pelanggan. Data ini sudah dibuatkan *database* dalam file induk piutang usaha. Dalam pengendalian yang kedua maka bagian penagihan mencocokkan *bill of lading*, faktur penjualan, dan pesanan pelanggan sebelum mencatatnya dalam jurnal penjualan.

Diminta: bagaimana cara auditor melakukan pengujian pengendalian atas kondisi di atas!

Bab 7
AUDIT SIKLUS PENDAPATAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu melakukan audit atas siklus pendapatan secara tepat dan benar.

Cerita Pembuka

Pegawai bagian penjualan PT Maju Bersaudara telah membuat faktur dengan jumlah yang benar Rp9.200.000,- atas nama PT Subur Makmur. Akan tetapi, faktur tersebut telah dijurnal dan dibukukan ke rekening pembantu piutang dengan jumlah Rp6.200.000,-. PT Subur Makmur telah membayar sebesar Rp6.200.000,- sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan piutang bulanan yang diterima dari PT Maju Bersaudara.

Kondisi di atas dapat membuat penjualan PT Maju Bersaudara tercatat lebih rendah dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Dampak kekeliruan dalam pencatatan mengakibatkan adanya salah saji material atas asersi kelengkapan pencatatan penjualan dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penjualan adalah urat nadi untuk menentukan besarnya aliran uang yang ada di perusahaan. Auditor harus menyadari hal ini. Pemahaman yang komprehensif mengenai bisnis dan usaha klien membantu auditor untuk memilih prosedur audit yang tepat dalam pelaksanaan auditnya.

A. TRANSAKSI SIKLUS PENDAPATAN

Kebanyakan perusahaan menganggap bahwa siklus pendapatan sangat penting, tetapi praktik bisnis dan pemicu ekonomisnya sangat berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaaan lainnya. Pada siklus ini maka auditor harus memahami bagaimana pengakuan dan kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan diartikan sebagai suatu arus masuk atau penambahan atas aset suatu entitas atau penyelesaian *liabilities* (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari suatu perusahaan. Pengakuan pendapatan adalah pada saat 1) kontrak penjualan telah disepakati, 2) saat penjualan 3) selama proses produksi secara bertahap, 4) saat produksi selesai, dan 5) saat kas diterima. Hal ini mengacu pada kriteria pengakuan pendapatan, yaitu 1) telah terealisasi atau cukup pasti terealisasi, dan 2) telah terbentuk.

Banyaknya aktivitas dalam siklus pendapatan biasanya menimbulkan risiko bawaan yang tinggi untuk berbagai asersi signifikan dalam laporan keuangan. Auditor harus mampu mengidentifikasi dan mengenali transaksi-transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan antara lain berikut ini.

1. Penjualan baik tunai maupun kredit.
2. Penerimaan tunai atau kas.
3. Retur penjualan dan potongan penjualan karena penjualan “cacat”.
4. Penghapusbukuan piutang yang tidak tertagih.
5. Taksiran atas piutang ragu-ragu.

B. TUJUAN AUDIT SIKLUS PENDAPATAN

Tujuan audit siklus pendapatan adalah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, atas asersi-asersi signifikan sebagai dasar memadai untuk melaporkan hasil audit. Tujuan audit pada siklus ini meliputi berikut ini.

1. Transaksi-transaksi yang dicatat adalah barang atau jasa yang telah diberikan selama periode akuntansi bersangkutan, transaksi penerimaan kas adalah sejumlah kas yang diterima pada periode yang diperiksa (asersi keberadaan dan keterjadian).
2. Semua penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian atas penjualan yang dilakukan selama periode diperiksa telah dicatat (asersi kelengkapan).
3. Perusahaan memiliki hak atas piutang dan kas yang berasal dari transaksi-transaksi siklus pendapatan (asersi hak dan kewajiban).
4. Semua penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan sudah dinilai sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), dijurnal dan dibukukan ke buku besar secara benar (asersi penilaian dan alokasi).
5. Detail penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan telah diklasifikasikan, disajikan dan diungkapkan secara benar dalam laporan keuangan (asersi penyajian dan pengungkapan).

C. MEMAHAMI PENGENDALIAN INTERN ATAS SIKLUS PENDAPATAN

Audit siklus pendapatan memaksa auditor untuk memahami, serta mengevaluasi atas efektivitas pengendalian intern perusahaan klien. Pendapatan memiliki volume transaksi cukup tinggi pada perusahaan. Pendapatan bisa juga meningkatkan piutang usaha yang dapat memengaruhi kas dan aliran kas dari operasi. Akibatnya, siklus pendapatan adalah salah satu siklus yang sangat rentan menimbulkan *fraud.*

Banyak perusahaan berusaha untuk memiliki pengendalian intern yang kuat pada siklus pendapatan untuk mencegah atau mendeteksi kemungkinan terjadinya salah saji. Pengendalian intern yang diimplementasikan secara efektif dalam siklus pendapatan akan

meminimalkan risiko bawaan dan pengendalian yang signifikan. Jika auditor memperkirakan pengendalian intern cukup efektif pada siklus pendapatan maka auditor akan menerapkan pendekatan tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah demikian sebaliknya. Beberapa pengendalian intern yang diterapkan perusahaan terkait dengan siklus pendapatan adalah sebagai berikut.

1. Pemisahan tugas antara orang yang memberi otorisasi transaksi terkait siklus pendapatan dengan orang yang menangani dan mencatat transaksi tersebut.
2. Pada penjualan kredit maka hanya bagian kredit yang bisa menambahkan nama pembeli baru ke dalam file induk pelanggan, dan apabila menggunakan komputer maka komputer akan mencocokkan nama pembeli dalam *order* penjualan dengan file induk pelanggan. Pengendalian intern ini dilakukan untuk mendeteksi potensial salah saji bahwa penjualan dilakukan tanpa persetujuan bagian kredit.
3. Pada saat pencatatan faktur penjualan maka pengiriman laporan bulanan harus rutin dilakukan kepada para pelanggan, disertai dengan tindak lanjut apabila ada keberatan dari pelanggan. Apabila menggunakan alat bantu komputer maka komputer akan mengecek kebenaran penjumlahan saldo awal piutang pada saat penjualan dengan saldo akhir piutang. Hal ini untuk mendeteksi kemungkinan salah saji potensial kekeliruan pencatatan faktur penjualan, atau faktur penjualan tidak dijurnal atau tidak dibukukan ke rekening pelanggan.
4. Pada saat pengiriman barang maka petugas gudang melakukan pengecekkan atas kecocokan barang dan *order* penjualan yang telah disetujui. Apabila menggunakan komputer maka komputer dapat mencocokkan dokumen pengiriman bernomor urut tercetak dengan *order* penjualan yang telah disetujui untuk setiap

pengiriman. Hal ini untuk mendeteksi bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

5. Pada transaksi penjualan tunai maka aktivitas pengendalian yang dilakukan adalah menggunakan register kas atau peralatan elektronik, dalam mencatat penjualan tunai dan melakukan pengawasan periodik atas prosedur penjualan tunai. Hal ini untuk mendeteksi kemungkinan penjualan tunai tidak tercatat.
6. Pada penerimaan kas maka aktivitas pengendalian yang dilakukan antara lain manajemen secara harian memonitor penerimaan kas, kewajaran jumlah dan jumlah yang dikreditkan ke piutang usaha, serta tindak lanjut atas piutang yang sudah lewat jatuh tempo. Hal ini untuk mendeteksi kemungkinan kas dan piutang yang timbul dari transaksi penjualan tidak tercatat atau mungkin dibukukan ke dalam rekening yang salah.
7. Perusahaan menggunakan memo kredit yang telah disetujui untuk setiap pengkreditan yang diakibatkan oleh *return*, dan menggunakan memo persetujuan penghapusan untuk menghapus rekening piutang yang dinyatakan sudah tidak dapat ditagih lagi. Hal ini untuk mendeteksi kemungkinan salah saji pendapatan akibat adanya *return* barang yang rusak.

D. PENGUJIAN AUDIT SIKLUS PENDAPATAN

Dalam audit siklus pendapatan maka auditor akan melaksanakan setidaknya dua pengujian, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian adalah cara auditor untuk menentukan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan perusahaan klien. Pengujian pengendalian sangat tergantung pada strategi audit yang dipilih auditor. Dengan melakukan pengujian pengendalian maka auditor dapat mengungkapkan kelemahan pengendalian intern perusahaan klien. Prosedur audit yang digunakan untuk pengujian

pengendalian atas siklus pendapatan antara lain pengajuan pertanyaan *(inquiry)*, observasi, dan inspeksi atas dokumen. Contohnya, pengujian atas bagian kredit terkait ada atau tidaknya pemberian kredit yang tidak melalui persetujuan kredit atau penjualan kredit, tanpa persetujuan pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas penjualan secara kredit.

Pengujian substantif adalah pengujian yang dilakukan auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi asersi, detail transaksi, dan detail saldo transaksi. Pengujian subtantif digunakan untuk mengungkap kemungkinan besarnya salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan. Contohnya, dalam memeriksa piutang usaha dan rekening cadangan kerugian piutang yaitu dengan melakukan penelusuran saldo awal tahun, yang diperiksa ke saldo akhir per audit dalam kertas kerja tahun lalu (jika tahun lalu diaudit). Kemudian auditor harus memeriksa buku besar piutang dan cadangan kerugian piutang dengan memusatkan pada pendebetan dan pengkreditan. Auditor dalam hal ini juga melakukan penelusuran terhadap jurnal untuk faktur penjualan yang diterbitkan. Prosedur audit yang biasanya digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan detail saldo adalah konfirmasi, analitis, penelusuran, dan sebagainya.

E. PROSEDUR AUDIT DALAM SIKLUS PENDAPATAN

Auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit harus mengumpulkan bukti terkait dengan siklus pendapatan. Bukti audit diperoleh melalui prosedur audit yang dilakukan. Berikut beberapa prosedur audit yang dapat digunakan pada audit siklus pendapatan.

1. Konfirmasi

Auditor harus menentukan jenis informasi yang akan dimintakan konfirmasinya melalui pemilihan pihak yang tepat, alamat yang benar,

dan berisi informasi kepada siapa (nama auditor/KAP) dan di mana (alamat KAP) jawaban konfirmasi secara langsung harus diberikan. Beberapa bentuk konfirmasi yaitu sebagai berikut.

a. Konfirmasi positif adalah suatu permohonan yang akan dijawab secara langsung oleh pihak yang dimintakan konfirmasinya kepada auditor, dengan menyatakan apakah ia setuju atau tidak setuju dengan informasi dalam permohonan tersebut atau dengan memberikan informasi yang diminta.
b. Konfirmasi negatif adalah suatu permohonan yang akan dijawab secara langsung oleh pihak yang dikonfirmasi kepada auditor, hanya apabila ia tidak setuju dengan konfirmasi dalam permohonan tersebut. Auditor diwajibkan tidak menggunakan konfirmasi negatif sebagai satu-satunya prosedur audit pada pengujian subtantif, untuk menanggapi risiko salah saji material yang dinilai pada tingkat detail saldo. Auditor dapat mengandalkan bukti audit dari konfirmasi negatif apabila auditor menilai risiko salah saji rendah, dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai efektivitas pengendalian intern perusahaan klien atas asersi yang diuji.
c. Tidak ada jawaban konfirmasi, yaitu kegagalan pihak yang di-konfirmasi untuk menjawab permohonan konfirmasi karena alamat tidak dikenal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor ketika melakukan prosedur konfirmasi adalah sebagai berikut.

a. Menentukan jumlah, nama, dan alamat konfirmasi cocok dengan data pelanggan.
b. Menggunakan amplop jawaban konfirmasi yang sudah disediakan dengan alamat tercetak tertuju kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).
c. Mewajibkan pengiriman jawaban langsung kepada auditor.

Ketika auditor melaksanakan prosedur konfirmasi terkadang ada penolakkan dari pihak manajemen perusahaan. Jika hal ini terjadi maka auditor wajib melakukan beberapa hal ini.

a. Menanyakan alasan penolakan manajemen dan mencari bukti audit mengenai kelayakan penolakan tersebut.
b. Melakukan evaluasi atas dampak penolakan manajemen terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji material termasuk *fraud* yang kemungkinan ada.
c. Melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh audit yang relevan dan andal.

2. Bertanya (*Inquiry*)

Bertanya adalah cara auditor mencari informasi mengenai masalah keuangan ataupun nonkeuangan dari perusahaan klien. Bertanya bisa berbentuk mengajukan pertanyaan secara formal tertulis atau informal tertulis maupun secara lisan. Tanggapan dari manajemen atas pertanyaan auditor dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki auditor, atau mendukung bukti audit yang sudah ada, atau tanggapan dapat memberikan informasi yang berbeda secara signifikan dari informasi lain yang sudah diperoleh auditor.

3. Prosedur Analitis

Prosedur analitis adalah evaluasi atas informasi keuangan dengan menganalisis relevansi hubungan antara data keuangan dan nonkeuangan. Prosedur ini memerlukan pemahaman bisnis dan usaha yang digeluti perusahaan klien. Prosedur ini efektif dalam mengidentifikasi salah saji potensial laporan keuangan berkaitan dengan siklus pendapatan. Dalam melaksanakan prosedur analitis ini auditor harus memperoleh pemahaman tentang total pendapatan beserta kapasitas klien dan pasar klien untuk produk yang dijual. Kapasitas klien adalah volume penjualan maksimal yang mampu dicapai dengan menggunakan

seluruh fasilitas dan tenaga kerja yang dimiliki. Auditor harus sensitif terhadap volume penjualan dan membandingkannya dengan kapasitas yang digunakan, jumlah jam kerja, dan pengaruh kondisi lingkungan terhadap usaha klien. Misalnya, pendapatan dihubungkan dengan aset pabrik untuk perusahaan yang melakukan proses produksi padat modal, kecenderungan perkembangan laba kotor dibandingkan dengan kecenderungan perkembangan pangsa pasar, perbandingan piutang usaha dengan piutang usaha yang dianggarkan dalam anggaran kas perusahaan, dan biaya kerugian piutang dibandingkan dengan penjualan kredit bersih.

4. Penelusuran dan Pengusutan Atas Dokumen

Auditor harus menelusuri kebenaran atas transaksi siklus pendapatan melalui dokumen terkait. Penelusuran atas pendebetan rekening piutang dengan dokumen pendukung seperti faktur penjualan, dokumen pengiriman, dan *order* penjualan. Mencocokkan pengkreditan ke rekening piutang dengan pembayaran, otorisasi atas *return*, atau penghapusan piutang.

5. Melakukan *Cut off*

Auditor biasanya melakukan *cut off* tanggal atas transaksi siklus pendapatan terutama terkait penerimaan kas akibat transaksi penjualan tunai ataupun kredit. Dalam hal ini, auditor memastikan bahwa semua penerimaan yang terjadi pada akhir tahun buku telah dimasukkan sebagai kas di tangan atau sebagai setoran dalam perjalanan. Selain itu, tidak ada penerimaan kas yang terjadi setelah akhir tahun yang dimasukkan sebagai kas per tanggal neraca atau melakukan *review* atas ikhtisar kas harian, slip setoran, dan laporan bank yang mencakup periode beberapa hari sebelum dan sesudah akhir tahun agar dapat dilakukan pisah batas secara tepat. Sementara untuk transaksi penjualan

maka auditor harus memastikan bahwa tanggal laporan penerimaan barang atau jasa dan *return* penjualan telah dicatat pada periode yang tepat. Auditor juga memeriksa apakah volume *return* penjualan sesudah akhir tahun memberi petunjuk adanya pengiriman tanpa otorisasi yang dilakukan sebelum akhir tahun.

Auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit harus mengenali beberapa kondisi yang kemungkinan besar berdampak pada salah saji material pada laporan keuangan. Berikut beberapa kondisi yang dapat menimbulkan timbulnya salah saji potensial pada siklus pendapatan.

a. Kode produk atau jasa yang tidak benar.
b. *Order* yang melebihi batas kredit pelanggan tertentu.
c. Transaksi pengiriman barang dengan jumlah berbeda dari jumlah yang tercantum dalam *order* penjualan.
d. *Order* pada jenis barang yang tidak ada (habis) dalam persediaan.
e. Harga, nomor penjual, atau informasi lain dalam faktur penjualan yang tidak sesuai dengan informasi dalam *order* penjualan dan sebagainya.

F. BUKTI AUDIT ATAS SIKLUS PENDAPATAN

Auditor dalam melaksanakan tugas audit harus mengumpulkan bukti secara cukup dan tepat. Berikut beberapa bukti audit terkait dengan siklus pendapatan antara lain.

1. Pengantar Pembayaran

Dokumen yang dikirimkan kepada pembeli bersama-sama dengan faktur penjualan, untuk dikembalikan kepada penjual sebagai pengantar pembayaran yang menunjukkan nama pembeli dan nomor rekeningnya, nomor faktur, dan jumlah yang harus dibayar.

2. Daftar Perhitungan Kas

Dokumen ini berisi daftar kas dan cek yang ada dalam register kas.

3. Ikhtisar Kas Harian

Laporan yang berisi total penerimaan kas melalui kasir.

4. Slip Setoran ke Bank

Slip ini diperoleh pada saat melakukan penyetoran uang ke bank dan distempel atau validasi oleh bank.

5. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal yang merinci penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan piutang.

6. *Order* Penjualan

Dokumen ini berisi keterangan, kuantitas, dan informasi lain sesuai dengan *order* dari pembeli.

7. Faktur Penjualan

Dokumen ini berisi keterangan atau hal-hal yang berkaitan dengan suatu penjualan seperti jumlah yang harus dibayar pembeli, termin, dan tanggal penjualan.

8. Daftar Harga

Suatu daftar atau file induk komputer yang berisi harga resmi yang ditetapkan untuk semua barang yang ditawarkan perusahaan.

9. Jurnal Penjualan

Jurnal yang berisi daftar semua transaksi penjualan yang telah dilaksanakan.

10. File Induk Pelanggan

Dokumen yang berisi informasi pengiriman dan penagihan ke masing-masing pelanggan, serta batas kredit masing-masing pelanggan.

11. Memo Kredit Retur Penjualan

Dokumen yang berisi persetujuan return penjualan dan laporan penerimaan barang sebagai bukti barang benar-benar dikembalikan.

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Mengapa auditor harus memahami pengendalian intern atas siklus pendapatan?
2. Hal apa saja yang perlu menjadi perhatian auditor dalam melakukan konfirmasi?
3. Bagaimana cara auditor melakukan prosedur analitis?
4. Jelaskan tujuan audit pada siklus audit pendapatan!
5. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang prosedur konfirmasi!
6. Jelaskan bukti audit yang kemungkinan diperoleh auditor dalam audit siklus pendapatan?
7. Kondisi yang bagaimana yang menimbulkan kemungkinan salah saji potensial pada audit siklus pendapatan?
8. Apa yang akan dilakukan auditor ketika manajemen perusahaan menolak dilakukannya prosedur konfirmasi?
9. Jelaskan pengujian audit yang dilakukan atas siklus pendapatan!
10. Jelaskan karakteristik dari pendapatan!

Kasus

Pahami kondisi di bawah ini untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan instruksi!

KAP Ghazi dan rekan telah menerima perikatan audit laporan keuangan atas PT Samudera Biru yang bergerak dibidang pengecer berbagai jenis peralatan rumah tangga. Perusahaan telah beroperasi selama lima tahun dan baru pertama kali dilakukan audit. Total aset yang dimiliki perusahaan sebesar Rp385 juta dengan 12 karyawan.

Perusahaan telah mengalami pertumbuhan laba selama beberapa tahun terakhir dengan rata-rata penjualan sebesar Rp63 juta per bulan. Perusahaan sedang melakukan inventarisasi atas *item* sediaan dan aset tetapnya. Semua penjualan atas peralatan rumah tangga dilakukan secara tunai atau menggunakan cek. Kasa di bagian penerimaan kas dilengkapi dengan register kas untuk mengolah transaksi-transaksi tersebut. Perusahaan tidak melayani penjualan secara kredit.

Diminta:

1. Buatlah daftar pertanyaan untuk "penerimaan kas" yang akan digunakan untuk menilai pengendalian intern di PT Samudera Biru!
2. Salah saji apa yang kemungkinan ada dari kondisi di atas!

Bab 8
AUDIT SIKLUS PENGELUARAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu melakukan audit atas siklus pengeluaran secara tepat dan benar.

Cerita Pembuka

KAP Airish dan rekan sedang mengaudit perusahaan PT Damai Sejahtera untuk tahun buku 2013. PT Damai Sejahtera bergerak di jasa perhotelan. PT Damai Sejahtera memiliki sekitar enam puluh kamar dengan berbagai tarif kamar seperti *deluxe*, *sapphire*, dan *exclusive*. Perusahaan ini merupakan hotel bintang dua dengan jumlah karyawan sekitar seratus sepuluh karyawan termasuk manajemen hotel. Perusahaan juga menyediakan restauran, *laundry*, ruang pertemuan yang disewakan, dan *travel agent* untuk pengunjung setia yang menginap. Perusahaan harus melaksanakan pemeliharaan hotel terutama fasilitas penunjang dan berbagai perlengkapan hotel lainnya yang setiap bulan menghabiskan sekitar Rp87.000.000,-. Biaya gaji karyawan yang mencapai sekitar Rp250.000.000,- dan biaya promosi sebesar Rp90.000.000,- serta biaya listrik dan telepon yang mengalami peningkatan sekitar 3 persen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran ini cukup membebani perusahaan karena dalam kurun waktu sekitar dua tahun telah mengalami penurunan

tingkat hunian dan kunjungan hotel. Akibatnya, dalam tahun berjalan aliran kas perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perusahaan telah berusaha mengantisipasi dengan memangkas berbagai biaya terutama efisiensi jumlah karyawan untuk memotong biaya gaji karyawan, serta menghimbau pemakaian listrik yang hemat. Pada tahun berjalan perusahaan telah merumahkan sekitar 20 karyawannya.

Kondisi di atas mengambarkan pentingnya siklus pengeluaran bagi perusahaan. Auditor harus memahami betul siklus pengeluaran karena siklus ini memengaruhi aliran uang dan likuiditas perusahaan klien.

A. TRANSAKSI SIKLUS PENGELUARAN

Auditor dalam melaksanakan audit atas siklus pengeluaran harus memahami transaksi-transaksi yang berkaitan dengan siklus pengeluaran. Sifat transaksi siklus pengeluaran adalah 1) aktivitas pembelian barang dan jasa, 2) melakukan pembayaran yaitu transaksi pengeluaran kas. Transaksi pada siklus pengeluaran terdiri dari berikut ini.

1. Pembelian barang dan jasa.
2. Potongan dan *return* pembelian.
3. Pembelian aset tetap.
4. Persediaan.
5. Utang dagang.
6. Pembayaran macam-macam biaya seperti biaya gaji, biaya promosi, dan sebagainya.
7. Kas dan setara kas.

Manajemen perusahaan membuat asersi implisit dan eksplisit tentang transaksi dan saldo siklus pengeluaran dalam laporan keuangan. Memahami transaksi, sifat, dan karakteristik siklus pengeluaran akan memudahkan auditor merencanakan dan melaksanakan audit atas siklus pengeluaran.

B. TUJUAN AUDIT AUDIT SIKLUS PENGELUARAN

Audit siklus pengeluaran memiliki tujuan untuk membuktikan asersi-asersi sebagai berikut.

1. Pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan dilakukan selama periode pemeriksaan dan pembelian barang, jasa, serta aset benar-benar terjadi dan ada selama periode tersebut (asersi keterjadian dan keberadaan).
2. Semua pengeluaran kas dan pembelian yang terjadi selama periode yang diperiksa telah dicatat (asersi kelengkapan).
3. Utang dagang adalah kewajiban perusahaan per tanggal neraca (asersi hak dan kewajiban).
4. Transaksi pembelian dan pengeluaran kas telah dinilai sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), dijurnal, diringkas dan dibukukan secara benar (asersi penilaian dan pengalokasian).
5. Pembelian dan pengeluaran kas telah diklasifikan dan disajikan, serta diungkapkan secara benar dalam laporan keuangan (asersi penyajian dan pengungkapan).

Auditor harus mampu membuktikan asersi atas siklus pengeluaran dengan memperoleh bukti audit dan tepat. Kemampuan auditor untuk merancang penugasan audit dan melakukan pemilihan prosedur audit yang tepat adalah hal terpenting dalam pengumpulan bukti audit.

C. MEMAHAMI BISNIS KLIEN DAN PENGENDALIAN INTERN

Pemahaman mengenai pemicu ekonomi dalam siklus audit pengeluaran begitu penting, karena pengeluaran yang besar merupakan penyumbang terhambatnya aliran kas perusahaan. Auditor harus memahami faktor pemicu pengeluaran untuk berbagai jenis usaha (perusahaan dagang,

jasa, dan manufaktur). Contohnya, supermarket biru yang melakukan aktivitas membeli dan menjual kembali berbagai macam produk makanan, minuman, sayuran, peralatan rumah tangga, buku tulis, dan sebagainya. Secara individu harga barang yang dijual tidak mahal, namun secara keseluruhan harga pokok penjualan bisa menunjukkan angka yang signifikan. Perusahaan biasanya melakukan pembelian barang secara kredit dengan memanfaatkan termin dari pemasok, kemudian menjual kembali barang dagangan kepada pembeli secara eceran ataupun grosir. Pengeluaran kas pada perusahaan ini cenderung sering walaupun secara individu jumlahnya tidak signifikan. Laba yang diperoleh perusahaan berasal dari penjualan barang dengan harga yang kompetitif. Pada kondisi ini auditor biasanya menghubungkan antara saldo utang dagang dengan sediaan barang dagangan.

Pengendalian intern adalah cara yang dilakukan manajemen untuk melakukan efisiensi dan efektivitas atas operasional perusahaan terkait dengan siklus pengeluaran. Auditor harus memperoleh pemahaman pengendalian intern yang memadai atas siklus pengeluaran karena siklus ini rentan dengan kecurangan. Dalam hal ini, auditor dapat menguji efektivitas pengendalian manajemen dengan me-*review* anggaran dan transaksi yang dibebankan kepadanya.

Auditor harus memahami pengendalian intern yang dilakukan perusahaan sebagai berikut.

1. Pengendalian intern atas pembelian sediaan barang dagangan dilakukan untuk mencegah terjadinya sediaan yang berlebihan, dengan berbagai alasan seperti barang rusak, tidak terjual, dan sudah ketinggalan model. Pengendalian yang dilakukan juga mencegah terjadinya pembelian tanpa otorisasi atau persetujuan termasuk pembelian fiktif.
2. Pengendalian atas penerimaan barang yang dipesan. Pengendalian ini memastikan bahwa penerimaan barang sesuai dengan barang

yang dipesan, harga sesuai pesanan, diterima pada waktunya, dan sebagainya.

3. Pengendalian atas fisik sediaan barang dengan memahami kebijakan manajemen untuk melakukan *stock opname*. Pengendalian ini memastikan bahwa sediaan secara fisik dan catatan tidak ada perbedaan, serta antisipasi terjadinya pencurian atas sediaan.
4. Pengendalian atas fisik kas dengan melakukan *cash count* secara mendadak. Pengendalian ini memastikan bahwa fisik kas dan catatan atas kas tidak mengalami perbedaan yang berdampak material atas laporan keuangan perusahaan.
5. Pengendalian atas pengadaan aset pada tahun berjalan termasuk ketaatan terhadap pengadaan, serta kesesuaian harga pasar dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembelian dan kebijakan akuntansi.
6. Pengendalian atas utang usaha yang tercatat dengan jumlah yang salah. Pengendalian yang dilakukan adalah mengecek informasi dalam *voucher* tentang nama pemasok, jenis barang, jumlah barang, dan jumlah rupiah dengan *order* pembelian yang telah diotorisasi, serta laporan penerimaan barang dan jasa. Tujuan atas pengendalian ini adalah memastikan bahwa utang usaha tidak berdampak material terhadap laporan keuangan perusahaan.

ISA 330.8 menyatakan bahwa auditor wajib merancang dan melaksanakan uji pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai berfungsinya pengendalian yang relevan jika:

1. penilaian auditor mengenai risiko salah saji yang material pada tingkat asersi meliputi ekspektasi bahwa pengendalian berfungsi secara efektif (artinya auditor bermaksud menggunakan pengendalian yang efektif itu untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur substantif), atau;

2. prosedur substantif saja tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi.

D. PENGUJIAN AUDIT SIKLUS PENGELUARAN

Sama seperti pengujian pada audit siklus pendapatan maka untuk melakukan pengujian atas audit siklus pengeluaran juga terdapat dua pengujian, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian biasanya dilakukan bersamaan dengan memperoleh pemahaman industri klien, ataupun secara berulang pada saat melakukan pekerjaan lapangan audit. Beberapa prosedur audit yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian pengendalian atas siklus pengeluaran adalah me-*review* pengalaman di masa lalu dengan klien, mengajukan pertanyaan *(inquiry)*, observasi, dan inspeksi atas dokumen-dokumen. Contohnya, auditor mengajukan pertanyaan atas prosedur yang dijalankan perusahaan untuk *order* pembelian.

Pengujian substantif adalah pengujian yang dilakukan auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi asersi, detail transaksi, dan detail saldo transaksi. Pengujian subtantif digunakan untuk mengungkap kemungkinan besarnya salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan. Beberapa prosedur audit yang umumnya dipakai oleh auditor adalah analitis, rekonsiliasi dan kalkulasi, penelusuran dan pengusutan, dan sebagainya.

E. PROSEDUR AUDIT SIKLUS PENGELUARAN

Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Prosedur audit yang digunakan sangat tergantung pada pengujian audit. Ada dua macam pengujian audit yang dilakukan auditor terkait siklus pengeluaran, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selain dua pengujian tersebut auditor juga melakukan pisah batas *(cut off)* atas transaksi siklus

pengeluaran kas, karena transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun sangat penting untuk penyajian kas dan utang usaha yang benar pada tanggal neraca.

Auditor dalam melakukan pengujian pengendalian umumnya memakai prosedur audit wawancara, pengamatan, dan inspeksi atas dokumen terkait. Sebagai contoh, audit atas biaya gaji karyawan biasanya memperhatikan hal-hal berikut.

1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap jumlah karyawan untuk masing-masing bagian atau divisi kerja.
2. Komponen sistem penggajian seperti gaji pokok dan berbagai tunjangan.
3. Sistem rekrutmen untuk meminimalkan terjadinya karyawan fiktif.

Pengujian substantif digunakan untuk membuktikan besarnya saldo dan detail transaksi pada siklus pengeluaran. Auditor pada pengujian ini lebih banyak menggunakan prosedur analitis, konfirmasi, inspeksi atas aset dan penelusuran, serta pengusutan. Berikut disajikan beberapa langkah yang dilakukan auditor terkait penerapan prosedur audit atas siklus pengeluaran kas.

1. Prosedur penelusuran dan pengusutan atas utang usaha. Langkah yang dilakukan auditor adalah sebagai berikut.
   a. Telusuri saldo awal utang usaha ke laporan keuangan tahun sebelumnya.
   b. *Review* kegiatan dalam rekening buku besar utang usaha dan selidiki semua ayat jurnal yang dibukukan ke rekening tersebut.
   c. Dapatkan daftar utang usaha per tanggal neraca dan periksa apakah cocok dengan catatan akuntansi yang mendasarinya, dengan cara jumlahkan daftar utang usaha dan cocokkan jumlah tersebut dengan total faktur yang belum terbayar, cocokkan juga ke buku pembantu utang usaha.

2. Prosedur penelusuran dan pengusutan atas utang usaha tidak tercatat. Auditor dapat melakukan beberapa langkah berikut ini.
   a. Periksa pembayaran utang usaha antara tanggal neraca dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan audit. Apabila dokumen bersangkutan menunjukkan bahwa pembayaran tersebut untuk utang usaha tanggal neraca maka telusuri ke daftar utang usaha.
   b. Periksa dokumen pendukung utang usaha yang dicatat pada akhir tahun yang masih belum dibayar sampai dengan akhir pekerjaan lapangan.
   c. Selidiki *order* pembelian yang belum lengkap bukti pendukung lainnya, seperti laporan penerimaan barang dan faktur dari penjual pada akhir tahun.
3. Prosedur konfirmasi atas utang usaha dilakukan auditor dengan langkah sebagai berikut.
   a. Meminta daftar pemasok kepada manajemen perusahaan.
   b. Identifikasi pemasok-pemasok besar dengan me-*review* buku pembantu utang usaha.
   c. Mengirimkan surat konfirmasi kepada para pemasok.
   d. Lakukan perhitungan kembali atas jumlah utang usaha yang berbeda berdasarkan hasil konfirmasi.
4. Prosedur analitis dilakukan auditor dengan langkah-langkah sebagai berikut.
   a. Tentukan taksiran utang usaha dengan menggunakan pemahaman atas aktivitas dan lingkungan bisnis klien, termin perdagangan normal, dan riwayat kecepatan perputaran utang usaha.
   b. Hitunglah rasio perputaran utang usaha.
   c. Analisis hasil perhitungan rasio dengan membandingkan taksiran berdasarkan pengalaman masa lalu, data industri, jumlah menurut anggaran, dan sebagainya.

d. Bandingkan biaya dengan tahun sebelumnya atau jumlah menurut anggaran, untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kurang saji karena ada utang usaha tidak tercatat.

5. Melakukan pisah batas *(cut off)* atas pengeluaran kas dilakukan dengan langkah sebagai berikut.
   a. Observasi nomor cek terakhir yang diterbitkan dan dikirimkan pada hari terakhir periode audit, dan telusuri ke catatan akuntansi untuk memeriksa ketelitian pisah batas.
   b. Telusuri tanggal-tanggal pencatatan cek untuk semua cek yang tercantum dalam laporan bank pisah batas.

Auditor dalam mengaudit siklus pengeluaran harus mengenali beberapa kondisi yang kemungkinan besar berpotensi salah saji material sebagai berikut.

1. Pembelian barang/jasa yang tidak diotorisasi sah oleh pejabat berwenang.
2. Pembelian aset tetap yang diselewengkan.
3. Pembayaran faktur dari penjual yang sebenarnya sudah dibayar namun tidak dilakukan.
4. Informasi dalam faktur dari penjual tidak sesuai dengan informasi penerimaan.
5. Periode akuntansi penerimaan barang berbeda dengan periode pencatatan transaksi.
6. Dan sebagainya.

F. BUKTI AUDIT SIKLUS PENGELUARAN

Bukti audit harus dikumpulkan oleh auditor untuk memberikan keyakinan memadai dalam melaporkan hasil audit. Berikut beberapa bukti audit yang didapatkan auditor selama penugasan audit siklus pengeluaran kas.

1. Permintaan Pembelian

Permintaan tertulis untuk barang dan jasa dari departemen yang berwenang.

2. *Order* Pembelian

Permintaan tertulis dari departemen pembelian kepada penjual atau pemasok untuk membeli barang atau jasa seperti tertera dalam formulir *order* pembelian.

3. Faktur Pembelian

Tagihan dari pemasok mengenai jenis barang yang dibeli atau jasa yang diterima, jumlah yang harus dibayar, termin, dan tanggal pembayaran.

4. File Transaksi Pembelian

File komputer yang berisi tentang data pembelian yang telah disetujui. File ini digunakan untuk mencetak *voucher* dan memutakhirkan utang dagang, sediaan, dan file buku besar.

5. Daftar Gaji

Formulir berisi penjelasan mengenai jumlah gaji, serta tunjangan yang diperoleh masing-masing karyawan berdasarkan tugas dan wewenangnya.

6. Daftar Aset

Formulir yang berisi aset-aset yang dimiliki perusahaan, harga perolehan, taksiran umur ekonomis, status kepemilikan, serta termin jika dibeli secara kredit.

7. File Transaksi Pengeluaran Kas

File yang berisi informasi tentang pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan cek kepada pemasok atau pihak lainnya. File ini digunakan untuk melakukan pencatatan ke utang usaha.

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Mengapa auditor harus memahami pengendalian intern atas siklus pengeluaran?
2. Bagaimana cara auditor melakukan prosedur analitis?
3. Jelaskan tujuan audit pada audit siklus pengeluaran!
4. Bagaimana cara auditor melakukan prosedur konfirmasi!
5. Jelaskan bukti audit yang kemungkinan diperoleh auditor dalam audit siklus pengeluaran?
6. Kondisi bagaimana yang menimbulkan kemungkinan salah saji potensial pada audit siklus pengeluaran?
7. Bagaimana cara auditor melakukan *cut off* atas audit siklus pengeluaran?
8. Jelaskan pengujian audit yang dilakukan atas siklus pengeluaran!
9. Bagaimana cara auditor mengetahui adanya utang usaha tidak tercatat?
10. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan atas audit gaji pegawai/ karyawan?

Kasus

Pahami kasus audit di bawah ini dan jawablah sesuai instruksi!

PT ABC bergerak di bidang perakitan alat rumah tangga. PT ABC memiliki lima gudang produksi dan sepuluh gerai toko. Pada masing-masing cabang gerai perusahaan telah menempatkan seorang bagian pembukuan untuk mencatat uang masuk dan keluar. Bagian pembukuan PT ABC di gerai kelima telah bekerja diperusahaan selama tiga tahun. Ia bertugas melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas. Karena kemampuannya melebihi yang lain maka atasan mempercayainya untuk sekaligus melakukan penyusunan laporan keuangan untuk semua gerai toko. Kemudian laporan keuangan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan dari gudang produksi oleh

seorang *controller* keuangan. Bagian pembukuan gerai kelima juga telah melakukan rekonsiliasi bank selama bekerja di perusahaan. Di tahun keempat, bagian pembukuan ini berhenti bekerja dan tidak ada seorang pun yang menggantikan. Pada penutupan buku 31 Desember tahun ke empat, atasannya menemukan adanya selisih antara saldo menurut bank dan pembukuan perusahaan sebesar Rp35 juta dan menduga selisihnya kemungkinan melebihi dari angka tersebut. Atasan berpikir dan memutuskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT ABC.

Diminta:

1. Dengan kondisi di atas apakah saudara sebagai auditor akan menerima penugasan audit atas PT ABC? Berikan argumen saudara!
2. Prosedur audit apa yang akan saudara lakukan untuk memperoleh bukti bahwa telah terjadi selisih saldo kas dibank dan perusahaan!
3. Bagaimana saudara membuat sebuah rancangan atas uji pengendalian dari kasus di atas!
4. Prosedur audit apa yang akan auditor lakukan untuk melakukan pengujian pengendalian! Berikan argumennya!

Bab 9
AUDIT SIKLUS PENDANAAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan audit atas siklus pendanaan secara baik dan benar.

Cerita Pembuka

KAP Indira sedang melakukan audit atas laporan keuangan PT Artomoro untuk tahun buku 2010. PT Artomoro adalah perusahaan makanan cepat saji yang memiliki 15 gerai. PT Artomoro sendiri sudah menjalankan usahanya sekitar 4 tahun. Selama tahun pemeriksaan tersebut diketahui bahwa PT Artomoro telah mengambil kredit jangka panjang dari Bank Gembira dan menandatangani kontrak kredit yang menyebutkan bahwa 1) kredit dijamin dengan aset berupa sebidang tanah dan bangunan tempat usaha, 2) PT Artomoro harus menjaga rasio utang terhadap ekuitas tidak lebih dari dua berbanding satu, 3) PT Artomoro harus membayar angsuran setiap tanggal 3 setiap bulannya yang dimulai pada 1 Juni 2010. Dalam tahun yang sama PT Artomoro juga mengambil pinjaman jangka pendek kepada lembaga keuangan nonbank hanya beberapa waktu sebelum akhir tahun untuk membiayai operasional perusahaan dan persiapan membuka gerai ke-16.

Kondisi di atas mengharuskan KAP indira membuat perencanaan auditnya terkait pengujian substantif atas saldo utang dari PT Artomoro.

Jika auditor gagal melakukan pemeriksaan atas utang perusahaan maka akan berpengaruh pada pemberian opini audit. Sikap kehati-hatian dan skeptisme harus senantiasa dijaga auditor ketika melakukan audit atas siklus pendanaan.

A. SIKLUS PENDANAAN

Siklus pendanaan adalah siklus tentang pengadaan dana untuk keperluan kegiatan operasional dan investasi. Perusahaan biasanya memiliki alternatif pendanaan dengan melakukan 1) kredit bank atau lembaga keuangan lain, 2) penerbitan obligasi, dan 3) penerbitan saham (baik saham biasa maupun saham preferen).

Penerbitan obligasi dan saham biasa umumnya dipilih oleh perusahaan untuk memupuk dana. Siklus pendanaan bersinggungan dengan siklus pengeluaran pada saat pembayaran bunga, pelunasan obligasi, dan pembayaran deviden kas. Karakteristik utang wesel, utang hipotek, dan utang obligasi hampir sama, yaitu 1) ada perjanjian yang disertai dengan bunga atas dasar kesepakatan bersama, 2) memerlukan persetujuan dari puncak manajemen yaitu dewan komisaris, dan 3) ada jaminan berupa aset tetap.

Perusahaan umumnya hanya memiliki sedikit transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang, tetapi jumlah saldo per transaksi sering kali sangat signifikan. Apabila ada satu transaksi utang yang tidak tercatat maka kemungkinan akan berdampak salah saji material. Auditor juga menekankan pada pengungkapan atas transaksi yang terdapat dalam siklus ini, terutama jika ada transaksi utang jangka panjang yang melibatkan pihak berelasi seperti utang antara perusahaan induk-anak, terjadi gagal bayar bunga dan pokok pinjaman.

Siklus transaksi pendanaan meliputi beberapa hal berikut.

1. Transaksi utang jangka panjang ke bank atau lembaga keuangan lain, serta penggunaan aset tetap sebagai jaminan utang.

2. Transaksi angsuran periodik dan pembayaran bunga utang jangka panjang.
3. Transaksi penyesuaian beban/utang bunga pada akhir periode akuntansi.
4. Transaksi pelunasan utang jangka panjang.
5. Transaksi utang *leasing*.
6. Transaksi angsuran periodik utang *leasing*.
7. Transaksi penyesuaian beban/utang bunga atas utang *leasing* pada akhir periode akuntansi.
8. Transaksi utang obligasi.
9. Transaksi pembayaran bunga obligasi.
10. Transaksi penyesuaian beban/utang bunga obligasi pada akhir periode akuntansi.
11. Transaksi pelunasan utang obligasi.
12. Transaksi penjualan saham preferen dan saham biasa secara tunai, dengan diskonto (disagio saham) atau dengan premium (agio saham).
13. Transaksi penarikan kembali saham sebagai saham *treasury*.

B. TUJUAN AUDIT SIKLUS PENDANAAN

Dalam melakukan audit atas laporan keuangan maka auditor memiliki dua tujuan, yaitu memberikan opini audit dan membuktikan asersi dari manajemen perusahaan.

ISA 315 mendefinisikan asersi sebagai berikut:

> *"Asersi adalah representasi oleh manajemen baik secara eksplisit (dalam bentuk pernyataan) maupun implisit (tersirat) yang terkandung dalam laporan keuangan. Representasi ini digunakan oleh auditor untuk memerhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan yang mungkin terjadi".*

Secara spesifik tujuan audit adalah membuktikan asersi manajemen yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. **Eksistensi atau keterjadian**, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akun transaksi pendanaan per tanggal neraca adalah benar-benar ada, dan transaksi yang memengaruhi saldo akun adalah benar-benar terjadi. Artinya, saldo utang jangka panjang dalam pembukuan mencerminkan utang yang ada pada tanggal neraca, serta saldo ekuitas pemegang saham mencerminkan hak pemilik yang ada pada tanggal neraca.
2. **Kelengkapan**, yaitu memastikan bahwa seluruh transaksi yang memengaruhi akun-akun pendanaan dilaporkan dan dicatat secara lengkap. Artinya, saldo utang jangka panjang dalam pembukuan mencerminkan utang kepada kreditur per tanggal neraca, serta saldo ekuitas pemegang saham mencerminkan hak pemilik telah lengkap tercatat per tanggal neraca.
3. **Hak dan kewajiban**, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akun yang berhubungan dengan transaksi pendanaan adalah benar-benar kewajiban perusahaan per tanggal neraca. Artinya, saldo utang jangka panjang mencerminkan utang kepada kreditur per tanggal neraca, serta saldo ekuitas pemegang saham mencerminkan hak pemilik telah lengkap tercatat per tanggal neraca.
4. **Penilaian atau alokasi**, yaitu memastikan bahwa saldo akun yang berhubungan dengan transaksi pendanaan diukur dan diklasifikasi dengan tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Artinya, saldo utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham telah dinilai dengan tepat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
5. **Penyajian dan pengungkapan**, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akun transaksi pendanaan diidentifikasi, dikelompokkan, disajikan, dan diungkap secara penuh sesuai dengan prinsip

akuntansi keuangan yang berterima umum. Artinya, saldo utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam laporan keuangan. Syarat, komitmen, dan kewajiban yang berkaitan dengan utang jangka panjang telah diungkapkan secara memadai.

Tujuan audit di atas harus disesuaikan dengan keadaan klien yang diaudit. Auditor harus menggunakan perencanaan audit dan prosedur audit yang sesuai untuk dapat mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan. Prosedur audit memastikan auditor mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Sementara perencanaan audit memberikan arahan bagi auditor tentang pengujian audit yang akan dilakukan, berapa jumlah sampelnya, dan ketepatan atas prosedur audit yang dipergunakan.

C. MEMAHAMI BISNIS KLIEN DAN PENGENDALIAN INTERN

Bisnis klien harus dipahami oleh auditor ketika melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan klien, karena bisnis memiliki karakteristik yang unik dan berbeda antara satu dengan lainnya. Pengetahuan tentang bidang usaha sangat penting untuk memperkirakan gambaran laporan keuangan pada masing-masing bidang usaha. Contohnya, apabila perusahaan bermaksud melakukan perluasan usaha seperti pembukaan gerai toko baru maka harus dipertimbangkan bagaimana perusahaan klien mendanai perluasan usaha tersebut.

Perusahaan perhotelan umumnya memiliki aset tetap bersih yang mencerminkan hampir 75% dari total asetnya. Perusahaan perhotelan merupakan usaha jasa yang produk utamanya adalah penyewaan properti jangka pendek. Aset berupa perlengkapan dan piutang hanya bagian kecil dari total aset, sementara aset berupa properti merupakan bagian terbesar dari total aset perusahaan. Properti umumnya dibelanjai

dari utang atau pinjaman jangka panjang. Usaha perhotelan memiliki proporsi investasi dalam aset tetap yang tinggi sehingga menimbulkan biaya tetap yang tinggi pula. Profitabilitas sangat tergantung pada besarnya tingkat hunian sehingga strategi promosi penjualan sangat diperlukan untuk menjaring konsumen.

Uraian di atas adalah beberapa contoh bagaimana auditor memahami usaha bisnis klien. Pemahaman yang cukup komprehensif untuk memahami usaha atau bisnis klien adalah dengan melakukan *review* atas pengendalian intern yang dijalankan perusahaan klien. Pengendalian intern adalah cara yang dilakukan manajemen untuk melakukan efisiensi dan efektivitas atas operasional perusahaan terkait dengan siklus pendanaan. Pemahaman auditor tentang komponen-komponen pengendalian intern diperoleh melalui *review* atas pengalaman audit tahun sebelumnya (apabila klien yang diperiksa masih sama dengan klien untuk penugasan tahun sebelumnya), mengajukan pertanyaan kepada manajemen perusahaan, melakukan observasi atas aktivitas dan keadaan perusahaan klien, serta melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan.

Siklus pendanaan memerlukan pengendalian dan tanggung jawab atas transaksi yang biasanya dibebankan kepada kepala departemen keuangan, yang memiliki integritas dan kompetensi untuk melakukan tugas tersebut. Sebagian besar transaksi dalam siklus pendanaan memerlukan otorisasi dari dewan komisaris berdasarkan rencana strategis yang telah dibuat perusahaan. Pemahaman komponen pengendalian intern atas informasi dan akuntansi berkaitan dengan ketersediaan buku besar pembantu utang, yang berfungsi untuk mengontrol siapa saja yang memiliki hubungan dengan perusahaan klien terkait dengan transaksi utang. Dengan pengetahuan ini maka auditor bisa menentukan signifikansi berbagai sumber pendanaan (utang dan ekuitas) bagi perusahaan klien, mengidentifikasi salah saji potensial, dan merancang pengujian audit atas siklus pendanaan ini.

ISA 330.8 menyatakan bahwa auditor wajib merancang dan melaksanakan uji pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai berfungsinya pengendalian yang relevan jika:

1. penilaian auditor mengenai risiko salah saji yang material pada tingkat asersi meliputi ekspektasi bahwa pengendalian berfungsi secara efektif (artinya auditor bermaksud menggunakan pengendalian yang efektif itu untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur substantif), atau;
2. prosedur substantif saja tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi.

D. PENGUJIAN AUDIT ATAS SIKLUS PENDANAAN

Seperti pengujian pada audit siklus pendapatan dan siklus pengeluaran maka untuk melakukan pengujian atas audit siklus pendanaan terdapat dua pengujian, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian biasanya dilakukan bersamaan dengan memperoleh pemahaman industri klien ataupun secara berulang pada saat melakukan pekerjaan lapangan audit. Beberapa prosedur audit yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian pengendalian atas siklus pendanaan adalah me-*review* pengalaman di masa lalu dengan klien, mengajuan pertanyaan *(inquiry)*, observasi, dan inspeksi atas dokumen-dokumen. Contohnya, auditor me-*review* notulen rapat yang ditujukan untuk mendapatkan bukti bahwa transaksi yang berkaitan dengan siklus pendanaan selama tahun pemeriksaan (audit) telah mendapatkan otorisasi dari dewan komisaris. Dalam *me-review* notulen rapat, auditor harus memerhatikan apakah ada komitmen penerbitan saham yang akan datang dalam rangka pembelian atau merger dengan perusahaan lain, apakah ada kebijakan terkait penggunaan dana yang berasal dari luar

perusahaan, dan apakah ada kebijakan terkait pembayaran deviden dan sebagainya. Setelah memperoleh bukti audit maka auditor kemudian mendokumentasikan temuan audit atas pengujian pengendalian ini dengan bagan alir, daftar pertanyaan, dan uraian tertulis (narasi).

Pengujian substantif adalah pengujian yang dilakukan auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi asersi, detail transaksi, dan detail saldo transaksi atas siklus pendanaan. Pengujian subtantif digunakan untuk mengungkap kemungkinan besarnya salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan. Beberapa prosedur audit yang umumnya dipakai oleh auditor adalah analitis, konfirmasi, menghitung ulang atau kalkulasi, penelusuran dan pengusutan, dan sebagainya.

E. PROSEDUR AUDIT ATAS SIKLUS PENDANAAN

Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Prosedur audit yang digunakan sangat tergantung pada pengujian audit. Ada dua macam pengujian audit yang dilakukan auditor terkait siklus pendanaan, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif.

ISA 500 terkait bukti audit menyatakan bahwa tujuan audit ialah merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa sehingga auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan yang memadai, yang dapat digunakannya sebagai dasar pemberian opini auditnya.

Bukti audit dikatakan cukup apabila relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai. Relevansi bukti audit mengacu pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya dan layak dipercaya. Relevansi audit tergantung pada enam karakteristik bukti sebagai berikut.

1. Independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari sumber luar perusahaan klien lebih dapat diandalkan ketimbang yang

diperoleh dari dalam perusahaan klien. Seperti hasil komunikasi dari pihak bank dan pelanggan.

2. Efektivitas pengendalian intern klien. Jika pengendalian intern efektif maka bukti audit yang didapat lebih dapat diandalkan ketimbang dari pengendalian intern yang lemah.
3. Pengetahuan langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, penghitungan ulang dan inspeksi lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung.
4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi.
5. Tingkat objektivitas. Contoh jika auditor memperoleh bukti melalui konfirmasi mengenai jumlah saldo utang yang dimiliki perusahaan langsung dari pihak bank atau lembaga keuangan yang berhubungan dengan perusahaan klien.
6. Ketepatan waktu. Hal ini merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan dan periode yang tercakup oleh audit itu.

Kecukupan bukti audit ditentukan oleh kuantitas bukti terutama ukuran sampel yang dipilih auditor. Dua faktor penting dalam menentukan ketepatan ukuran sampel yaitu ekspektasi auditor atas salah saji dan keefektifan pengendalian internal klien.

Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit selama proses audit berlangsung. Prosedur audit yang dilakukan auditor terkait pengujian pengendalian adalah 1) *review* otorisasi dan kontrak utang. Auditor dalam hal ini melakukan *review* atas siapa yang berwenang melakukan perjanjian untuk meminjam uang dalam bentuk utang jangka panjang. Otorisasi untuk penerbitan surat utang harus ditelusuri sampai ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Auditor juga harus menanyakan keabsahan utang perusahaan klien kepada penasihat hukum klien. *Review* yang lain adalah terkait dengan penelaahan atas kontrak utang dan memastikan bahwa perusahaan klien telah menaati semua

hal yang diperjanjikan. 2) Inspeksi atas dokumen ekuitas pemegang saham. Dalam hal ini, auditor memeriksa buku sertifikat saham untuk memastikan bahwa ekuitas pemegang saham telah dicatat dengan benar dalam masing-masing rekening pemegang saham. Sementara itu, beberapa prosedur audit yang digunakan auditor untuk pengujian substantif yakni sebagai berikut.

1. Konfirmasi Utang

Konfirmasi merupakan penerimaan respons tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang independen, untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. Konfirmasi biasanya meliputi keberadaan utang jangka panjang dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan utang jangka panjang, dengan menjalin komunikasi langsung dengan pihak kreditur seperti bank ataupun lembaga keuangan. Auditor biasanya lebih memilih memberikan konfirmasi tertulis. Dalam konfirmasi ditanyakan mengenai status utang pada saat ini, serta transaksi-transaki terkait utang yang terjadi selama tahun yang diperiksa. Semua jawaban konfirmasi kemudian dibandingkan dengan catatan dan setiap perbedaan yang terjadi memerlukan tindakan lebih lanjut.

2. Menghitung Ulang Biaya Bunga

Auditor melakukan penghitungan ulang perhitungan bunga yang telah dilakukan klien dan selanjutnya menelusur pembayaran bunga tersebut ke dokumen pendukung seperti voucher, bukti pembayaran kas, dan jawaban konfirmasi. Utang bunga dan biaya bunga diperiksa dengan mengidentifikasi tanggal terakhir pembayaran dan menghitung kembali jumlah yang dibukukan oleh perusahaan klien.

3. Prosedur Analitis

Prosedur analitis adalah metode yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit, dengan melakukan perbandingan dan hubungan

untuk menilai apakah asersi atau data lain tampak wajar dibandingkan dengan harapan auditor. Analitis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis rasio atas siklus pendanaan klien, seperti rasio EPS yang berguna untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh atas investasi saham yang dilakukan oleh pemegang saham.

4. Penelusuran

Auditor menelusuri saldo awal ke saldo audit tahun lalu. Auditor melakukan *review* aktivitas utang jangka panjang termasuk pengaruhnya terhadap laba rugi maupun investigasi aktivitas yang tidak lazim. Auditor juga harus mendapatkan daftar saldo ekuitas pemegang saham dan utang jangka panjang perusahaan yang dibuat klien, dan memastikan bahwa daftar tersebut akurat sesuai dengan dasar akuntansi yang melandasinya, melakukan penjumlahan menurun dan mendatar atas jumlah saldo ekuitas pemegang saham dan utang jangka panjang, serta mencocokkan daftar tersebut dengan pendebetan dan pengkreditan di buku besar dan buku besar pembantu utang.

Auditor dalam mengaudit siklus pendanaan harus mengenali beberapa kondisi yang kemungkinan besar berpotensi mengalami salah saji material sebagai berikut.

a. Utang jangka panjang yang kemungkinan tidak diotorisasi sah oleh pejabat berwenang.
b. Penerbitan saham baru yang tidak diotorisasi sah oleh pejabat berwenang.
c. Jumlah saldo utang yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi saat proses pemeriksaan.
d. Saldo utang dilaporkan terlalu kecil (tidak lengkap).
e. Kesalahan pembukuan angsuran periodik (pemilahan unsur bunga dan unsur pokok pinjaman).
f. Kesalahan pembebanan bunga pinjaman (*cut-off* transaksi).
g. Pelunasan pinjaman tidak tercatat, dan sebagainya.

F. BUKTI AUDIT ATAS SIKLUS PENDANAAN

ISA 500 terkait bukti audit menyatakan bahwa tujuan audit ialah merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa sehingga auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan yang memadai, yang dapat digunakannya sebagai dasar pemberian opini auditnya.

Bukti audit adalah salah satu dasar bagi auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan klien. Bukti audit memberikan keyakinan memadai bagi auditor dalam melaporkan hasil audit. Beberapa bukti audit yang didapatkan auditor selama penugasan audit siklus pendanaan adalah berikut ini.

1. Jurnal Pengeluaran Kas

Untuk mencatat transaksi pembayaran angsuran dan biaya bunga utang. Auditor akan menelusuri jurnal pengeluaran kas sehingga mengetahui total pembayaran angsuran dan bunga utang yang telah dilakukan perusahaan klien.

2. Jurnal Penerimaan Kas

Untuk mencatat transaksi penerimaan uang dari aktivitas pendanaan, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun ekternal perusahaan.

3. Buku Besar Pembantu Utang

Untuk mengetahui dan mengecek saldo utang yang *out-standing* selama proses pemeriksaan siklus pendanaan.

4. Sertifikat Saham

Untuk me-*review* dan mencocokkan pemegang saham dalam perusahaan klien serta jumlah lembar saham yang beredar.

5. Kontrak Utang

Untuk me-*review* tentang detail perjanjian dan memastikan klien telah menaati semua hal yang diperjanjikan.

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Bagaimana cara auditor melakukan prosedur analitis atas siklus pendanaan?
2. Jelaskan tujuan audit pada audit siklus pendanaan!
3. Jelaskan pengujian audit yang dilakukan atas siklus pendanaan!
4. Mengapa auditor melakukan audit atas siklus pendanaan!
5. Jelaskan bukti audit yang kemungkinan diperoleh auditor dalam audit siklus pendanaan?
6. Kondisi bagaimana yang menimbulkan kemungkinan salah saji potensial pada audit siklus pendanaan?
7. Bagaimana prosedur audit yang dilakukan auditor pada pengujian pengendalian?
8. Apa isi dari ISA 330.8 dan ISA 500?
9. Sebutkan transaksi yang termasuk pada siklus pendanaan?
10. Bagaimana auditor memahami bisnis usaha klien pada siklus pendanaan?

Kasus

Pahami kasus audit di bawah ini dan jawablah sesuai instruksi!

Auditor sedang menerima penugasan audit atas PT Gembira (klien baru) untuk tahun perikatan selama tiga tahun. PT Gembira merupakan perusahaan tekstil yang sedang berkembang dan beberapa transaksinya menggunakan bilyet giro. Sumber pendanaan diperoleh dari investasi pemilik, serta menjaminkan aset tanah dan pabrik perusahaan pada Bank Hore dan lembaga keuangan yang ada di kota tersebut. Pada tahun

ini perusahaan mulai mengoperasikan pabrik keduanya yang didirikan dengan menggunakan pendanaan dari Bank Gemah Ripah. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa kontrak utang dengan pihak *leasing* untuk pengadaan tiga mobil operasional pabrik dan sebuah truk. Tahun buku PT Gembira berakhir pada 30 Juni tahun 20XX. Perusahaan menyimpan setara kasnya berupa giro pada Bank Hore. Pihak Bank setiap akhir minggu mengirimkan laporan giro pada perusahaan dan laporan bulanan setiap minggu. Akhir tahun jatuh pada hari sabtu ketika operasi bank tutup sementara auditor memerlukan bukti salinan giro sampai akhir tahun.

Diminta:

1. Bagaimana auditor memperoleh bukti terkait saldo giro di Bank Hore?
2. Bagimana auditor memperoleh bukti atas transaksi utang perusahaan?

Bab 10
AUDIT SIKLUS PERSONALIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan audit atas siklus personalia secara baik dan benar.

Cerita Pembuka

PT Putri Duyung bergerak dibidang percetakan kertas dan belum pernah diaudit. Tahun ini, KAP Illiya diminta untuk mengaudit perusahaan ini dan saudara Ema adalah salah satu anggota tim auditor. Perusahaan telah berdiri selama kurang lebih empat tahun dan tidak menyelenggarakan catatan persediaan dengan metode perpetual. Bapak Budi sebagai senior auditor mengatakan kepada tim auditor bahwa untuk perusahaan ini maka pengujian audit sebaiknya lebih memerhatikan akun persediaan dan karyawan yang bertanggung jawab atas ini.

Hasil observasi didapatkan informasi bahwa petugas gudang tidak memiliki catatan atas bahan baku yang diterima atau dikeluarkan. Untuk mengatasi ketiadaan catatan sediaan berdasarkan perpetual, perusahaan menyelenggarakan perhitungan fisik secara bulanan yang dilakukan oleh petugas gudang dengan pengawasan yang baik. Setelah perhitungan fisik selesai pengawas gudang membandingkan hasil perhitungan dengan taksiran tingkat pemesanan.

Pegawai gudang selanjutnya menuliskan nomor kode barang pada daftar permintaan pemesanan barang dan mengirimkan daftar tersebut ke bagian pencatatan utang dagang. Apabila pesanan datang maka barang diterima oleh petugas gudang yang menghitung jumlah barang, dan mencocokkan jumlahnya dengan jumlah pesanan yang dibawa oleh bagian pengangkut barang. Semua dokumen pengangkut ditandatangani, diberi tanggal, dan diarsipkan digudang untuk digunakan sebagai laporan penerimaan.

Situasi di atas adalah kondisi yang harus dipahami oleh auditor terkait siklus personalia terutama personel atau karyawan yang bertanggung jawab pada bagian gudang. Dengan pemahaman yang baik maka audit atas siklus personalia dapat menghasilkan temuan bukti audit yang cukup. Kecukupan atas bukti yang didapat adalah hal dasar yang memadai bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya.

A. SIKLUS PERSONALIA

Auditor adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan secara objektif, dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang telah diaudit disajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas hasil kinerja keuangan perusahaan atau organisasi. Sementara karyawan perusahaan adalah salah satu aset yang dimiliki perusahaan yang dapat menentukan kinerja keuangan perusahaan sebagai objek pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor.

Siklus personalia adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk memberikan gaji, upah, bonus, tunjangan, opsi saham dan berbagai kesejahteraan lainnya kepada pegawai, buruh ataupun manajemen puncak perusahaan. Siklus personalia berkaitan dengan siklus pengeluaran kas. Transaksi-transaksi pada siklus personalia meliputi beberapa hal berikut.

1. Biaya gaji/upah pegawai.
2. Utang gaji/upah.

3. Potongan-potongan atas gaji.
4. PPh gaji.
5. Biaya bonus pegawai.
6. Utang bonus pegawai.
7. Tunjangan-tunjangan (seperti THR, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Hari Tua, dan lain-lain).
8. Kas/bank yang berkaitan dengan pembayaran gaji/upah, tunjangan, dan bonus.

B. TUJUAN AUDIT ATAS SIKLUS PERSONALIA

Auditor harus memperoleh bukti audit agar tujuan audit secara spesifik tercapai. Tujuan audit atas siklus personalia adalah sebagai berikut.

1. Keberadaan atau Keterjadian

Auditor harus membuktikan saldo utang gaji, utang bonus, PPh dan biaya gaji, biaya bonus pegawai adalah jumlah yang benar menurut tanggal neraca.

2. Kelengkapan

Auditor harus membuktikan saldo utang gaji, utang bonus, PPh dan biaya gaji, biaya bonus pegawai adalah keseluruhan jumlah yang telah tercatat per tanggal neraca.

3. Hak dan Kewajiban

Utang gaji, utang bonus karyawan, dan PPh karyawan adalah benar-benar kewajiban perusahaan klien.

4. Penilaian dan Pengalokasian

Biaya gaji, biaya bonus, utang gaji, utang bonus pegawai, dan PPh karyawan telah dihitung teliti dan telah tercatat per tanggal neraca.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Biaya gaji, utang gaji, biaya bonus, utang bonus pegawai, dan PPh karyawan telah diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disajikan dengan benar pada laporan laba-rugi dan neraca atau laporan posisi keuangan.

C. MEMAHAMI BISNIS KLIEN DAN PENGENDALIAN INTERN

Bisnis adalah kegiatan untuk menyediakan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga menghasilkan pendapatan bagi produsen atau penyedia jasa. Bisnis umumnya dibedakan menjadi tiga kegiatan usaha, yaitu usaha dagang, usaha manufaktur, dan usaha jasa. Pada masing-masing jenis usaha memiliki karakteristik unik yang berbeda antara satu dengan lainnya demikian juga dengan siklus personalia. Contohnya, industri perhotelan adalah industri jasa yang tergantung pada efektivitas karyawan dalam bekerja, karena umumnya industri perhotelan mempekerjakan banyak karyawan sehingga sebagian besar uang perusahaan digunakan untuk membayar gaji atau bonus karyawan.

ISA 330.8 menyatakan bahwa auditor wajib merancang dan melaksanakan uji pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai berfungsinya pengendalian yang relevan jika:

1. penilaian auditor mengenai risiko salah saji yang material pada tingkat asersi meliputi ekspektasi bahwa pengendalian berfungsi secara efektif (artinya auditor bermaksud menggunakan pengendalian yang efektif itu untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur substantif), atau;
2. prosedur substantif saja tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi.

Auditor harus memahami siklus personalia perusahaan klien dan mengenali apakah perusahaan merupakan perusahaan padat tenaga kerja atau padat modal, serta bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan klien. Apabila kompensasi yang diberikan perusahaan adalah gaji tetap dan bisa diprediksi dengan jasa yang diberikan karyawan maka auditor dapat melakukan prosedur analitis untuk memperoleh bukti auditnya.

Auditor juga harus memahami risiko pengendalian yang ada dalam siklus pengendalian ini. Contohnya, manajemen perusahaan mungkin saja melakukan kekeliruan atau kecurangan menyangkut pembayaran gaji atau upah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, maupun penanganan pajak penghasilan karyawan yang tidak benar. Selain itu, auditor juga harus memahami bagaimana manajemen perusahaan melakukan pengolahan *database* atas siklus personalia ini. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern pada akhirnya adalah keyakinan bagi auditor untuk melakukan prosedur audit selanjutnya.

D. PENGUJIAN AUDIT ATAS SIKLUS PERSONALIA

Pengujian audit yang dilakukan auditor biasanya meliputi pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan bersamaan dengan memperoleh pemahaman industri klien ataupun secara berulang pada saat melakukan pekerjaan lapangan audit. Pengujian pengendalian dilakukan dengan memeriksa dan mengevaluasi struktur pengendalian intern perusahaan klien. Beberapa prosedur audit yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian pengendalian atas siklus personalia adalah me-*review* pengalaman di masa lalu dengan klien, mengajuan pertanyaan *(inquiry)*, observasi, dan inspeksi atas dokumen-dokumen.

Pengujian subtantif digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan.

Beberapa prosedur audit yang dipakai oleh auditor dalam siklus personalia adalah analitis, kalkulasi, penelusuran, pengusutan dan sebagainya.

E. PROSEDUR AUDIT ATAS SIKLUS PERSONALIA

Prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit, yang dapat digunakan dalam memberikan pernyataan pendapat terhadap kondisi keuangan perusahaan. Artinya, untuk mengumpulkan bukti audit maka auditor harus melakukan prosedur audit. Seperti yang dicontohkan pada siklus pengeluaran kas bahwa pembayaran biaya gaji/upah pegawai sangat ditentukan pada berapa jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan, komponen dari kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya (tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan lain-lain) dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran gaji/upah.

Prosedur audit biasanya disesuaikan dengan pengujian audit yang akan dilakukan. Pada saat auditor melakukan pengujian pengendalian maka prosedur audit yang dipakai adalah berikut ini.

1. Bertanya (*Inquiry*)

Pada saat melakukan prosedur bertanya (*inquiry*) kepada bagian personalia maka auditor akan bertanya terkait (a) jumlah karyawan, (b) *database* karyawan yang berisi pangkat/golongan masing-masing karyawan, tunjangan yang didapat, lama karyawan bekerja, (c) skala gaji jika ada, (d) slip gaji, dan (e) pajak penghasilan karyawan.

2. Inspeksi Atas Dokumen Kepegawaian

Inspeksi atas dokumen dilakukan auditor dengan mencocokkan jumlah karyawan, besar tunjangan, dan skala gaji dengan besarnya gaji/upah

yang tertera pada slip gaji. Auditor juga harus menilai keabsahan slip gaji karyawan. Dalam hal ini, keabsahan dinilai dari siapa yang berwenang mengotorisasi gaji dan siapa yang bertugas melakukan pembayaran gaji/upah karyawan. Auditor harus melakukan verifikasi atas kompensasi berupa tunjangan-tunjangan dan bonus yang diterima oleh manajemen puncak perusahaan. Hal itu karena kompensasi yang diterima kemungkinan memiliki jumlah yang lebih besar dari jumlah yang ditetapkan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian. Auditor juga dapat melakukan *review* atas notulen rapat terkait keputusan dan kebijakan pengangkatan pegawai, serta jumlah kebutuhan pegawai pada tahun berjalan (selama tahun pemeriksaan audit).

3. Observasi

Prosedur observasi dilakukan auditor untuk menilai apakah karyawan bekerja secara efektif dan memiliki etos kerja yang baik. Auditor melakukan pengamatan langsung bagaimana karyawan bekerja. Auditor juga harus mengecek identitas masing-masing pegawai.

Bukti audit yang didapat dari pengujian pengendalian kemudian didokumentasikan dalam bentuk uraian tertulis dan bagan alir. Dokumentasi ini merupakan bagian kertas kerja pemeriksaan yang harus disimpan auditor. Sementara dalam melakukan pengujian substantif atas saldo dan detail transaksi siklus personalia, auditor dapat menggunakan prosedur audit antara lain berikut ini.

1. Prosedur analitis, adalah bagaimana auditor membandingkan dan menilai kinerja karyawan. Auditor biasanya menggunakan rasio sebagai alat ukur. Contoh (a) rasio pendapatan per karyawan dengan rumus total pendapatan dibandingkan jumlah waktu kerja karyawan dalam sebulan. Rasio ini berguna untuk mengukur produktivitas per pegawai/karyawan. (b) Persentase biaya tenaga

kerja terhadap total pendapatan dengan rumus total biaya tenaga kerja dibandingkan total pendapatan. Rasio ini berguna untuk menilai kewajaran biaya tenaga kerja.

2. Menghitung ulang atau kalkulasi atas utang-utang yang terkait dengan utang gaji/upah dan utang PPh. Perusahaan biasanya memiliki utang-utang tertentu pada tanggal neraca terkait gaji/upah dan utang PPh. Perhatian utama auditor adalah adanya salah saji berupa kurang saji atas pembayaran gaji/upah dan PPh karyawan.
3. Penelusuran dan pengusutan atas transaksi siklus personalia. Auditor mengecek jumlah pembayaran biaya gaji/upah dengan transaksi-transaksi pada siklus personalia dengan telusur pada jumlah yang ada di laporan laba rugi dan neraca pada jurnal pengeluaran kas, serta buku besar biaya gaji, utang gaji, dan PPh karyawan. Kemudian melakukan pencocokkan dengan slip gaji dan keabsahan slip gaji, rekening pembayaran gaji yang ada di bank, serta bukti pembayaran pajak (PPh) karyawan dari direktorat jenderal pajak.

Hasil prosedur audit yang dilakukan auditor adalah bukti audit yang diarsipkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Bukti audit merupakan salah satu dasar keyakinan memadai bagi auditor dalam menarik kesimpulan audit berupa opini.

Kondisi potensi salah saji dapat terjadi pada siklus personalia. Salah saji merupakan tindakan menghilangkan sejumlah informasi yang kemungkinan berguna bagi *stakeholders* untuk pengambilan keputusan ekonomis. Auditor harus mampu mengidentifikasi dan mengenali kondisi potensi salah saji pada transaksi siklus personalia antara lain sebagai berikut.

1. Jumlah pegawai yang ada tidak sesuai dengan *database* kepegawaian.
2. Adanya pembayaran biaya gaji/upah kepada pegawai fiktif.

3. Adanya pembayaran biaya gaji/upah kepada pegawai yang sesungguhnya tidak bekerja.
4. Perusahaan tidak membayarkan kompensasi pegawai, namun melaporkan biaya kompensasi (tunjangan, bonus) dalam laporan keuangan perusahaan.
5. Pembayaran gaji/upah kepada pegawai dengan tarif yang lebih tinggi dari peraturan kepegawaian yang ada di perusahaan.
6. Perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan pegawai sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.
7. Perhitungan gaji/upah yang masih dilakukan secara manual, dan sebagainya.

F. BUKTI AUDIT ATAS SIKLUS PERSONALIA

Bukti audit adalah dokumen dan catatan yang penting dan harus dikumpulkan oleh auditor. Hal itu karena bukti audit yang relevan, cukup, dan tepat merupakan dasar memadai bagi auditor untuk memberikan kesimpulan berupa opini audit. Beberapa bukti audit yang terkait dengan siklus personalia adalah berikut ini.

1. Otorisasi Karyawan

Dokumen yang diterbitkan oleh departemen sumber daya manusia tentang pengangkatan dan status pegawai.

2. Daftar Slip Gaji dan Upah

Daftar yang menunjukkan nama para pegawai dan buruh tentang besaran pendapatan, potongan-potongan, dan pembayaran bersih di setiap bulan.

3. Catatan Waktu Kerja

Dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu kerja pegawai atau buruh pada suatu posisi pekerjaan. Biasanya tercetak dalam mesin waktu.

4. Arsip Pegawai

Dokumen yang berisi data kepegawaian untuk setiap pegawai yang meliputi informasi pengangkatan pegawai yang bersangkutan, evaluasi jabatan, status kepangkatan, dan sebagainya.

5. Rekening Bank Atas Gaji atau Upah

Rekening yang sengaja dibuka di bank khusus untuk melakukan pembayaran gaji dan upah. Pada setiap periode pembayaran, rekening ini diisi sebesar jumlah bersih gaji dan upah yang harus dibayar kemudian bank akan mengurangi rekening ini sebesar yang ditransfer ke rekening masing-masing pegawai.

6. Formulir Pajak Penghasilan Karyawan

Dokumen yang diterbitkan oleh direktorat jenderal perpajakan untuk pembayaran pajak atas gaji dan upah pegawai, yang telah dipotong perusahaan dari pendapatan kotor pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Jurnal Pengeluaran Kas

Dokumen yang berisikan tentang catatan transaksi pembayaran biaya gaji/upah karyawan, utang gaji, tunjangan karyawan, maupun PPh karyawan selama satu periode akuntansi, dan sebagainya.

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Mengapa auditor harus memahami pengendalian intern atas siklus personalia?
2. Bagaimana cara auditor melakukan prosedur analitis?
3. Jelaskan tujuan audit pada audit siklus personalia!
4. Kondisi bagaimana yang menimbulkan kemungkinan salah saji potensial pada audit siklus personalia?

5. Jelaskan bukti audit yang kemungkinan diperoleh auditor dalam audit siklus personalia?
6. Jelaskan prosedur audit yang digunakan auditor untuk melakukan pengujian pengendalian atas siklus personalia?
7. Sebutkan transaksi-transaksi yang ada dalam siklus personalia!
8. Sebutkan bunyi ISA 330.8!
9. Mengapa auditor harus memahami bisnis klien?
10. Jelaskan prosedur audit yang digunakan auditor untuk melakukan pengujian substantif atas siklus personalia?

Kasus

KAP Rara sedang mengaudit PT Sentosa atas siklus personalia. PT sentosa adalah perusahaan tekstil celana jeans yang cukup berkembang. PT Sentosa memiliki dua pabrik yang mampu menghasilkan sekitar delapan ribu celana jeans per harinya. PT Sentosa menggunakan tarif upah per jam untuk memberikan gaji/upah pegawainya.

Jessy sebagai senior auditor telah me-*review* sejumlah karyawan pabrik untuk memastikan sistem penggajian yang ada di perusahaan klien. Informasi yang terkait dengan sistem personalia perusahaan klien adalah sebagai berikut 1) mandor di masing-masing divisi akan mencatat dan melaporkan jam kerja karyawan setiap minggu, 2) pegawai bagian pengajian menerima kartu jam kerja dari mandor masing-masing divisi pada akhir periode pembayaran, 3) bagian penggajian/upah kemudian memeriksa kebenaran tarif per jam dan jumlah jam kerja setiap pegawai dengan cara membandingkan detail didaftar gaji/upah ke kartu-kartu waktu, 4) apabila ada kesalahan maka pegawai penggajian/upah akan membuat slip gaji yang baru sesuai dengan jumlah gaji/upah yang benar, dan segera membuat penyesuaian pada daftar gaji/upah, 5) pegawai penggajian/upah akan melaporkan jumlah biaya gaji/upah yang harus dibayar kepada staf akuntansi PT Sentosa, 6) slip gaji yang

telah ditandatangani bagian personalia kemudian ke didistribusikan ke masing-masing mandor, 7) mandor membayarkan gaji/upah kepada karyawan/pegawai pabrik di divisinya.

Diminta:

1. Sebutkan kelemahan sistem personalia dari PT Sentosa di atas yang kemungkinan dapat menimbulkan adanya salah saji material?
2. Bukti audit apa saja yang harus didapatkan auditor?
3. Selain bertanya kepada karyawan, prosedur audit apa lagi yang dapat auditor lakukan untuk memperoleh bukti audit atas siklus personalia?
4. Sebutkan kelebihan yang didapat dari sistem penggajian dengan menggunakan tarif per jam kerja?

Bab 11
MERUMUSKAN OPINI

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa setelah mempelajari bab ini mampu untuk merumuskan opini audit secara benar dan tepat.

Cerita Pembuka

PT Maju Makmur memiliki beberapa truk pengangkut. Perusahaan bergerak di bidang jasa pengangkutan material. Di masa lalu, perusahaan mengambil kebijakan untuk membeli semua peralatan pengangkutan. Tahun ini perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan sewa guna usaha atas truk-truk pengangkut. Metode akuntansi untuk truk ini berubah menjadi kapitalisasi sewa guna usaha. Perubahan kebijakan ini diungkapkan secara lengkap di dalam catatan atas laporan keuangan.

Kondisi di atas menjadikan auditor harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum memberikan opini atas laporan keuangan PT Maju Makmur. Bukti audit yang cukup dan tepat serta pengungkapan memadai dari manajemen perusahaan, memberikan keyakinan bagi auditor untuk memberikan opini wajar dengan penekanan hal tertentu. Bab ini berusaha memberikan pemahaman yang cukup komprehensif sebagai bekal bagi auditor untuk merumuskan opini audit.

A. OPINI AUDIT

Merumuskan opini adalah bagian akhir dari sebuah penugasan audit. Opini audit sangat tergantung pada temuan auditnya. Ketika merumuskan opini maka auditor perlu memastikan apakah laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Jika laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku maka pemberian opini tidak dimodifikasi adalah tepat jika sebagai berikut (Tuanakotta, 2015:496).

1. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material.
2. Bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material tidak dapat diperoleh maka auditor wajib memodifikasi opininya.

Merumuskan opini pada tahap akhir penugasan audit merujuk pada **ISA 700.6** yang menetapkan tujuan auditor pada tahap ini adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkan pada evaluasi terhadap kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang dikumpulnya.
2. Memberikan dengan jelas opininya melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dari opini tersebut.

Pernyataan opini biasanya ada dalam sebuah laporan auditor independen. Beberapa informasi yang ada dalam sebuah laporan auditor independen adalah sebagai berikut.

1. Tanggung jawab manajemen.
2. Tanggung jawab auditor dan penjelasan mengenai audit.
3. Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.
4. Opini auditor atas laporan keuangan.

Ketika seorang auditor selesai melaksanakan tugas auditnya maka langkah selanjutnya adalah merumuskan opini. Ketika auditor akan

merumuskan opini maka auditor akan mempertimbangkan tentang berikut ini.

1. Materialitas

Auditor harus memperoleh kesimpulan mengenai apakah materialitas sudah tepat dalam laporan keuangan klien.

2. Bukti Audit

Auditor harus memperoleh keyakinan memadai mengenai ketepatan dan kecukupan bukti audit untuk mendukung pemberian opini audit. Dalam merumuskan opini maka auditor wajib mempertimbangkan semua bukti audit yang relevan, yang mendukung, menguatkan, atau yang bertentangan dengan asersi dalam laporan keuangan.

3. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Auditor harus memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan sudah merujuk atau menjelaskan dengan cukup mengenai kerangka pelaporan keuangan, dan sudah mengungkapkan semua informasi secara cukup dalam laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

ISA 450.4 menyatakan bahwa:

1. salah saji --- perbedaan jumlah, klasifikasi, penyajian atau pengungkapan yang dilaporkan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian atau pengungkapan yang seharusnya sesuai dengan kerangka pelaporan terkait. Salah saji dapat disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan;
2. salah saji yang tidak dikoreksi --- salah saji yang ditemukan auditor selama berlangsungnya audit dan tidak dikoreksi oleh entitas.

Salah saji dalam laporan keuangan bisa terjadi ketika bukti audit cukup dan tepat diperoleh, namun auditor menyimpulkan bahwa salah saji baik sendiri-sendiri maupun tergabung adalah material atas laporan keuangan. Dalam hal ini maka salah saji bisa berasal dari berikut ini.

1. Tidak tepatnya pemilihan kebijakan akuntansi.
2. Penerapan kebijakan akuntansi yang tidak seharusnya.
3. Manajemen tidak cukup dan tidak tepat dalam melakukan pengungkapan atas laporan keuangan.

ISA 550.25 menyatakan bahwa dalam merumuskan pendapat atas laporan keuangan sesuai ISA 700 maka auditor wajib mengevaluasi apakah:

1. hubungan dan transaksi pihak berelasi yang diidentifikasi sudah dicatat, dilaporkan, dan diungkapkan dengan tepat sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan;
2. dampak hubungan dan transaksi pihak berelasi sebagai berikut.
   a. Menghalangi laporan keuangan dalam mencapai penyajian yang layak (untuk kerangka penyajian yang layak).
   b. Menyebabkan laporan keuangan menyesatkan (untuk kerangka kepatuhan).

Dalam merumuskan opini terkait dengan pihak-pihak berelasi maka auditor harus memperoleh nama-nama pihak berelasi dengan perusahaan klien, dan mengidentifikasi hubungan pihak berelasi dengan perusahaan klien. Selain itu, auditor juga harus berkomunikasi dengan manajemen tentang hal-hal signifikan yang timbul selama melaksanakan audit berkenaan dengan pihak-pihak berelasi.

Opini audit adalah keniscayaan yang harus diberikan oleh auditor setelah masa penugasan audit berakhir. Opini audit memberikan keyakinan memadai bagi pemangku kepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan klien tentang keandalan laporan keuangan. Opini audit merujuk pada ISA terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Opini Tanpa Modifikasi

Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Opini ini mencakup

opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Mencakup juga paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain. Opini ini merujuk pada ISA 700 dan 706. Ketentuan kerangka pelaporan yang berlaku (paragraf 13 SA 700) adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat.
b. Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar.
c. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.
d. Laporan keuangan menyediakan pengungkapan memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju, memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan.
e. Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan termasuk judul setiap laporan keuangan sudah tepat.

2. Opini dengan Modifikasi

Auditor harus memodifikasi opininya berdasarkan ISA 705.6 apabila (a) menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji material, atau; (b) auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material. Dapat juga dikatakan apabila laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan suatu kerangka yang wajar tidak mencapai penyajian wajar maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen, dan tergantung pada ketentuan kerangka pelaporan yang berlaku dan bagaimana hal tersebut diselesaikan, serta harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opininya dalam laporan auditor independen. Berdasarkan **ISA 705** maka opini ini terdiri dari opini wajar dengan pengecualian

(qualified opinion), opini tidak wajar *(adverse opinion)*, opini tidak menyatakan pendapat *(disclaimer opinion)*.

a. Opini Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Berdasrkan **ISA 705.7** menyatakan bahwa auditor wajib memberikan opini wajar dengan pengecualian jika sebagai berikut.

1) Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa salah saji sendiri-sendiri atau digabungkan adalah material, tetapi tidak *pervasive* untuk laporan keuangan yang bersangkutan, atau;
2) auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat, tetapi ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan mungkin material tapi tidak *pervasive*.

b. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Opini ini diberikan auditor apabila setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa salah saji sendiri-sendiri atau digabungkan adalah material dan *pervasive* untuk laporan keuangan yang bersangkutan **(ISA 705.8).**

c. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer Opinion)

Berdasarkan **ISA.705.9** auditor wajib memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) jika ia tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, untuk dijadikan dasar pemberian pendapat dan ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang ditemukan bisa material dan *pervasive*. Sementara **ISA 705.10** menyatakan auditor wajib memberikan opini TMP jika dalam situasi yang sangat langka di mana ada beberapa ketidakpastian yang menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai ketidakpastian tersebut, tidak mungkin baginya memberikan pendapat karena ketidakpastian tersebut bisa saling terkait dan dampak kumulatif dari ketidakpastian itu terhadap laporan keuangan.

1. Penekanan pada Hal Tertentu

Paragraf penekanan atas suatu hal atau penekanan hal tertentu adalah alinea yang terdapat dalam laporan auditor yang merujuk kepada suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, yang dalam pandangan auditor begitu penting bagi pemahaman pemakai terhadap laporan keuangan. Paragraf penekanan atas suatu hal ini wajib dimasukkan dalam laporan auditor independen, dengan catatan ia sudah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa hal itu tidak disalahsajikan secara material dalam laporan keuangan. Penekanan atas suatu hal hanya akan merujuk ke informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. Paragraf Hal Lain

Paragraf hal lain merujuk kepada suatu hal yang tidak disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang dalam pandangan auditor begitu penting bagi pemahaman pemakai terhadap audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Paragraf hal lain diperlukan untuk menekankan hal-hal berikut.

a. Pembatasan mengenai penyebaran laporan keuangan karena sering kali laporan keuangan dibuat untuk tujuan khusus.
b. Menekankan tanggung jawab terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau standar profesi yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi.
c. Pengungkapan relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor.

Opini audit yang terdapat dalam laporan auditor independen menurut **SA-ISA 700** harus memuat unsur-unsur sebagai berikut.

1. Judul.
2. Pihak yang dituju.

3. Tanggung jawab atas pelaporan keuangan terdiri dari berikut ini.
   a. Paragraf pendahuluan: mengindentifikasi laporan keuangan yang diaudit.
   b. Paragraf tanggung jawab manajemen.
   c. Paragraf tanggung jawab auditor terdiri dari berikut ini.
      1) Tanggung jawab auditor dalam suatu audit.
      2) Ruang lingkup audit.
      3) Kecukupan dan ketepatan bukti audit.
   d. Paragraf opini audit.
   e. Paragraf penekanan atas suatu hal (jika relevan).
   f. Paragraf hal lain (jika relevan).
      1) Tanggung jawab pelaporan lainnya.
      2) Tandatangan auditor.
   4. Nama kantor akuntan publik.
   5. Tanda tangan akuntan publik.
   6. Nama akuntan publik.
   7. Nomor register akuntan publik.
   8. Nomor register kantor akuntan publik.
   9. Tanggal laporan audit.
   10. Alamat auditor.

1. Contoh Laporan Auditor Independen (Opini Wajar)

KAP Budhi Mulia dan rekan
Jln. Apel blok A 105 Jakarta Selatan
Laporan auditor independen
Laporan No.RPC 64/BM/2014

Yth. Pimpinan PT XYZ
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT XYZ yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan

laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh institut akuntan publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika, serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal

entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan, dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. XYZ tanggal 31 Desember 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

KAP Budhi Mulia dan rekan

Tanda tangan
Budhi Mulia
Register akuntan public no.AP.06690
25 Februari 2015

2. Contoh Laporan Auditor Independen (Opini Wajar dengan Penekanan Suatu Hal)

KAP Budhi Mulia dan rekan
Jln. Apel blok A 105 Jakarta Selatan
Laporan auditor independen
Laporan No.RPC 64/BM/2014

Yth. Pimpinan PT XYZ

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT XYZ yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013 serta

laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain-nya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen, untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh institut akuntan publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika, serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi

bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT XYZ tanggal 31 Desember 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Laporan keuangan terlampir disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya secara kesinambungan. Seperti yang diungkapkan pada catatan 3a atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan memiliki jumlah liabilitas jangka pendek yang melebihi jumlah asetnya sebesar Rp851.869.943. Menurut opini kami, informasi keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berkaitan dengan laporan keuangan terlampir secara keseluruhan.

KAP Budhi Mulia dan rekan

Tanda tangan
Budhi Mulia
Register akuntan public no.AP.06690
25 Februari 2015

B. REPRESENTASI TERTULIS MANAJEMEN

ISA 580.9 menyatakan bahwa:
auditor wajib meminta representasi tertulis dari manajemen yang mempunyai tanggung jawab atas laporan keuangan dan mengenai hal-hal terkait.

ISA.580.11 menyatakan bahwa:
auditor wajib meminta manajemen memberikan representasi tertulis bahwa:

1. manajemen sudah memberikan kepada auditor semua informasi yang relevan dan akses seperti yang disepakati dalam syarat-syarat penugasan audit, dan
2. semua transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan.

Representasi manajemen bisa dalam bentuk lisan dan tertulis. Representasi tertulis adalah pernyataan tertentu dan keyakinan manajemen bahwa:

1. manajemen telah memenuhi semua tanggung jawabnya atas pembuatan laporan keuangan,
2. informasi yang diberikan kepada auditor sudah lengkap.

Surat representasi tertulis dibuat sedekat mungkin atau menjelang berakhirnya masa penugasan audit pada periode akuntansi yang bersangkutan. Pernyataan tertulis mencakup seluruh laporan keuangan dan seluruh periode yang disebutkan dalam laporan auditor. Representasi tertulis merupakan sumber bukti audit yang penting, karena jika manajemen mengubah representasi tertulis maka akan memicu perhatian auditor mengenai satu masalah yang mungkin ada dalam perusahaan klien. Akan tetapi, representasi tertulis dari manajemen tidak boleh dipakai sebagai pengganti pelaksanaan prosedur audit lainnya dan satu-satunya sumber bukti audit.

Tahap pelaporan atau akhir penugasan audit biasanya juga sangat terkait dengan informasi pembanding dan peristiwa kemudian. Tanggung jawab pelaporan auditor akan didasarkan atas pendekatan yang digunakannya terhadap informasi pembanding yang disajikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syarat perikatan audit. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan oleh auditor dalam penyusun laporan auditor independen terkait dengan informasi pembanding, yakni sebagai berikut.

1. Pendekatan Koresponding

Pendekatan ini digunakan apabila angka atau jumlah dan pengungkapan lain mengenai periode sebelumnya dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, untuk periode berjalan dan dimaksudkan untuk dibaca hanya dalam hubungannya dengan angka atau jumlah dan pengungkapan lain untuk periode berjalan. Dalam hal ini pendapat auditor hanya merujuk pada periode laporan keuangan yang berjalan saja.

2. Pendekatan Komparatif

Pendekatan yang dipakai oleh auditor apabila angka atau jumlah dan pengungkapan lain mengenai periode sebelumnya dimasukkan sebagai pembanding terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan. Jika angka pembanding dari periode sebelumnya diaudit, ini akan disebutkan dalam pendapat auditor. Tingkat informasi dalam laporan keuangan pembanding setara dengan tingkat informasi dalam laporan keuangan periode berjalan. Pendapat auditor akan menunjuk ke setiap periode dari laporan keuangan yang disajikan.

C. PERISTIWA KEMUDIAN (*SUBSEQUENT EVENTS*)

ISA 560.4 menyatakan bahwa tujuan auditor dalam mengaudit peristiwa kemudian yaitu untuk sebagai berikut.

1. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan, telah ditunjukkan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
2. Menanggapi dengan tepat atas fakta yang diketahui auditor sesudah tanggal laporan auditor, yang jika diketahui sebelumnya dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditornya.

Peristiwa kemudian adalah peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, serta fakta yang diketahui oleh auditor sesudah tanggal laporan auditor. Peristiwa kemudian yang diketahui sesudah tanggal laporan auditor sering kali menyebabkan pekerjaan audit tambahan karena peristiwa kemudian itu berdampak terhadap saldo akun, estimasi akuntansi, penyisihan, dan berbagai pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam situasi tersebut maka laporan auditor yang baru akan diterbitkan. Contohnya, tanggal laporan auditor semula adalah tanggal 24 April 2016, namun pada tanggal 15 Mei 2016 perusahaan klien mengumumkan adanya penjualan aset yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan No.25. Dalam hal ini, auditor akan melakukan prosedur audit atas catatan No.25 tersebut. Pekerjaan audit selesai pada 27 Mei 2016 maka kalimat yang menjelaskan pemberian dua tanggal pada laporan auditor (*dual dating*) adalah sebagai berikut; “ 24 April 2016 kecuali mengenai catatan No.25 yang tertanggal 27 Mei 2016”

Beberapa contoh peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor antara lain sebagai berikut.

1. Penjualan atau akuisisi aset yang direncanakan atau telah terjadi.
2. Peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang.
3. Setiap peristiwa yang sudah atau sangat mungkin akan terjadi yang

menimbulkan keraguan mengenai asumsi kelangsungan usaha atas keraguan penggunaan kebijakan akuntansi.

D. KELANGSUNGAN USAHA *(GOING CONCERN)*

Kesanksian besar tentang kelangsungan hidup berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan klien untuk memenuhi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo, karena klien tidak memiliki aset yang tidak digunakan dalam proses kegiatan normal perusahaan dalam jumlah cukup untuk membayar utang. Informasi lain adalah terjadinya restrukturisasi utang, adanya tekanan dari pihak luar atas operasi perusahaan. Apabila auditor yakin bahwa terdapat kesanksian besar tentang kemampuan klien dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam satu periode akuntansi maka sebaiknya auditor melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Dapatkan informasi tentang rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi pengaruh dari kondisi atau kejadian tersebut.
2. Tentukan kemungkinan rencana tersebut akan dapat diterapkan secara efektif.
3. Melakukan evaluasi rencana manajemen mengenai signifikansi kondisi atau kejadian dan faktor-faktor yang bisa mengurangi kesanksian tersebut.

ISA 570 menyatakan bahwa:

"Tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan berkenaan dengan penggunaan asumsi "kesinambungan usaha" dan penilaian manajemen mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha berkesinambungan".

Latihan Soal

Jawab pertanyaan berikut secara singkat dan jelas!

1. Jelaskan kondisi yang menyebabkan auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian?
2. Jelaskan pendekatan yang umumnya dipakai auditor untuk merumuskan opini!
3. Sebutkan unsur-unsur yang harus ada dalam laporan auditor independen!
4. Susunlah laporan auditor independen yang menyatakan opini wajar dengan penekanan hal tertentu!
5. Apa yang menyebabkan auditor memberikan opini wajar dengan hal lain?
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan salah saji?
7. Faktor-faktor apa yang auditor harus perhatikan dalam merumuskan opini audit!
8. Informasi apa yang terkandung dalam sebuah laporan auditor independen?
9. Apa yang dimaksud dengan peristiwa kemudian dan berikan contohnya!
10. Apa yang menyebabkan auditor memberikan opini disclaimer atau TMP?

Kasus

Berikut disajikan beberapa kondisi yang biasanya ditemui oleh auditor ketika melakukan penugasan audit atas laporan keuangan!

a. Saudara sedang mengaudit PT Riwa-Riwi untuk pertama kali. PT Riwa-Riwi telah menjalankan usahanya selama kurang lebih lima tahun dan baru pertama kali dilakukan audit. Setelah audit selesai, saudara menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan tahun ini telah menyajikan secara wajar dalam segala hal material

sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan dan prinsip akuntansi berterima umum. Namun sebagai catatan manajemen PT Riwa-Riwi tidak memperkenankan saudara untuk melakukan pengujian yang diperlukan atas data-data keuangan tahun sebelumnya.

b. Saudara telah menyelesaikan audit atas toserba Biru dan menurut pendapat saudara laporan keuangan mereka telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material. Pada hari terakhir dalam pelaksanaan penugasan pekerjaan lapangan audit, baru diketahui bahwa salah seorang anggota tim auditor yang ditugaskan dalam audit ini ternyata memiliki investasi yang cukup besar dalam toserba Biru.

c. PT Sejahtera Sejati bergerak dibidang industri makanan *snack* yang berkembang pesat. Perusahaan telah menyiapkan laporan keuangannya kecuali laporan arus kas. Manajemen menjelaskan kepada saudara sebagai auditor bahwa para pemangku kepentingan atas laporan keuangan perusahaan merasa bahwa laporan arus kas terlalu membingungkan dan lebih suka jika perusahaan tidak menyajikan.

d. *Controller* keuangan hotel Sahabat tidak memperkenankan saudara untuk mengonfirmasi saldo piutang usaha dari kedua pelanggan utamanya. Jumlah saldo piutang tersebut material bagi laporan keuangan Hotel Sahabat. Saudara tidak dapat mempergunakan prosedur alternatif untuk menyakinkan kepastian saldo-saldo tersebut!

Diminta:

Untuk masing-masing kondisi di atas jenis opini apa yang seharusnya diberikan oleh auditor? Berikan argumen saudara!

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*.

Jakarta: Salemba Empat.

Albrecht W.Steve and Chad Albrecht. 2002. *Fraud Examination*. USA: South Western Educational Publishing.

Arens, Alvin A & Loebbecke, James K. 1997. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2003. *Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall.

_____. 1981b. "Auditor Size and Audit Quality". *Journal of Accounting and Economics*. December. pp. 183—199.

Arens, Alvin A.Elder, Randal J.Beasly, Mark S. Beasley. 2006. *Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach*. 12th Edition. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffts.

Association of Certified Fraud Examiner. 2005. *Fraud Examiner Manual*. Texas.

Bologna G.Jack and Robert Linguist. 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting, New Tool and Techniques*. New York: John Wiley.

Davidson, R.A., dan D. Neu. 1993. "A Note on The Association between Audit Firm Size and Audit Quality". *Contemporary Accounting Research*. 9 (Spring). pp. 479—488.

DeAngelo, L.E. 1981a. "Auditor Independence, "Low Balling", and Disclosure Rregulation". *Journal of Accounting and Economics*. August. pp. 113—127.

Graham, Boyd. 2001. *Social Auditing - A Method of Determining Impact. Alana Albee Consultan and Associates*. United Kingdom: Caledonia

Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

IAASB. 2014. *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and related services pronouncements*, Part I to III.

Karyono, 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Kell, Walter G dan William C.Boynton. 2002. *Modern Auditing*. Edisi 10. New York: John Willey and Sons.

Kinney, W.R. 1999. "Auditor Independence: A Burdensome Constraint or Core Value?". *Accounting Horizons*. 13 (1). pp. 69—75.

Krinsky, I. dan W. Rotenberg. 1989. "The Valuation of Initial Public Offerings". *Contemporary Accounting Research*. 5. pp. 501—515.

Lee, C.J., C. Liu, dan T. Wang. 1999. "The 150-hour Rule". *Journal of Accounting and Economics*. 27 (2). pp. 203—228.

Mautz, R.K. dan H.A. Sharaf. 1961. *The Philosophy of Auditing*. Sarasota, Florida: American Accounting Association.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2014. *Risk Management and Corporate Governance*. OECD Publishing.

Pearce John, Richard B Robinson. 2008. *Manajemen Strategis, Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Priyadi, Gilang. 2012. *Panduan Audit Sistem Mutu*. Bumi Aksara. Jakarta.

Titman, S., dan B. Trueman. 1986. "Information Quality and The Valuation of New Issues". *Journal of Accounting and Economics*. 8 (June). pp. 159—172.

Tuanakotta, Theodorus M. 2013. Audit Berbasis ISA. Salemba Empat. Jakarta.

_____. 2015. *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wolfe, David T. and Hermanson, Dana R. 2004. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*. Vol 74 Issue 12, hal.1-5.

Watkins, A.L. W. Hillison, dan S.E. Morecroft. 2004. "Audit Quality: A Synthesis of Theory and Empirical Evidence". *Journal of Accounting Literature*. 23. pp. 153—193.

GLOSARIUM

Asersi adalah representasi oleh manajemen baik secara eksplisit (dalam bentuk pernyataan) maupun implisit (tersirat) yang terkandung dalam laporan keuangan. Representasi ini digunakan oleh auditor untuk memerhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan yang mungkin terjadi.

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal terhadap laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan.

Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang objektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu.

Auditor eksternal merupakan pihak luar yang berkedudukan independen dan tidak memihak baik terhadap *auditee*-nya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan *auditee*-nya (pengguna laporan keuangan).

Auditor internal adalah pegawai dari perusahaan yang diaudit, auditor ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen dalam lingkungan perusahaan sebagai suatu bentuk jasa bagi perusahaaan.

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berkerja di bawah instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan untuk pemerintah.

Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan, serta terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.

Fraud adalah perbuatan menyimpang dan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya melalui cara-cara ilegal yang dapat merugikan pihak lain.

Independensi adalah meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi untuk mempertahankan kemandirian.

Integritas artinya lurus, lugas, dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

Kerahasiaan artinya menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis. Oleh karena itu, tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga yang tanpa hak/wewenang tepat dan spesifik, kecuali ada hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya.

Kertas kerja adalah dokumentasi atas pelaksanaan pekerjaan audit.

Kode etik adalah manifestasi dari etika profesi yang harus ditaati oleh seluruh anggota profesi.

Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional artinya memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional untuk memastikan bahwa klien atau karyawan mendapatkan jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terakhir dalam praktik, ketentuan perundangan dan teknik, serta bertindak sesuai dengan standar teknis dan standar profesional.

Konsultasi adalah meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (*judgement*), dan wewenang memadai.

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah, atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut.

Objektivitas artinya tidak membiarkan bia, benturan kepentingan atau tekanan pihak lain dalam kaitan menghilangkan kearifan dan akal sehat profesional dan bisnis.

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Pendapatan diartikan sebagai suatu arus masuk atau penambahan atas aset suatu entitas atau penyelesaian liabilitas (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari suatu perusahaan.

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas, dan efisiensi operasi. **Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP)** adalah cara atau metode yang diimplementasikan pada sebuah kantor akuntan publik untuk memastikan bahwa standar *auditing* secara konsisten ditaati dalam setiap kontrak kerja yang mengikat KAP.

Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit selama proses audit.

Risiko bisnis adalah kegagalan dari perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk menyediakan pelaporan keuangan secara akuntabel dan reliabel.

Risiko audit adalah ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dan pendapat wajar telah diberikan.

Risiko deteksi adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen

akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat ditoleransi.

Risiko inheren atau bawaan mengukur penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji (kekeliruan atau kecurangan) yang material dalam segmen, sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal.

Risiko pengendalian mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam suatu segmen akan dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien.

Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit, serta syarat minimum yang harus dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan.

Salah saji yang diketahui adalah salah saji spesifik dalam suatu saldo akun yang teridentifikasi selama audit.

Salah saji yang mungkin adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun atau estimasi salah saji yang berdasarkan pada pengujian auditor atas sampel populasi.

INDEKS

A

Asersi, 2, 11, 15, 17, 45, 59, 60, 63, 89, 90, 98, 99, 100, 103, 104, 112, 113, 115, 116, 125

Audit, 1, 4, 7, 18, 19, 20, 48, 52, 59, 86, 87, 88, 91, 98, 99, 102, 103, 107, 111, 113, 116, 119, 124

Audit kepatuhan, 143

Audit Operasional, 5, 5

Auditor eksternal, 6, 40, 41, 43, 143

Auditor internal, 6, 41

Auditor pemerintah, 7, 144, 144

B

Bukti Audit, 4, 9, 62, 125

C

Cut off, 92, 106, 116, 119, 121

D

Diplomatis , 29

E

Etika profesi, 33, 145

Etis, 27, 28, 36, 42, 70

F

Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi, 42

Fraud, 41, 68, 69–148, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79–148, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 100, 105

G

Going concern, 138

H

Hubungan tripartit , 3

I

independensi, 10, 13, 32, 41

Inspeksi, 14, 21, 62, 89, 91, 103, 116, 117

Integritas, 13, 30, 32, 52, 59

International Standards on Auditing (ISA), 8, 36, 70

K
kerahasiaan 10, 28, 129, 145
Kertas kerja audit 18
Kode etik auditor 22, 29, 33
Konfirmasi, 14, 19, 21, 89, 91, 95, 103, 104, 109, 117, 118, 121
Konsultasi, 32, 145
Kriteria, 2, 3, 4, 5, 7, 19–148, 20, 78, 99, 143, 144

L
lingkungan pengendalian, 36, 37, 42

M
Materialitas 52, 63

Model risiko audit 59

O
Objektivitas 28, 29, 46, 145
Opini audit 124, 126, 129, 146

P
Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien, 32
Pengembangan profesional, 32
Pengendalian intern, 34, 35, 37, 41, 45, 48, 100, 113
Pengendalian mutu, 31, 146
Pengujian audit 60, 64, 96–148, 109, 116, 121
Penugasan auditor, 32
Perilaku profesional, 26
Profesi, 1, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 33, 129, 145, 147
Program audit, 62, 86, 91, 96

R
Risiko audit dapat diterima 58
Risiko bawaan 59, 60
Risiko bisnis 53
Risiko deteksi 59, 61
Risiko pengendalian 60, 91, 147

S
Standar audit 1, 7, 8, 11–148, 12, 131, 133
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 7, 13, 22
Strategi audit 86, 87
Supervisi 32

T
Tujuan audit 2, 10, 12, 30, 48, 62, 89, 91, 109, 121

PROFIL PENULIS

Arum Ardianingsih, SE, M.Acc, Ak, CA lahir di Bojonegoro pada 8 Juni 1983. Penulis menyelesaikan perguruan tinggi yaitu S-1 di UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 2005, Pendidikan Profesi di UGM Yogyakarta tahun 2007, dan S-2 di UGM Yogyakarta tahun 2009. Ia memulai karir mengajar di Universitas Pekalongan sejak tahun 2009, mengampu mata kuliah *auditing* I, *auditing* II, etika bisnis dan profesional, serta analisis laporan keuangan. Bidang kajian utama adalah *auditing* dan akuntansi keuangan. Ia aktif sebagai anggota redaksi Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI) Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan dari tahun 2011 hingga sekarang. Hasil karya berupa buku yang sudah dihasilkan adalah (1) Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Praktis, 2015 (Unikal Press) dan (2) Audit Laporan Keuangan I (Teori dan Kasus), 2016 (Unikal press). Penulis dapat dihubungi melalui arumbundavina@gmail.com.